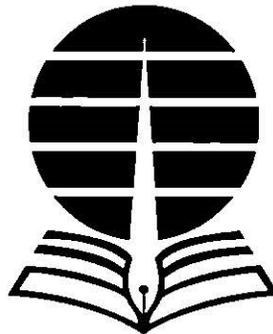


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03
TAHUN 2012 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN DI KABUPATEN NUNUKAN
(Studi Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

RIATNAH

NIM. 500895779

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Nunukan (Studi Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan) adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Nunukan, Nopember 2017

Yang Menyatakan



Riatnah

NIM. 500895779

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Riatnah
 NIM : 500895779
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012
 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten
 Nunukan (Studi Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan
 di Nunukan)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 11 November 2017
 Waktu : 09.30 – 11.00 Wita

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Nama : Dr.Ir. Nurhasanah, M.Si.

Penguji Ahli
 Nama : Prof. Dr. Budiman Rusli, M.Si.

Pembimbing I
 Nama : Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA. Ph.D.

Pembimbing II
 Nama : Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si.

Tanda Tangan

.....

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan (Studi Kebijakan Ketersediaan Pangan asal Hewan di Nunukan)

Penyusun TAPM : Riatnah

NIM : 500895779

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu/11 Nopember 2017

Menyetujui,

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si.
NIP. 19660805 199203 1 003

Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph. D.
NIP. 19670217 199103 1 010

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu

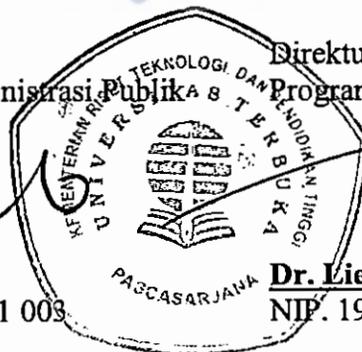
Program Magister Administrasi Publik

Direktur

Program Pascasarjana

Dr. Darmanto, M.E.d
NIP. 19591027 198603 1 003

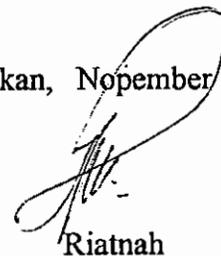
Dr. Liestyodono B. I., M.Si.
NIP. 19581215 198601 1 009



RIWAYAT HIDUP

- Nama : Riatnah
NIM : 500895779
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan, 2 Agustus 1967
Riwayat Pendidikan : 1. Lulus SD di Pertamina Tarakan pada tahun 1981
2. Lulus SMP di SMP Patra Dharma Tarakan Thn 1984
3. Lulus SMA di SMAN 1 Tarakan pada thn 1987
4. Lulus S1 di Universitas Hasanuddin pada tahun 1994
- Riwayat Pekerjaan : 1. Tahun 2000 s/d 2001 sebagai PPL di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltim.
2. Tahun 2002 s/d 2005 sebagai Kasi Distribusi Peredaran Hasil Ternak di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan Kaltim.
3. Tahun 2005 s/d 2009 sebagai Kasi Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan Kaltim
4. Tahun 2010 s/d 2016 sebagai Kasi Kelembagaan Petani pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kab. Nunukan Kaltara
5. Tahun 2017 s/d sekarang sebagai Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner , Pemasaran dan Pengolahan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan Kaltara

Nunukan, Nopember 2017



Riatnah

NIM. 500895779

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayahnya-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan baik. Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini berjudul “ **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Nunukan** ” (Study Tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan).

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta. Penelitian ini menganalisis tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan .

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

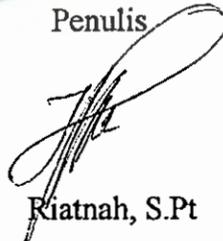
1. Bapak Dr. Liestyodono B.I, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Darmanto, M.E.d. selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Andy Fefta Widjaya, MDA, Ph. D selaku Pembimbing I
4. Bapak DR. Agus Joko Purwanto , M.Si selaku Pembimbing II
5. Bupati Nunukan Hj. Laura Hafid SE, MM yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan.

6. Bapak Ir. H.Suprianto,HP, M.Si, selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kab. Nunukan yang telah memberikan izin untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang S2.
7. Bapak Cholid Mohammad, SP selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan yang terus membantu dalam memberikan masukan pada proses penulisan Tugas Akhir Program Magister ini.
8. Bapak Dr. Sofyan Aripin, M.Si Kepala UPBJJ-UT Tarakan.
9. Kedua orang tua, suami dan anak-anak tercinta yang selalu mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini tentunya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis memohon kepada para pembaca barangkali menemukan kesalahan atau kekurangan dalam karya tulis ini harap maklum. Selain itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada semua pembaca demi lebih baiknya karya tulis yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Nunukan, 25 Oktober 2017

Penulis



Riatnah, S.Pt

Nim . 500895779

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Study tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan)

Riatnah

Riatnah.nunukan@gmail.com

Program Pascasarjana

Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Study tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan), dan faktor penghambat terhadap Implementasi Peraturan daerah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner , wawancara, observasi, study pustaka, dan study dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2017 dari bulan Juli – Agustus 2017 di Kabupaten Nunukan, dengan responden pemangku jabatan, masyarakat umum , pelaku usaha dan peternak. Data kemudian direduksi dan disajikan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa , Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan (Study Kebijakan Ketersediaan Pangan asal Hewan) sangat ditentukan oleh unsur komunikasi, sumberdaya, disposisi dan karakter pelaksana. Keempat unsur sangat mempengaruhi Implementasi Kebijakan tersebut karena masing-masing memiliki kapasitas tersendiri yaitu dalam komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana serta disposisi . Ada faktor penghambat jalannya implementasi yaitu swasembada ternak yang belum tercapai karena sumberdaya manusia dan finansial yang masih sangat terbatas, sehingga perlu dilakukan koordinasi intensif antar dinas terkait mengenai ketersediaan pangan asal hewan yaitu pemasok daging beku dari Indonesia harus sudah terbentuk sehingga ketersediaan daging beku dari Jakarta dapat masuk di Kabupaten Nunukan . Dengan adanya daging yang berkualitas dengan harga lebih murah, masuk secara resmi ke Nunukan akan mencegah masuknya daging beku asal Malaysia yang masuk di Kabupaten Nunukan secara ilegal.

Dan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah belum berjalan secara optimal disebabkan oleh faktor disposisi dan sikap pelaksana dalam melakukan pengawasan melalui koordinasi lintas sektor antara dinas terkait yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan dengan instansi vertikal diantaranya Kantor Bea dan Cukai, Kantor Karantina Pertanian, dan Kepolisian (pengamanan) yang bertugas dipintu keluar masuknya

produk pangan asal hewan ke wilayah Kabupaten Nunukan. Koordinasi lintas sektor yang berlangsung selama ini masih kurang optimal sehingga masih maraknya terjadi peredaran daging ilegal yang merugikan peternak di Nunukan.

Kata Kunci : Implementasi Perda, faktor penghambat , Kriteria Penilaian Ketersediaan.



Abstract**Implementation of Regional Regulation Nomor 03 / 2012 on Animal Husbandry and Animal Health in Nunukan On 2017****(Study of Animal Food Supply Policy in Nunukan)****Riatnah****Riatnah.nunukan@gmail.com****Program Pascasarjana****Universitas Terbuka**

This study aims to analyze the Implementation of Regional Regulation No. 03 /2012 on Animal Husbandry and Animal Health in Nunukan on 2017 (Study of Animal Food Availability Policy in Nunukan), and the obstacle to the Implementation of the Local Regulation. This research use qualitative descriptive research with data collection methods using questionnaires, interviews, observation, literature study, and study documentation. Data collection was conducted in 2017 from July - August 2017 at Nunukan, with respondents of stakeholders, the general public, business actors and ranchers. The data are then reduced, presented and then drawn conclusions.

The results of the study and discussion show that the implementation of the policy of regional regulation No. 03/2012 on Animal Husbandry and Animal Health in Nunukan District (Study of Animal Food Availability Policy) is determined by the communication, resource, disposition and character of the Implementers. The four elements greatly affect the Implementation of the Policy because each has its own capacity in communication, resources, and attitude of the implementer and disposition.

There is a factor inhibiting the implementation of self-sufficiency of livestock that has not been achieved because of human and financial resources are still very limited, so it needs to do intensive coordination between the relevant agencies on the availability of food from animal origin of frozen meat suppliers from Indonesia should have been formed so that the availability of frozen meat from Jakarta can enter Nunukan. Given the quality of meat, more cheap cost and formal entry into Nunukan will prevent the entry of frozen Malaysian meat that entered in Nunukan illegally.

And Implementation of Regional Regulation Policy has not run optimally caused by disposition factor and executor attitude in conducting supervision through cross sector coordination between related offices namely Agriculture and Food Security Service and Trade Office of Nunukan with vertical institution such as Customs and Excise Office, Agricultural Quarantine Office, and Police (security) in charge of the entrance of the entry of food products of animal origin to Nunukan. The cross-sectoral coordination

that has been going on is still less than optimal so that there is still circulation of illegal meat that harm ranchers in Nunukan.

Keywords : Implementation of local regulations, inhibiting factors, Criteria Assessment of Availability



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan.....	i
Lembar Layak Uji.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Riwayat Hidup.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar isi	xi
Daftar Tabel.....	xv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	18
 BAB II. TINJAUAN PUTAKA	
A. Kajian Teoritis	
1. Konsep Kebijakan.....	19
2. Model Kebijakan Publik.....	25
3. Implementasi Kebijakan Publik.....	40
B. Penelitian Terdahulu	57
C. Kerangka Berfikir	60
D. Operasionalisasi Konsep	61

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	64
B. Fokus Penelitian.....	65
C. Lokasi Penelitian.....	66
D. Instrumen Penelitian.....	67
E. Sumber Informasi	68
F. Teknik Pengumpulan Data.....	69
G. Metode Analisis Data.....	72

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis.....	75
2. Kondisi Demografis.....	79
3. Karakteristik Responden.....	82

B. Hasil

1. Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2012	
a. Populasi Ternak.....	85
b. Distribusi Pasokan Daging.....	89
c. Kebutuhan Konsumsi dan Ketersediaan Daging di Nunukan.....	92
2. Faktor Penghambat Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
a. Komunikasi.....	96
b. Sumberdaya.....	99
c. Disposisi	102
d. Karakteristik Pelaksana.....	104
3. Persepsi masyarakat terhadap ketersediaan daging	
a. Alternatif sumber ketersediaan daging di Kab. Nunukan	105
b. Penilaian terhadap kriteria pertimbangan dalam mengonsumsi daging	

1). Ketersediaan daging berdasarkan kriteria kemudahan dalam mendapatkan.....	107
2). Ketersediaan daging berdasarkan keterjangkauan harga.....	107
3). Ketersediaan daging berdasarkan kontinuitas pasokan daging.....	108
4). Ketersediaan daging berdasarkan jaminan kualitas	108
5). Ketersediaan daging berdasarkan kriteria daging berasal dari Perdagangan yang adil dan jujur	109
6). Ketersediaan daging berdasarkan kriteria mengurangi ketergantungan dari luar.....	109
c. Tingkat kepuasan konsumen terhadap sumbu pemenuhan ketersediaan Daging di Nunukan	111

C. Pembahasan

1. Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2012	
a. Populasi Ternak.....	116
b. Distribusi Pasokan Daging.....	127
c. Kebutuhan Konsumsi dan Ketersediaan Daging di Nunukan.....	131
2. Faktor Penghambat Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
a. Komunikasi.....	139
b. Sumberdaya.....	141
c. Disposisi	145
d. Karakteristik Pelaksana.....	147
3. Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Daging	
a. Alternatif sumber ketersediaan daging di Kab. Nunukan	152
b. Penilaian terhadap kriteria pertimbangan dalam mengkonsumsi daging	
1). Ketersediaan daging berdasarkan kriteria	

kemudahan dalam mendapatkan.....	155
2). Ketersediaan daging berdasarkan keterjangkauan harga.....	156
3). Ketersediaan daging berdasarkan kontinuitas pasokan daging.....	157
4). Ketersediaan daging berdasarkan jaminan kualitas	158
5). Ketersediaan daging berdasarkan kriteria daging berasal dari perdagangan yang adil dan jujur.....	159
c. Tingkat kepuasan konsumen terhadap sumber pemenuhan ketersediaan Daging di Nunukan	161
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	167
B. Saran.....	168
 DAFTAR PUSTAKA.....	 170
DAFTAR LAMPIRAN.....	174
Lampiran 1. Data peternak ayam potong di Nunukan	
Lampiran 2. Daftar angket	
Lampiran 3. Pedoman wawancara	
Lampiran 4. Transkrip wawancara	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Populasi ternak di Kabupaten Nunukan	9
Tabel 1.2. Data pelayanan Keswan di Kabupaten Nunukan.....	10
Tabel 1.3 Rata-rata kebutuhan daging pertahun di Kabupaten Nunukan	10
Tabel 1.4 Ketersediaan daging ayam ras pertahun di Kabupaten Nunukan	11
Tabel 1.5. Ketersediaan daging sapi potong di Kabupaten Nunukan	12
Tabel 1.6 Kebutuhan dan ketersediaan daging sapi dan ayam potong di Kabupaten Nunukan	12
Tabel 2.1 Matrik penelitian terdahulu	57
Tabel 3.1 Data dan sumber data informasi sekunder	64
Tabel 4.1. Luas wilayah Kabupaten Nunukan per Kecamatan tahun 2016	75
Tabel 4.2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tahun 2013 -2015 ...	77
Tabel 4.3. Distribusi PDRB Kabupaten Nunukan menurut lapangan usaha	78
Tabel 4.4. Iktisar distribusi dan pengembalian angket	80
Tabel 4.5. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan	80
Tabel 4.6. Karakteristik responden berdasarkan usia.....	81
Tabel 4.7. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan	82
Tabel 4.8. Populasi ternak di Kabupaten Nunukan tahun 2016.....	83
Tabel 4.9. Tingkat pertumbuhan populasi ternak sapi di Kabupaten Nunukan.....	84
Tabel 4.10. Populasi sapi di Kabupaten Nunukan tahun 2011-2016 per Kecamatan.....	85
Tabel 4.11. Pemasukan Ternak di Kabupaten Nunukan tahun 2011 - 2016	86
Tabel 4.12. Data pemotongan hewan qurban di Kab. Nunukan Thn 2017	87

Tabel 4.13. Data pemasukkan produk ternak di Kec. Nunukan 2014-2017	88
Tabel 4.14. Pemasukan daging sapi/Kerbau di Kab. Nunukan Thn 2017	89
Tabel 4.15. Rata-rata kebutuhan daging pertahun di Pulau Nunukan	90
Tabel 4.16. Ketersediaan daging ayam potong pertahun di Kab. Nunukan	90
Tabel 4.17. Ketersediaan daging sapi potong di Kab. Nunukan.....	91
Tabel 4.18. Kebutuhan dan ketersediaan daging sapi dan ayam potong di Pulau Nunukan.....	91
Tabel 4.19. Alternatif sumber ketersediaan daging di Kab. Nunukan.....	103
Tabel 4.20. Penilaian responden terhadap kriteria yang menjadi pertimbangan dalam mengkonsumsi daging.....	104
Tabel 4.21 Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria kemudahan dalam mendapatkan	105
Tabel 4.22. Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria keterjangkauan harga.....	106
Tabel 4.23. Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria kontinuitas pasokan daging.....	106
Tabel 4.24. Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria jaminan kualitas.....	107
Tabel 4.25. Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria daging berasal dari perdagangan yang adil dan jujur.....	108
Tabel 4.26. Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria mengurangi ketergantungan dari luar	108
Tabel 4.27. Persentase alternatif terhadap kriteria	109
Tabel 4.28. Alternatif sumber ketersediaan daging di Kabupaten Nunukan	110
Tabel 4.29. Tingkat kepuasan konsumen terhadap sumber pemenuhan ketersediaan daging di Nunukan	110

Tabel 4.30. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria kemudahan mendapatkan daging.....	111
Tabel 4.31. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria harga daging yang terjangkau.....	112
Tabel 4.32. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria pasokan daging yang kontinyue	112
Tabel 4.33. Tingkat kepuasan konsumen terhadap jaminan kualitas	113
Tabel 4.34. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria prosedur perdagangan daging yang jujur dan adil	114
Tabel 4.35. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria mengurangi ketergantungan daging dari luar.....	114
Tabel 4.36 Tingkat pertumbuhan populasi ternak sapi di Kab. Nunukan	117
Tabel 4.37 Pemotongan ternak (ekor) di Kab. Nunukan Tahun 2012-2016	118
Tabel 4.38 Data pemasukan produk ternak di Kec. Nunukan 2014-2017	133
Tabel 4.39 Kebutuhan dan ketersediaan daging di Nunukan	134
Tabel 4.40 Produksi ayam pedaging di Kec. Nunukan dan Nunukan Selatan	135
Tabel 4.41 Produksi daging (kg) di Kabupaten Nunukan.....	138
Tabel 4.42 Alokasi anggaran pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan	144
Tabel 4.43 Persentase alternatif terhadap kriteria	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah menciptakan implikasi luas disemua aspek pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah . Seiring dengan kebijakan otonomi daerah dan konsep dari paradigma baru pemerintahan yang lebih menitik beratkan pada aspek demokrasi, pemberdayaan masyarakat , dan pelayanan masyarakat yang prima, maka implikasi yang muncul yaitu tuntutan kepada semua tingkatan organisasi, termasuk organisasi atau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan , khususnya untuk lebih berkualitas , produktif, dan profesional di bidangnya sehingga menjadi inovatif dan kreatif.

Salah satu tujuan penyerahan otonomi daerah adalah dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Aspek penting yang mempengaruhinya antara lain adalah kualitas sumberdaya manusia dan kemampuan keuangan daerah yang dirasa masih kurang. Tetapi dari aspek-aspek tersebut sumber daya manusia, baik sumber daya manusia sebagai aparatur maupun sumber daya manusia sebagai masyarakat merupakan faktor paling dominan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Berapapun besarnya dana yang dimiliki oleh suatu daerah, dan berapa besarnya sumber daya

alam yang tersedia, tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, maka daerah sulit untuk berkembang.

Selain alasan di atas, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka pelaksanaan fungsi otoritas veteriner telah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Undang-Undang No. 6 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-undang ini disebut pula sebagai undang-undang Pokok Kehewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan, dan diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan, membahas tentang hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa untuk kesejahteraan masyarakat. Bahwa untuk mencapai maksud diatas maka perlu diselenggarakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan sehingga perlu adanya landasan hukum langsung dan bersifat operasional untuk pengaturannya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus berupaya agar target pencapaian swasembada daging dapat terlaksana. Namun sejak bulan februari

2015 dipasar-pasar tradisional sekitar Jabotabek banyak dibanjiri daging sapi ilegal. Bahkan target pemerintah untuk swasembada sapi sebesar 746 ribu ton pada tahun 2019 kemungkinan akan sulit tercapai, karena petani sapi belum terorganisir dengan baik sehingga stabilisasi harga daging sapi sulit dilakukan (Swadaya, Edisi 54). Selanjutnya dijelaskan oleh Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bustanul Arifin bahwa Indonesia masih membutuhkan impor daging sapi cukup lama, karena Indonesia hanya mampu mengandalkan sapi rakyat. Padahal sapi yang dimiliki rakyat hanya berkisar dua hingga tiga ekor sapi perorang. Kuatir angka target swasembada daging pada 2019 tidak akan tercapai. Kita tidak ingin mengulangi pemerintahan yang lama, menargetkan swasembada daging sapi dengan langsung menekan kuota import. Akibatnya malah banyak menimbulkan kontroversi. Beliau menegaskan Indonesia diprediksi baru dapat melakukan swasembada daging sapi pada tahun 2024 mendatang, hal ini sudah melalui analisis modelling dan simulasi permintaan. Sehingga pemerintah Indonesia tetap masih membutuhkan impor.

Dalam rangka mempercepat pelayanan pemasukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Menteri Pertanian telah menetapkan peraturan tentang pemasukan karkas, daging , dan atau olahannya kedalam wilayah Negara Republik Indonesia Peraturan tersebut tertuang dalam SK Nomor 58, Permentan/PK.120/II/2015. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemasukan dengan tujuan melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan. Juga untuk memastikan terpenuhinya persyaratan aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan.

Undang-undang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) adalah Undang-undang yang berisi segala urusan yang berhubungan langsung dengan hewan dan bahan-bahan asal hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat karena merupakan rantai penghubung antara bidang pertanian dan kesehatan manusia berkaitan dengan pengobatan, pengendalian dan pencegahan penyakit zoonosa (*zoonosis*) serta penyakit yang ditularkan melalui makanan (*food borne diseases*).

Sejalan dengan perkembangan isu global dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan pendapatan, perubahan pola konsumsi serta meningkatnya pendidikan dan kesadaran konsumen akan mutu, maka meningkat pula tuntutan konsumen untuk memperoleh produk pangan hewani yang aman dan sehat. Dalam era pasar bebas yang ditandai dengan kemudahan akses pasar bagi produk impor, maka produk peternakan Indonesia akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Hanya dengan daya saing yang tangguh menyangkut jaminan keamanan maupun kualitas serta harga yang bersaing maka produk domestik akan mampu bertahan.

Di lain pihak, untuk dapat bersaing di pasar global dituntut adanya efisiensi dan produktifitas yang tinggi selain adanya jaminan mutu yang baik. Secara tradisional atau konvensional sistem pengawasan produk akhir melalui pengambilan dan pengujian contoh produk (*end product testing*) dinilai masih belum memadai terutama dalam kaitannya dengan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran mengingat pencemaran dapat terjadi di setiap mata rantai pengadaan pangan sejak produksi.

Visi Direktorat Kesmavet adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif melalui perlindungan dan jaminan keamanan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal dan berdaya saing. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diterapkan misi yang harus diemban oleh Direktorat Kesmavet, meliputi : menyediakan produk pangan hewani yang ASUH dan produk hewan yang sehat dan berkualitas melalui pengawasan hygiene dan sanitasi serta pengendalian residu dan cemaran mikroba, melindungi sumber daya hewan dan masyarakat konsumen di dalam negeri melalui pengawasan peredaran dan analisis resiko terhadap pemasukan produk pangan hewani, melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewani melalui pengawasan pemasukan produk hewan non pangan, membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kesejahteraan hewan.

Menjamin karkas, daging dan atau olahannya yang dimakan dan bebas dari zoonosis serta penyakit hewan menular, bahaya kimiawi dan bahaya fisik, serta memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan karkas, daging dan atau olahannya. Pemasukan daging adalah kegiatan memasukkan karkas daging dan atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang harus memperoleh rekomendasi, yakni memperoleh keterangan teknis yang menyatakan daging dan atau olahannya memenuhi kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam pasal lima Peraturan Menteri Pertanian dinyatakan untuk memasukkan daging, terlebih dahulu memperoleh verifikasi dari Dinas Peternakan Provinsi dan atau Kabupaten asal daging sapi lokal. Penyerapan

daging lokal sebanyak 3 % untuk importir umum dan 1,5 % untuk importir produsen dari total jumlah pemasukkan yang akan datang. Sedangkan pelaku usaha BUMN, BUMD atau lembaga sosial harus berbadan usaha atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Disamping itu persyaratan yang harus dipenuhi dari pemasukan karkas, daging, dan atau olahannya adalah sebagai berikut : a) Jenis karkas, daging, dan atau olahannya, b) Masa penyimpanannya di NKRI, c) Negara asal dan unit usaha, serta d) Kemasan/label dan pengangkutan.

Data GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas) pada tahun 2012, diprediksi konsumsi karkas per kapita akan meningkat menjadi 8,6 kg per kapita pada tahun 2013; 9,97 kg per kapita pada tahun 2014 ; 11,45 kg per kapita pada tahun 2015; 12,97 kg per kapita pada tahun 2016, dan 14,49 kg per kapita pada tahun 2017. Begitu pula dengan konsumsi telur yang diprediksi akan terus meningkat selama lima tahun mendatang, dari tahun 2012 hingga tahun 2017, dimana pada tahun 2012 konsumsi telur per kapita sebesar 74 kg per kapita dan akan meningkat menjadi 162 kg per kapita pada tahun 2017 (Anonim, 2013). Saat ini penduduk Nunukan rata-rata mengkonsumsi karkas ayam pedaging adalah 9 kg per kapita pertahun dan untuk kebutuhan daging sapi adalah 2,9 kg per kapita pertahun, sehingga jika digabungkan untuk kebutuhan daging adalah 11,9 kg perkapita pertahun pada masyarakat Nunukan tahun 2017.

Kebijakan import daging sapi untuk pemenuhan kebutuhan nasional dinilai hanya mampu mengendalikan harga dalam jangka pendek. Menurut Bayu Krisnamurthi sebagai Ketua Perhimpunan Ekonomi pertanian Indonesia (Perhepi) tahun 2017, seharusnya pengendalian pasokan daging sapi dilakukan dalam

jangka panjang. Dan Import sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tapi sifatnya hanya mengendalikan harga dalam jangka pendek. Kementrian Pertanian mencatat kebutuhan daging sapi menjelang Ramadhan hingga lebaran 2017 masih melebihi kemampuan domestik, kebutuhan daging sapi pada mei 2017 mencapai 51.761 ton, sedangkan produksi dalam negeri hanya 30.354 ton. Dan pada perkiraan kebutuhan daging sapi memasuki lebaran 2017 pada bulan Juni diprediksikan kebutuhan bisa menembus 54.646 ton. (Tempo.co. Jakarta, 2017)

Fenomena serupa diatas tentang masuknya daging dari Malaysia ke Kabupaten Nunukan bukan hal baru, namun yang membedakan adalah proses masuknya daging beku dari Malaysia tidak disertai dokumen yang resmi atau masuk secara ilegal. Masyarakat Nunukan sudah sejak lama mengkonsumsi daging tersebut. Hal ini dikarenakan kemampuan kita akan ketersediaan daging segar sangatlah terbatas, jika adapun harganya cukup tinggi sehingga tak terjangkau oleh masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah menyediakan pangan yang berkualitas, maka pemerintah harus memiliki solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Apalagi Kabupaten Nunukan adalah pintu gerbang masuknya produk-produk pangan seperti sembako dari negara tetangga , semakin renggang pengawasan maka semakin terancam kesehatan masyarakat kita.

Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang sangat kecil dan kemampuan penduduk dalam mengusahakan peternakan rakyat hanya bermodal kecil (dana antara 50-300 juta). Sementara peraturan pemerintah hanya mengatur usaha peternakan ayam potong dalam kapasitas yang besar

(peternakan dengan modal 750 juta rupiah), usaha peternakan ayam potong yang banyak dibuka di Kabupaten Nunukan adalah peternakan rakyat dengan modal yang sangat rendah.

Peternakan rakyat dengan modal yang rendah belum diatur oleh undang-undang peternakan, namun banyak bermasalah di Kabupaten Nunukan adalah usaha peternakan ayam potong rakyat yang bermodal rendah tersebut. Usaha peternakan tersebut banyak menimbulkan masalah, karena peternakan ini biasanya dimiliki oleh peternak rakyat ditengah pemukiman penduduk. Peternakan rakyat adalah kepemilikan modal usaha yang sangat kecil, sehingga tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan. Peternakan rakyat banyak yang masih jauh dari peternakan yang higiene dan sanitasi, baik dari segi bangunan kandang, maupun dari segi pengolahan limbah yang masih kurang tepat ditinjau dari segi sanitasi lingkungan. Kelemahan modal usaha peternakan terutama peternak ayam pedaging ini, menyebabkan usaha peternakan rakyat banyak yang mengalami kebangkrutan, sehingga produksi daging ayam menurun dan diisi oleh produk daging ayam dari Sulawesi dan dari negara tetangga Malaysia.

Permasalahan utama adalah masih masuknya daging beku ilegal dari Malaysia memiliki nilai jual lebih murah bila dibandingkan oleh daging beku legal asal Jakarta . Selisih nilai jual ini sangat berpengaruh terhadap nilai jual pedagang daging beku, penjual bakso, rawon, coto makkasar (pelaku usaha) mereka cenderung mencari daging asal Malaysia untuk mencapai keuntungan yang banyak. Sehingga dengan ada tidaknya daging beku legal, tidak menurunkan permintaan daging beku ilegal dari Malaysia. Bahkan ada

kecendrungan pemutihan daging ilegal menjadi legal oleh pengusaha pedagang daging legal.

Masyarakat Kabupaten Nunukan sendiri pernah mengalami keracunan ketika mengkonsumsi daging sapi pada suatu acara, kurang lebih 80 orang yang melapor dan 70 orang yang harus dirawat karena keracunan makanan hajaran yang terindikasi akibat penggunaan daging sapi beku dari Malaysia (Tribunnew.com, 2017) serta ditemukannya daging ayam yang berformalin yang dijual dipasar di wilayah Kabupaten Nunukan (Tribunnews.com,2014).

Sehingga pemerintah daerah bertindak cepat dengan melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap daging sapi dan daging ayam yang beredar di Nunukan. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan (Studi Kebijakan Ketersediaan Pangan asal Hewan di Nunukan).

Masyarakat memerlukan kesediaan daging yang cukup tinggi, sementara harga daging yang tinggi serta ketersediaan ternak sapi potong secara berkelanjutan belum bisa mencukupi. Hal ini dapat terlihat di tabel dibawah ini. Antara jumlah penduduk, ketersediaan daging dan kebutuhan daging di Kabupaten Nunukan sangat berbeda cukup tinggi, mengingat kurangnya ternak sapi potong yang berkembang dan dipelihara di Kabupaten Nunukan. Hal ini tergambar pada Tabel 1.1 di bawah ini .

Tabel 1.1 Populasi ternak di Kabupaten Nunukan

No	Jenis Ternak	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sapi Potong	6.285	7.102	8.847	8.266	8.064	8.965
2.	Kerbau	3.106	2.830	3.242	3.473	3.328	3.951
3.	Kambing	2.337	2.010	2.529	2.964	2.150	2.576
4.	Domba	0	0	44	66	185	206
5.	Babi	14.922	3.491	3.845	4.660	4.313	5.224
6.	Kuda	13	12	7	7	1	4
7.	Ayam Buras	97.237	73.003	78.300	60.784	62.024	76.607
8.	Ayam Petelur	14.700	9.500	9.000	25.100	15.700	27.610
9.	Ayam Pedaging	19.050	73.700	96.250	97.928	226.228	237.539
10.	Itik	25.462	13.553	13.688	13.721	12.490	13.115

Sumber : Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Melihat data populasi ternak di Kabupaten Nunukan yaitu Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa di Nunukan memiliki karakteristik pertumbuhan ternak ruminansia besar dan ternak ruminansia kecil cukup baik, dan memiliki jumlah populasi yang dominan untuk peternakan sapi potong yaitu tahun 2016 mencapai 8.965 ekor setelah dibandingkan dengan ternak lainnya seperti kerbau, kambing dan babi. Dengan jumlah populasi ternak sapi tersebut menunjukkan kemampuan Kabupaten Nunukan dalam menyediakan kebutuhan daging sapi untuk dikonsumsi oleh masyarakat Nunukan yang memang masih jauh dari ketersediaan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Tabel 1. 2 Pemasukan daging sapi/kerbau di Kabupaten Nunukan tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Pemasukan daging ilegal dari Malaysia (kg)	Jumlah Pemasukan dari Jakarta(kg)	Kebutuhan daging Perbulan (kg)
1.	Januari	6.200	-	6.200
2.	Februari	5.600	-	5.600
3.	Maret	6.200	-	6.200
4.	April	6.000	-	6.000
5.	Mei	6.820	-	6.820
6.	Juni	6.600	-	6.600
7.	Juli	7.500	-	7.500
8.	Agustus	7.750	-	7.750
9.	September	6.000	-	6.000
10.	Oktober	6.200	-	6.200
11.	Nopember	6.000	-	6.000
12.	Desember	6.200	-	6.200
	Jumlah	77.070	-	77.070

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nunukan tahun 2016

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kebutuhan daging sapi pada tahun 2016 dipenuhi oleh daging beku Allana ilegal yang masuk ke Nunukan lewat Tawau Malaysia sebanyak 75.000 kg dengan harga Rp 80.000,- perkilogram. Sehingga dapat dikalkulasi kerugian negara dengan masuknya daging ilegal tersebut dalam satu tahun yaitu tahun 2016 sebanyak 6,2 miliar rupiah. Daging tersebut juga tidak terjamin kualitasnya karena masuk ke wilayah Indonesia secara tidak resmi sehingga tidak melalui pemeriksaan daging seharusnya.

Tabel 1.3. Data pelayanan Keswan di Kabupaten Nunukan Tahun 2016

No.	Penyakit	Jenis Ternak					
		Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Kuda	Unggas
1.	BEP	2	-	-	-	-	-
2.	Cacingan	15	4	13	2	-	-
3.	Dermatitis	2	1	-	-	1	-
4.	Distokia	4	-	-	-	-	-
5.	Fasciolosis	1	-	-	-	-	-
6.	Ring worm	1	-	1	-	-	-
7.	Scabies	2	-	25	2	-	-
8.	Tympani	6	-	1	-	-	-
	Jumlah	32	5	40	4	1	-

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan

Dari Tabel 1.3 menunjukkan data pelayanan kesehatan hewan menunjukkan bahwa di Kabupaten Nunukan tidak menunjukkan keadaan yang cukup serius dalam kondisi penyakit ternak untuk tahun 2016 hanya terlihat bahwa ternak yang paling sering ditemukan adalah penyakit cacangan yaitu mencapai 15 ekor pada ternak sapi dan 13 ekor pada ternak kambing. Demikian pula dengan gejala distokia empat ekor sapi dan 25 ekor kambing yang mengalami scabies (penyakit gatal pada kulit). Sehingga gejala penurunan populasi bukan terimbas oleh penyakit pada usaha peternakan namun karena dari berbagai penjualan dan pemotongan ternak.

Tabel 1.4. Rata-rata kebutuhan daging per tahun di Kabupaten Nunukan

No	Kec. / Pulau	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk dewasa	Kebutuhan perkapita pertahun (kg)	Total Kebutuhan Perthn (kg)
1	P. Nunukan	77.942	44.514	11,9	529.716
2	P. Sebatik	36.876	-	11,9	438.824
3.	P.Sebuku,Sembakung, lumbis, S.Menggaris	46.324	-	11,9	551.255
4	Kec.Krayan,Krayan S	8.902	-	11,9	105.933
	Total	170.044	-	11,9*	2.023.523

Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan Tahun 2017

Keterangan 11,9* : 2,9 daging sapi, 9 kg daging ayam kebutuhan perkapita/thn

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan daging di pulau Nunukan dengan jumlah penduduk 77.942 orang membutuhkan 529.716 kg pertahun perkapita adalah 11,9 kg. Demikian pula untuk pulau Sebatik dengan jumlah penduduk 36.876 orang membutuhkan ketersediaan daging 438.824 kg pertahun, dan pulau Sebuku, Sembakung dan Sei. Menggaris dengan total 46.324 membutuhkan ketersediaan daging 551.255 kg pertahun.

Tabel 1.5 Ketersediaan daging ayam Ras per tahun di Kabupaten Nunukan

No	Kec. / Pulau	Jumlah Populasi Ayam pedaging (ekor)	Berat Bdn per ekor hidup (kg)	Berat Karkas per ekor (kg)	Total Produksi karkas (kg)
1.	P. Nunukan	603.567	2	1,7	1.026.064
2.	P. Sebatik	9.600	2	1,7	16.320
3.	P. Sebuku, embakung, Lumbis, S. Menggaris	150.000	2	1,7	255.000
4.	Kec. Krayan, Krayan Selatan	-	-	-	-
	Total				1.297.384

Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan Tahun 2017

Tabel 1.5 menunjukkan ketersediaan daging ayam ras atau ayam potong tipe pedaging menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Nunukan dalam menyediakan daging adalah sebesar 1.297.384 kg pertahunnya. Sementara untuk kebutuhan daging ayam sebagian besar dapat dipenuhi oleh kemampuan masyarakat dalam menyediakannya atau swasembada daging ayam potong telah tercapai di Nunukan.

Tabel 1. 6. Ketersediaan daging sapi potong di Kabupaten Nunukan

No	Kec. / Pulau	Jumlah Populasi Sapi potong	Berat Bdn per ekor hidup (kg)	Berat Karkas per ekor (kg)	Total Produksi karkas (kg)
1	P. Nunukan	789	200	114	89.946
2	P. Sebatik	659	200	114	75.126
3	P. Sebuku, embakung, Lumbis, S. Menggaris	340	200	114	28.760
4	Kec. Krayan, Krayan Selatan	12	200	114	1.368
	Total	1.800	200	114	205.200*

Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan tahun 2016

*) 205.200 kg hanya tersedia dalam satu tahun. Tahun berikutnya stok ternak habis.

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa ketersediaan daging sapi potong di Kabupaten Nunukan dengan melihat populasi ternak yang layak untuk dipotong menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan hanya mampu menyediakan 205.200 kg daging sapi potong segar dari jumlah populasi yang ada, setelah setahun pemotongan maka akan terjadi kekurangan populasi ternak sapi yang sangat tajam, sehingga masyarakat belum dapat menyediakan ternak sapi yang siap untuk dipotong kurang lebih 1.800 ekor yang harus disediakan dalam setiap tahunnya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi masyarakat Nunukan

Tabel 1.7. Kebutuhan dan ketersediaan daging Sapi dan ayam potong di Kabupaten Nunukan

No	Jenis Produk	Kebutuhan Kg/ thn	Ketersediaan (kg)	Kekurangan (kg)	Asal daerah Pemasukan
1.	Daging Sapi segar	455.712	5.472	450.240	Sulawesi
2.	Daging Sapi Beku	450.240	450.240	-	Malaysia
3.	Daging Ayam Potong	1.681.375	1.297.384	383.991	Sulawesi, Malaysia

Sumber data: Karantina Hewan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan 2016

Tabel 1.7 menunjukkan antara kebutuhan daging sapi segar 455.712 kg/tahun di Kabupaten Nunukan sementara ketersediaan daging segar hanya 5.472 kg/tahun, sehingga kebutuhan saat ini dipenuhi oleh daging beku asal India yang masuk lewat Tawau Malaysia tanpa disertai oleh dokumen yang resmi, hal inilah yang menjadi masalah utama tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Bab II pasal 2 Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap penjaminan kualitas pangan asal hewan yang ASUH dan pasal 54 yaitu setiap orang dilarang memasukkan, menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan / atau bagian lainnya yang berasal dari :

- a. Daging ilegal,
- b. Daging gelonggongan,
- c. Daging Oplosan,
- d. Daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging
- e. Daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Hal tersebut membuat peneliti mengambil judul Implementasi karena untuk melihat sejauh mana penerapan atau Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan dalam mengatur bagaimana sistem pemasukan bahan asal ternak secara legal ke wilayah Indonesia, apakah regulasi perdagangan antar wilayah telah diterapkan sebagaimana mestinya.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang masalah, dan uraian tabel diatas maka antara kebutuhan daging asal ternak, dari daging sapi dan ayam potong dibutuhkan penambahan daging dari luar Kabupaten Nunukan sebesar 450.240 kg pertahun untuk kebutuhan daging sapi, kekurangan daging ini diperoleh oleh masyarakat lewat negara tetangga yaitu dari Malaysia , dan yang menjadi masalah adalah daging beku yang masuk dari Malaysia masuk secara ilegal. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2012 yaitu bab IV Kesehatan Masyarakat Veteriner pasal 46 yaitu kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan dalam bentuk penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan dan

pasal 52 tentang Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Ulang daging dimana disini tercantum bahwa daging dari luar daerah harus dilengkapi surat keterangan kesehatan dan asal daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan dan/atau petugas.

Pada awal bulan Maret 2017 kebijakan dari Kementerian Pertanian lewat importer resmi Bulog telah menyediakan daging beku Alana, daging beku melalui Jakarta masuk ke Tarakan namun sampai di Nunukan daging beku legal ini memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu Rp 85.000 – 90.000,- bila dibandingkan dengan daging ilegal hanya Rp 75.000,- mahalnya harga daging beku ini disebabkan biaya transportasi hanya sampai pulau Tarakan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, yang menjadi masalah adalah tingginya harga daging tidak mampu mengimbangi harga daging beku dari Malaysia. Sehingga daging ilegal tersebut masih beredar di pasar Nunukan. Sesuai dengan Perda Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 52 tentang Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Ulang daging yaitu daging dari luar harus dilengkapi surat keterangan kesehatan dan asal daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter Hewan dan / atau petugas. Menganalisa pasal ini maka daging ilegal dari Malaysia tidak layak untuk dikonsumsi, dan telah ada daging beku dari Indonesia yang masuk lewat kota Tarakan yang semestinya dapat difasilitasi dan menjadi faktor utama dalam penyediaan pangan asal hewan yang terjamin kualitasnya.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Studi Tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan) .
2. Faktor apa yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Studi tentang kebijakan ketersediaan pangan asal hewan di Nunukan).
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pangan asal hewan di Kabupaten Nunukan

C. Tujuan Penelitian

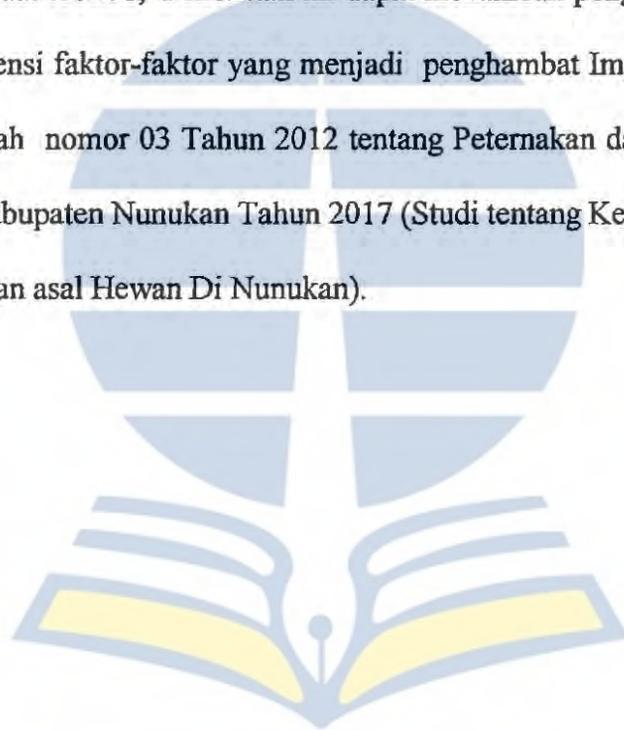
Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Studi tentang kebijakan ketersediaan pangan asal hewan di Nunukan).
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Studi tentang kebijakan ketersediaan pangan asal hewan di Nunukan).
3. Untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pangan asal hewan di Nunukan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/input untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan dalam rangka menentukan strategi peningkatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Manfaat teoritis, Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan sebagai referensi faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Daerah nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Studi tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan asal Hewan Di Nunukan).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kebijakan Publik

Public policy (kebijakan publik) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat (Lubis, 2007 : 9) selanjutnya dikatakan bahwa sasaran utama dari studi kebijakan publik ialah : hubungan antara konsep dan penerapannya yaitu bagaimana kebijakan publik itu mulai dari awal hingga akhir, sejak pengumpulan masukan (input) sampai lahir keluaran-keluaran (output).

Dalam pembuatan sebuah kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik sehingga menghasilkan kebijakan yang baik. Menurut Nugroho (2008:51) kebijakan publik yang baik adalah kebijakan publik yang melayani publik. Kebijakan publik yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu melibatkan publik dalam segala tahap, realistik, transparan, jelas dasar hukumnya dan tidak bertentangan atau tumpang tindih antar kebijakan.

Berkaitan dengan ini, Easton dalam Suwitri, dkk (2016 : 1.8) yaitu :

“ Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik bukanlah suatu yang hampa nilai, melainkan sarat nilai. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat merupakan kepentingan masyarakat atau kepentingan publik, akan terjadi desakan bagi pemerintah sebagai wakil-wakil masyarakat untuk memformulasikan dan mewujudkan dalam suatu kebijakan publik.”

Menurut Dunn (1998) dalam Winarno (2014 : 30-32) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu penyusunan Agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi/Legitimasi kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut dengan masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issue*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan-tindakan yang telah atau akan ditempuh atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam Agenda kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah, melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap Implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut, disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang cukup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah -

masalah kebijakan. Program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, Implementasi maupun terhadap dampak kebijakan.

Menurut Friedrich (1969) dalam Agustino (2016 :16) yang berjudul Dasar-dasar Kebijakan Publik yang mengatakan bahwa :

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Anderson dalam Agustino (2016 :17) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Lebih lanjut dijelaskan Agustino (2016 :19) bahwa ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak diatur perundang-undangan, ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif, secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Menurut Nugroho (2015: 57) kesulitan untuk mendefinisikan tujuan kebijakan publik adalah karena para pakar memiliki kepentingan yang berbeda tentang hal ini. Dalam konteks negara-negara berkembang, tujuan yang lebih relevan adalah menyangkut manajemen sumberdaya. Hal ini karena kebijakan

publik kemudian terkait dengan alokasi sumber daya. Selalu ada biaya dalam usaha mengelola dan mendapatkan nilai darinya. Tujuan kebijakan juga didefinisikan sebagai oposisi dalam konsep, karena kebijakan apapun selalu berada pada posisi ekstrem dari dua kutub, antara yang setuju dan yang keberatan. Tujuan kebijakan publik yang pertama adalah untuk mendistribusikan sumberdaya nasional, yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya nasional. Tujuan kebijakan publik kedua adalah untuk meregulasikan, meliberasi dan menderegulasi. Kebijakan regulasi akan, seperti namanya, meregulasi, memerintah, menciptakan kontrol, menstandarisasi, melegalisasi dan menyelaraskan. Sebagian besar kebijakan dianggap mempunyai tujuan ini. Sebaliknya, kebijakan deregulasi adalah kebijakan yang melepaskan, melonggarkan, menghentikan, atau membebaskan kebijakan regulatif apapun. Tujuan kebijakan publik yang ketiga adalah dinamika dan stabilisasi. Yaitu tujuan kebijakan adalah untuk menstabilisasikan. Dan tujuan kebijakan publik yang keempat adalah memperkuat negara dan memperkuat pasar. Kebijakan memperkuat pasar secara global diterima sebagai liberalisasi dan menjadi nama permainan dewasa ini. Ada desakan untuk mendorong perkembangan ekonomi. Tentu saja, pasar adalah kunci gaya penggerak untuk pertumbuhan ekonomi diseluruh dunia.

Kebijakan dalam penelitian kami adalah kebijakan yang bertujuan untuk meregulasi atau menciptakan kontrol dan melegalisasi guna terjadi stabilisasi pasar, sehingga kebijakan ini dapat memperkuat negara dan memperkuat pasar di Nunukan.

2. Model Kebijakan Publik

Dimensi paling inti dari kebijakan publik adalah proses kebijakan. Di sini kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Nugroho.R (2015 : 219-226) memberikan makna implementasi kebijakan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu : langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Adapun model-model implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

a. Grindle

Grindle (1980) dalam Nugroho. R (2015 : 221) mencatatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya, yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi kebijakan. Isi kebijakan mencakup :

- a. Kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis keuntungan yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang dimaksud
- d. Posisi pembuat kebijakan
- e. Pengimplementasi kebijakan
- f. Sumberdaya yang dihasilkan.

Kontek kebijakan mencakup :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

- b. Karakteristik lembaga/institusi dan penguasa
- c. Tingkat kepatuhan

b. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Menurut Agustino (2016 :133-136) Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter dan Van Horn disebut dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

4. Sikap atau Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu

proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter dan van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondusifitas kondisi lingkungan eksternal.

c. Model George Edward

George Edward III (1980) dalam Nugroho. R (2015 : 225) mencatat bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya, Edward III menyarankan untuk memberikan perhatian kepada empat isu utama : komunikasi, sumber daya, disposisi sikap dan struktur birokrasi.

Menurut Agustino (2016 : 136) Model implementasi kebijakan ketiga yang berspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diterima oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan

implementasi suatu kebijakan, yaitu : (i) Komunikasi; (ii) sumber daya ; (iii) disposisi (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu :

- a. Transmisi : penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian, hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan : komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan

informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

- c. Konsistensi : perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten. Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu ;

- a. Staf : sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- b. Informasi : dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan melakukan tindakan. (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang : pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika kewenangan itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diperlukan dalam pelaksanaan demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas : Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III adalah :

- a. Efek Disposisi : disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*) : dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, sehingga metode bypassing personil.
- c. Insentif : Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan

perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah :

- a. Membuat Standart Operating Prosedure (SOPs) yang lebih fleksibel ; SOPs adalah suatu prosedure atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standart yang telah ditetapkan (atau standart minimum yang dibutuhkan warga).

b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab pelbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

d. Implementasi Kebijakan Model Merilee S Grindle

Menurut Agustino (2016 : 142-145) Model implementasi merilee S Grindle (1980) dengan pendekatannya dikenal dengan nama Implementasi as A Political and Administrasi Proses. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of context of Policy* (1980 :5).

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah :

a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhinya suatu implementasi kebijakan. Indikator yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementor* (pelaksana Program)

Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

2. Context of Policy menurut Grindle (tahun 1980 : 5) dalam Agustino (2016 :144) adalah :

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu memperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menghadapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Sedangkan pendekatan *bottom up*, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisasi dari pusat. Pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan *bottom up* adalah model implementasi kebijakan formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosiokultur yang ada agar kebijakan tidak bersifat kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

Definisi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian kami tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan tahun 2017 (Study Kebijakan

Ketersediaan Pangan asal Hewan di Nunukan) adalah Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yang dikombinasikan dengan model Implementasi Edward III, dan Model Teori Grindle maka, kami mengambil kesamaan maksud dan substansi dari tiga teori implementasi yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

1. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

2. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan

para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

3. Sikap atau Kecendrungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

4. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik yang menjadikan kebijakan dalam bekerjanya berada dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Dengan efisiensi kebijakan dapat dipahami bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi kebijakan (komitmen) yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan (Faried, dkk, 2012 : 85)

Disini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1987 : 5), yaitu :

- a. Ada program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran , dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Adapun makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008 :22), menyatakan bahwa :

“ Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian- kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman- pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian.”

Pandangan kedua ahli di atas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segera pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Sementara Implementasi menurut Van Metter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2014 : 135) mengatakan bahwa :

“Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu-individu swasta(kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.”

Model proses Implementasi kebijakan :

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan – tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Karakteristik badan-badan Pelaksana
- d. Kondisi-kondisi ekonomi, Sosial dan politik
- e. Kecendrungan pelaksana (Implementor)
- f. Kaitan antara komponen-komponen model
- g. Masalah Kapasitas
- h. Teori-teori Implementasi kebijakan

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014 :134) mengemukakan pendapatnya bahwa :

“ Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan , keuntungan (*Benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).” Implementasi merupakan serangkaian tindakan setelah sebuah kebijakan itu, diputuskan yaitu langkah-langkah operasional atau proses melakukan kegiatan untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama, untuk menjalankan kebijakan, guna meraih tujuan yang diinginkan.

Menurut Dye dalam (Suwitri, dkk, 2016 :1.7) berpendapat bahwa dalam proses kebijakan publik ada tiga kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu :

1. Kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal, kepada publik menjadi sasaran (*Target Group*).
2. Kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*Large Group*).
3. Kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa, kepada publik yang menjadi sasaran (*Large Group*).

Mengacu dari pendapat Dye diatas, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan, yang telah dibuatnya agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai, kaitannya dengan penerapan kebijakan tersebut, maka pemerintah daerah dengan segala kewenangannya harus mampu membangun kesadaran.

Teori dipergunakan untuk mempermudah kita dalam menjalankan suatu konsep, menjelaskan hubungan antar elemen, memutuskan suatu kesimpulan dan lain-lain. Banyak teori mengenai implementasi kebijakan, akan tetapi menurut Nugroho (2015:50) bahwa dalam teori-teori implementasi kebijakan tidak ada teori implementasi kebijakan yang terbaik.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005 : 99) terdapat lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : 1. Standar dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya, 3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas , 4. Karakteristik agen pelaksana dan 5. Kondisi sosial ekonomi dan politik.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2005 : 93) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) masing-masing variabel tersebut masih dipecah lagi menjadi beberapa aitem. Variabel isi kebijakan ini mencakup (1). Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan. (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. (4) apakah letak sebuah program sudah tepat. (5) apakah sebuah kebijakan sudah menyebutkan implementornya dengan rinci. (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup : (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Selanjutnya Grindle (1980 : 1) menyatakan bahwa : Implementasi Kebijakan publik sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari satu kebijakan.

Grindle (1980 : 11) dalam Agustino (2016 : 142) menjelaskan model yang ide dasarnya bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Grindle, yang diilhami hasil penelitian para ilmuwan sosial politik, pada beberapa kasus kebijakan banyak terjadi di negara dunia ketiga

seperti Asia, Afrika maupun Amerika Latin, tampak lebih menarik dan fokus terhadap konflik dalam pembuatan kebijakan yang kerap terjadi. Pertanyaan yang muncul terkait dengan implementasi kebijakan berkisar pada konflik pembuatan keputusan; “siapa mendapat apa (who get what)”.

Pandangan implementasi sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada level program khusus, serta keberhasilan atau kegagalan dapat dievaluasi terkait dengan kapasitas untuk menyampaikan program. Jadi, seluruh implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan mengukur hasil-hasil program terhadap tujuan-tujuan kebijakan.

Bahwa proses umum implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan-tujuan dan ide-ide umum telah dikhususkan, ketika program-program tindakan telah didisain dan ketika dana telah dialokasikan untuk pelaksanaan tujuan tersebut. Hal ini menjadi kondisi dasar yang jelas untuk implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini secara teori, proses formulasi kebijakan pun telah dilakukan oleh proses implementasi kebijakan dan program-program dijalankan.

Konsekuensinya, perbedaan antara formulasi dan implementasi sulit ditemukan dalam prakteknya, karena respon dari prosedur implementasi mengarah pada modifikasi dalam tujuan-tujuan arah kebijakan atau tuntutan bahwa aturan dan pedoman yang telah diterapkan dan akan diterapkan lagi memunculkan sejumlah pembuatan kebijakan penting dalam implementasi. Hal penting dalam proses implementasi adalah bahwa keputusan yang dibuat pada tahap desain atau formulasi memiliki dampak penting pada bagaimana implementasinya.

Selain itu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis ide yang telah dikhususkan dan oleh cara-cara dimana tujuan-tujuan tersebut dimulai. Jadi, keputusan formulasi yang dibuat atau tidak dibuat tentang tipe kebijakan yang dilakukan, dan bentuk program-program yang dijalankan merupakan faktor integral dalam menentukan seberapa sukses program dijalankan.

Analisa implementasi dari program menunjukkan penilaian kapasitas kekuatan para pelaku, kepentingan strategi mereka untuk mencapainya dan karakteristik rezim terkait. Hal ini membantu penilaian potensi untuk pencapaian tujuan kebijakan dan program. Dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut, pejabat menghadapi masalah lokal yang memunculkan interaksi lingkungan program dan administrasi program.

Pertama, pejabat harus mengenali masalah tentang bagaimana mencapai kesesuaian dengan tujuan akhir yang ditetapkan dalam kebijakan. Misalnya, mereka harus mendapat dukungan elit politik dan kebutuhan agensi pelaksana dari birokrat yang bertugas melaksanakan program tersebut, dari elit politik level bawah dan manfaat tertentu.

Kedua, adalah memastikan jumlah respon yang sesuai dalam memberikan fleksibilitas, dukungan dan timbal balik bersamaan dengan pengelolaan distribusi sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi sulit dicapai dan memerlukan ketajaman politik dalam kalkulasi respon yang dapat diberikan pelaku-pelaku yang terlibat dan kapasitasnya yang membahayakan tujuan program. Agar efektif, implementor harus terampil dalam

seni prinsip politik dan memahami dengan baik lingkungan dimana mereka melaksanakan kebijakan dan program publik.

Menurut Nugroho (2015 : 232) Implementasi kebijakan adalah isu yang paling kritis untuk negara-negara berkembang. Implementasi kebijakan berperan sampai 60 % dari keberhasilan kebijakan. Ada tiga alasan yang dikenali dalam kebijakan. *Pertama*, alasan dalam perumusan. Kebijakan mungkin menjadi terlalu sulit untuk diimplementasikan karena dirumuskan dengan tidak jelas atau ragu-ragu, sehingga pengimplementasi kebijakan tidak mampu untuk melaksanakannya. *Kedua*, alasan karena adanya kontrol yang lemah dalam implementasi kebijakan, sehingga terjadi bias, baik disengaja maupun tidak disengaja atau terjadi penyalahgunaan. *Ketiga*, adalah tentang pemerintahan, atau entitas politik; bahwa legislatif mungkin memiliki agenda politik yang berbeda dengan eksekutif; oleh karena itu, mereka cenderung melakukan sabotase kebijakan yang disiapkan oleh eksekutif.

Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:143) mengungkapkan keberhasilan implementasi Kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

1. Tingkat Kepatuhan

Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program)

2. Kelancaran Rutinitas Fungsi

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.

3. Mewujudkan kinerja dan dampak yang diinginkan

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.

Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan. Implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang memuaskan semua pihak, terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan (tangkilisan, 2003 : 21).

Faktor-faktor kegagalan /menghambat Implementasi Kebijakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor :

a. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

b. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan, atau ketidaktegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu

sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

c. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat buruk bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakaan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang (Tangkilisan, 2003 :22).

Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle serta Mize dalam Agustino (2016 : 136) , menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi , ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu memadai, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposisi), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan :

1. Komunikasi : berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang

harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh tiga indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan.

2. Ketersediaan sumber daya : berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu :

- a) Sumberdaya manusia merupakan merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang, meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik, dari latar belakang pengalaman, keahlian, ketrampilan, dan hubungan personal.
- b) Informasi : merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas, sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
- c) Kewenangan : Hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

- d) Sarana dan prasarana : merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan , sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja, di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
- e) Pendanaan : membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan , dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para implementor tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- b. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (disposition) : Berhubungan dengan ketersediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah, sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.
- c. Struktur birokrasi : berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan,

memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasional.

Model Merilee S. Grindle (1980) dalam Agustino (2016 :142 -144) Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Grindle, menuturkan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *contexts of Implimentation* (kontek implementasinya). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi :

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*)
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*)
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*)
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*)
5. Para pelaksana program (*program implementators*)
6. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources commited*)

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud :

- a) Kekuasaan (*power*)
- b) Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*)
- c) Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*)
- d) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*)

Contexts of Implementation (Konteks Implementasi)

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapa baik dan mudahnya kebijakan dan seberapa dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap tergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana, untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.

2. Karakteristik Lembaga dan penguasa

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian

konflik mengenai siapa mendapatkan apa (misalnya pengusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi Implementasi.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Yang dimaksud agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Kemudian pada variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Selanjutnya yang dimaksud disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yakni:

- a) Tanggapan, implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan,
- c) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh pengambil kebijakan.

Selanjutnya menurut Agustino (2016 : 156 -162) menyatakan bahwa , implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, jika subjek kebijakan tidak memakai cara yang ditentukan oleh

kebijakan, atau subjek kebijakan berhenti mengerjakan apa yang ditentukan. Ada beberapa hal yang mengakibatkan suatu implementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak efektif yaitu :

1. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan Pemerintah.
2. Kesadaran untuk menerima kebijakan
3. Ada atau tidaknya sanksi Hukum
4. Kepentingan pribadi atau kelompok
5. Bertentangan dengan sistem nilai yang ada
6. Wujudnya Kepatuhan Selektif
7. Waktu
8. Sosialisasi
9. Koordinasi Antar lembaga atau Organisasi.

Menurut Hogwood dan Gunn (1984) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015 ; 14 -17) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah :

- a. Ada hambatan kondisi eksternal. Kegagalan implementasi bukan karena lemahnya kebijakan, namun bisa jadi karena faktor diluar organisasi seperti terjadinya krisis moneter, bencana alam.
- b. Waktu dan sumberdaya tidak tersedia secara memadai. Hambatan waktu dan sumberdaya merupakan masalah yang klasik. Implementasi akan gagal ketika tidak tersedia sumberdaya yang memadai. Namun demikian, persoalannya, sumberdaya bukan sesuatu yang berlimpah sehingga suatu kebijakan harus berkompetisi dengan kebijakan lain untuk mendapatkan kecukupan sumberdaya tersebut. Konsekuensinya yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak pernah akan terwujud.

- c. Kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikiran yang kuat tentang hubungan sebab-akibat antara kebijakan dan hasil yang ingin dicapai.
- d. Hubungan sebab-akibat antara kebijakan dan hasilnya bersifat langsung. Seringkali terjadi suatu kebijakan akan menimbulkan dampak dalam waktu yang lama atau terjadi *time lag* sehingga implementasi kebijakan tidak akan secara cepat dapat diketahui keberhasilannya.
- e. Lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri. Mereka sangat tergantung pada aktor lain. Fakta yang ada menunjukkan bahwa prasyarat bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah adanya dukungan semua sumberdaya yang dibutuhkan, baik itu sumberdaya finansial, teknologi, politik, informasi, sumberdaya manusia yang berkualitas dan lain-lain.
- f. Jarang ada kesepakatan yang bersifat umum diantara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Implementasi suatu kebijakan sangat jarang dilakukan oleh aktor atau lembaga tunggal.
- g. Jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Koordinasi dan komunikasi merupakan dua hal yang mudah diucapkan akan tetapi paling sulit untuk dilakukan.

Definisi Implementasi Kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian kami adalah kombinasi antara Implementasi kebijakan model Van Metter dan van Horn, model Edward III dan model kebijakan publik grindle (1980) dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* melalui pendekatan *bottom up* (berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh masyarakat) yang mengedepankan empat masalah yang paling penting yang dapat

mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu unsur komunikasi, sumberdaya, disposisi dan karakteristik agen pelaksana.

B. Penelitian Terdahulu

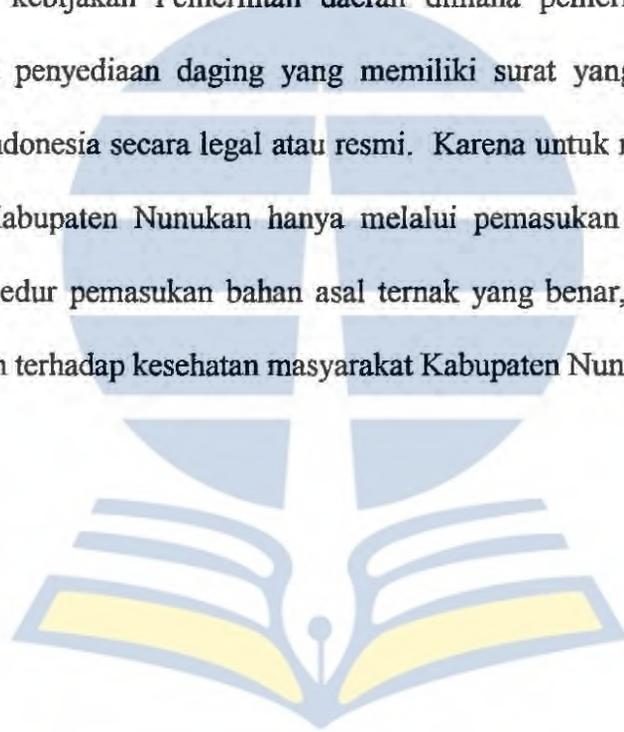
Tabel 2.1. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori	Metode Penelitian	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6
1.	Resti Prastika Destiarni	Analisis Permintaan Daging Sapi Import Indonesia	Permintaan Marshallian dan Utiliti	Analisis Regresi berganda	-keragaan produksi daging sapi di Indonesia, jumlah sapi Berdasarkan meningkat sebesar 3,05 persen pertahunnya. -Berdasarkan hasil analisis permintaan, Australia memiliki pangsa pasar terbesar di pasar daging import Indonesia. Diikuti oleh Selandia Baru, dan yang terakhir adalah Amerika Serikat. -Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya upaya perbaikan sistem agribisnis komoditas daging sapi di Indonesia. Dan pemerintah dapat melakukan diversifikasi konsumsi daging sapi dengan daging ayam dan lainnya.
2.	Satrio Bimantoro	Pengaruh Kondisi Hygiene Pemerah dan Sanitasi Kandang terhadap jumlah cemaran mikroba pada susu Sapi di Peternakan MojoSongo Boyolali		-Survei Analitik -Simple Random Sampling	-Bahwa tidak terdapat pengaruh antara kondisi Hygiene pemerah dan Sanitasi Kandang terhadap cemaran mikroba pada susu di Peternakan sapi Perah Mojosongo Boyolali
3.	Alisa Ardiyati	Penawaran Daging Sapi di Indonesia (Analisis Proyeksi Swasembada Daging Sapi 2014)	Penawaran Pindyck & Rubinfeld, 1995	-Regresi linear berganda -Ordinary Least Square (OLS)	-faktor yang menentukan tingkat produksi daging sapi dalam negeri adalah populasi ternak, jumlah feedloter, dan harga daging sapi itu sendiri. -Hasil dari proyeksi menunjukkan bahwa swasembada daging sapi thn

4.	Hadini.H Adzulyano	Analisis permintaan serta prediksi konsumsi dan produksi daging broiler di kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	Permintaan Marshalian	Deskriptif analisis	2014 tdk dapat tercapai -Peningkatan harga daging broiler, minyak goreng dan beras dapat menurunkan permintaan daging broiler. -Elastisitas pendapatan masyarakat kota Kendari bernilai positif dan kurang dari satu, menunjukkan bahwa daging broiler termasuk barang superior yang merupakan barang kebutuhan pokok. -Daging broiler merupakan barang substitusi bagi daging sapi dan ikan bandeng, minyak goreng dan beras termasuk brg komplementer. Perkembangan konsumsi daging broiler cenderung mengalami peningkatan, seiring dgn bertambahnya waktu dan jumlah penduduk
5.	Elya	Implementasi Kebijakan KTP-EL pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulungan (2016)	Teori Edward III	Deskriptif Kualitatif	-komunikasi antar aparatur yang belum efektif -sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan terutama pada prasarana dan sarana pendukung -Sikap pelaksana yang kurang respon dalam mendukung terwujudnya program KTP-EL -Struktur Birokrasi yang ada belum efektif.lebih cenderung kaya struktur namun miskin fungsi
6.	Renny yayuk A.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (2016)	Teori Van Meter dan van Horn	Deskriptif kualitatif	-Implementasi kebijakan pemerintah Kota lubuk linggau terhadap peraturan daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang pajak daerah mengenai pelaksanaan pemungutan pajak Hotel tersebut efektif untuk diterapkan.
7.	Sudarmin	Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan kepegawaian (SAPK) di BKDD Kab. Nunukan (2016)	Teori Edward III	Deskriptif Kualitatif	-Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Kebijakan SAPK belum berjalan Optimal dan faktor yang menghambat Implementasi adalah Sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang mendukung (jaringan internet yang masih lambat)

Manfaat yang dapat diambil dari beberapa penelitian terdahulu adalah dimana penelitian terdahulu membahas tentang ketersediaan sapi import dari luar negeri yang memiliki kualitas yang baik. Dan daging ayam potong sebagai substitusi atau pangan pengganti daging sapi yang mungkin mahal atau sulit didapat di pasar.

Sementara penelitian kami membahas tentang penerapan/implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang membahas kebijakan Pemerintah daerah dimana pemerintah dituntut untuk mengadakan penyediaan daging yang memiliki surat yang resmi atau masuk kewilayah Indonesia secara legal atau resmi. Karena untuk memenuhi kebutuhan daging di Kabupaten Nunukan hanya melalui pemasukan daging beku secara melalui prosedur pemasukan bahan asal ternak yang benar, guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Nunukan.



D.Operasional Konsep

1. Fenomena Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Study Kebijakan Ketersediaan Pangan asal Hewan di Nunukan)

dipengaruhi oleh faktor - faktor :

- a. **Populasi Ternak**

Kumpulan ternak yang sejenis atau satu spesies yang hidup pada cakupan dalam area tertentu yang memiliki kemampuan untuk bereproduksi antar sesama.

- b. **Distribusi Pasokan Daging**

Sistem pengaturan yang berkaitan dengan aliran produk dari aliran keuangan dan aliran informasi dalam proses distribusi sapi potong dan ayam potong hidup menjadi daging sapi atau daging ayam

- c. **Kebutuhan dan Ketersediaan Daging di Nunukan**

Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Ketersediaan adalah kesiapan suatu sarana untuk dapat digunakan dalam waktu yang telah ditentukan.

2. Variabel-variabel yang mempengaruhi suatu implementasi atau faktor peng hambat terdapat empat variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan . Sesuai dengan pendapat Van Metter dan Van Horn, Teori Grindle dan Teori Edward III , yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (isi kebijakan) dari suatu pihak kepada pihak lain.

b. Sumberdaya

Sumberdaya diposisikan sebagai input dalam organisasi. Secara ekonomis sumberdaya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan dalam organisasi yaitu sumberdaya manusia dan finansial

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap pelaksana kebijakan. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

d. Karakteristik Pelaksana

Ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Daging di Nunukan

a. Alternatif Sumber Ketersediaan Daging di Nunukan

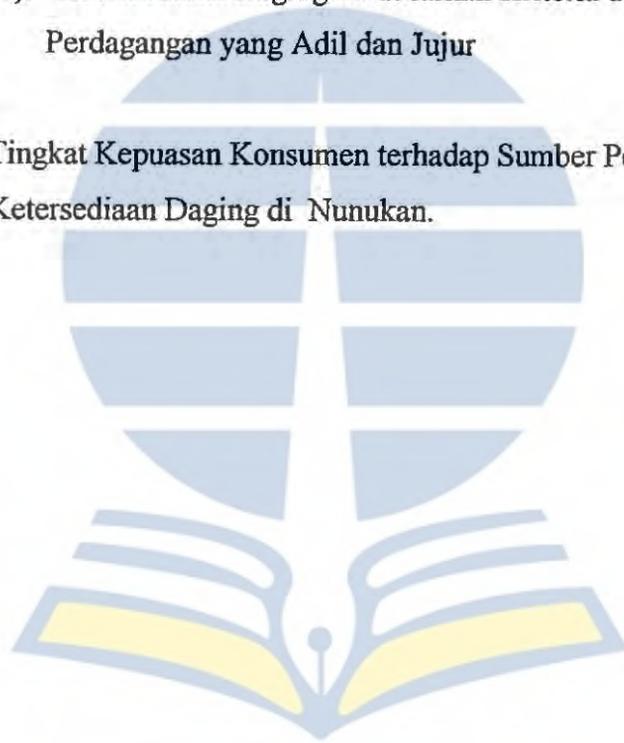
Pilihan yang terbaik dalam ketersediaan daging di Nunukan yaitu :

- 1). Pemotongan sapi di Nunukan
- 2). Pemasukan daging dari daerah lain di Indonesia
- 3). Daging Beku dari Indonesia
- 4). Daging Beku dari Malaysia

b. Penilaian Terhadap Kriteria Pertimbangan dalam Mengonsumsi Daging, yaitu :

- 1). Ketersediaan daging berdasarkan kriteria kemudahan dalam mendapat
- 2). Ketersediaan daging berdasarkan keterjangkauan harga
- 3). Ketersediaan Daging Berdasarkan Kontinuitas Pasokan Daging
- 4). Ketersediaan Daging berdasarkan Jaminan Kualitas
- 5). Ketersediaan Daging berdasarkan Kriteria daging berasal dari Perdagangan yang Adil dan Jujur

c. Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Sumber Pemenuhan Ketersediaan Daging di Nunukan.



BAB. III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yakni sebuah desain yang memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan sebuah organisasi sebagaimana adanya dalam suatu kurun waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian.

Metode penelitian kualitatif, menjadi pilihan karena penelitian kualitatif lebih memahami fenomena sosial, melalui gambaran temuan di lapangan yang meliputi pengumpulan data, analisis data serta di akhiri dengan kesimpulan yang di dasarkan pada penganalisaan data tersebut.

Berikut pendapat yang menyatakan tentang deskriptif kualitatif, menurut Nawawi (2005 ; 63) merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Dengan demikian pendekatan/metode deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengumpulkan, merangkum serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh yang selanjutnya diolah kembali untuk mendapatkan gambaran secara jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah objek penelitian.

Dalam penelitian ini Peneliti bermaksud untuk mengkaji kondisi-kondisi yang ada khusus dalam segi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Studi Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah memberikan penjelasan terbaik terhadap permasalahan masyarakat Nunukan akan terpenuhinya kebutuhan pangan asal hewan yang berkualitas (aman, sehat, utuh dan halal), sampai sejauh mana Implementasi atau Penerapan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 telah dilaksanakan dengan sub fokus adalah :

- a. Populasi Ternak
- b. Distribusi Pasokan Daging
- c. Kebutuhan dan Ketersediaan Daging di Kabupaten Nunukan

, dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dari Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi
- d. Karakteristik Pelaksana

serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan ketersediaan pangan asal hewan di Nunukan meliputi :

a. Alternatif Sumber Ketersediaan Daging di Nunukan

Pilihan yang terbaik dalam ketersediaan daging di Nunukan yaitu :

- 1). Pemotongan sapi di Nunukan
- 2). Pemasukan daging dari daerah lain di Indonesia
- 3). Daging Beku dari Indonesia
- 4). Daging Beku dari Malaysia

b. Penilaian Terhadap Kriteria Pertimbangan dalam Mengonsumsi Daging, yaitu :

- 1). Ketersediaan daging berdasarkan kriteria kemudahan dalam mendapat
- 2). Ketersediaan daging berdasarkan keterjangkauan harga
- 3). Ketersediaan Daging Berdasarkan Kontinuitas Pasokan Daging
- 4). Ketersediaan Daging berdasarkan Jaminan Kualitas
- 5). Ketersediaan Daging berdasarkan Kriteria daging berasal dari Perdagangan yang Adil dan Jujur

c. Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Sumber Pemenuhan Ketersediaan Daging di Nunukan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan. Penelitian ini hanya dilakukan di dua kecamatan karena posisi Kabupaten Nunukan adalah daerah perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia , dan banyak wilayah Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga seperti Kecamatan Sebatik Utara dan Sebatik Timur, Kecamatan Lumbis Ogong dan Kecamatan Krayan sehingga

Implementasi Perda No 03 Tahun 2012 berbeda pelaksanaan di tiap Kecamatan di Kabupaten Nunukan.

D. Instrumen Penelitian

Sebagai Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, dalam hal ini yang terpenting adalah kesiapan dari penulis dalam melakukan pengumpulan data yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Akan tetapi guna mendukung pengumpulan data, maka dalam penelitian ini instrument yang digunakan disamping unsur manusianya juga didukung dengan instrumen lainnya itu buku-buku catatan , alat tulis, dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (kuisisioner).

Tahapan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pendapat Moleong (2007 : 127-148) yang memiliki empat tahapan penelitian , yaitu sebagai berikut :

1. Tahap sebelum ke lapangan, peneliti mempersiapkan perlengkapan/ peralatan seperti surat izin penelitian, alat perekam dan kamera, melakukan penjajakan lapangan untuk menentukan subjek sebagai nara sumber dan menyusun rancangan penelitian yang digunakan.
2. Tahap pekerjaan lapangan, kegiatan yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan informan, dokumentasi dan observasi dalam rangka terhimpunnya data atau informasi yang dibutuhkan.
3. Tahap Analisis data, data-data atau informasi yang diperoleh kemudian diolah atau dianalisis berdasarkan proses analisis data kualitatif kemudian dinarasikan sesuai dengan masalah penelitian.

4. Tahap penulisan laporan, pada tahapan ini penulis melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait dengan hasil penelitian untuk diperoleh saran/pertimbangan demi perbaikan-perbaikan dalam penyajian hasil.

E. Sumber Informasi

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif kualitatif maka tidak memakai sampel penelitian melainkan narasumber/informan kunci. Sumber informasi terdiri :

1. Sumber Informasi Primer.

Sumber informasi primer adalah sumber informasi dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan kunci guna untuk mendapatkan informasi tentang keadaan usaha peternakan di Nunukan saat ini , populasi ternak di Nunukan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan) dan kondisi pasar di Kabupaten Nunukan (Dinas Perdagangan Kab. Nunukan) , dan kondisi pelaku usaha (pedagang dan usaha penggilingan daging, rumah makan), serta Peternak di Nunukan terkait kemampuan peternak dalam memelihara ternak. Narasumber yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan berasal dari instansi sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- b. Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Nunukan
- c. Asosiasi Pedagang Daging Indonesia
- d. Pedagang Daging Beku
- e. Penggilingan daging

- f. Penjual makanan (Pelaku Usaha)
- g. Peternak

2. Sumber Informasi Sekunder

Sumber informasi sekunder adalah sumber informasi yang berasal dari studi dokumentasi, bahan studi dokumentasi adalah semua bahan yang dapat memperjelas fokus penelitian, yaitu :

Pengumpulan data harus memiliki kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh dari dinas terkait dengan program peternakan (peningkatan produksi ternak) dan faktor-faktor yang menentukan ketersediaan daging di Kabupaten Nunukan.

Tabel 3.1. Data dan Sumber data Informasi Sekunder

No	Data	Sumber Data
1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	BPS Nunukan
2	Pertambahan Jumlah Penduduk	Bappeda Nunukan
4	Populasi Ternak	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nunukan
5	Pemasukan Ternak	Kantor Karantina Pertanian Tarakan Wilayah Kerja Nunukan
6	Data Ketersediaan Pangan asal Hewan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan
7	Data Konsumsi Pangan Hewani	Susenas

F. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis mencari data, informasi mengenai ketentuan-ketentuan aturan yang bisa dijadikan dasar

pijakan untuk menanggapi masalah yang akan dikaji, maka untuk memperoleh data/informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Daftar Angket

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa angket, angket memuat butir-butir pertanyaan yang memuat pengantar dan petunjuk pengisian dan pokok-pokok pertanyaan. Daftar pertanyaan bertujuan untuk mengetahui keputusan-keputusan yang ada di level masyarakat, dengan pendekatan *bottom up* yaitu pendekatan yang berpangkal dari masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi. Pertanyaan terdiri dari beberapa variabel yang terkait dengan keadaan di masyarakat saat ini.

- a. Alternatif Ketersediaan Sumber daging di Kabupaten Nunukan
 - Pemotongan sapi di Nunukan
 - Pemasukan daging dari daerah lain di Indonesia
 - Daging Beku dari Indonesia
 - Daging Beku dari Malaysia

- b. Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memenuhi daging adalah :
 - Kemudahan dalam mendapatkannya
 - Harga yang terjangkau
 - Pasokan yang Kontinyue
 - Jaminan Kualitas
 - Berasal dari perdagangan yang jujur dan adil

- Untuk mengurangi ketergantungan dari luar

2. Wawancara

Kegiatan wawancara dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam yaitu dengan cara, menggali data/informasi langsung dari sumbernya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat luwes, terbuka, tidak terstruktur dan tidak baku dalam wawancara ini apabila masih dianggap perlu, maka peneliti akan melakukan wawancara kembali secara langsung antara peneliti dan subjek penelitian tergantung kepada apa yang menjadi kebutuhan penulis, sehingga diharapkan betul-betul didapat data/informasi yang sangat membantu penulis untuk memperkaya bahan informasi dalam rangka memahami, pandangan subjek peneliti mengenai hidupnya, pengalamannya, atau situasi sosial subjek penelitian sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri (Taylor dan Bogdan, 1984).

3. Dokumentasi

Merupakan cara kedua bagi penulis dalam mengumpulkan bahan penelitian yang diperoleh melalui informasi dari macam-macam sumber tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, internet yang tentunya memiliki kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan peneliti yang dilakukan dengan dokumen yang ada pada responden.

4. Observasi

Pengumpulan data menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan dan mengadakan wawancara yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke

objek penelitian. Penelitian dilaksanakan dari bulan Juli -September 2017 yaitu di Kecamatan Nunukan di Kabupaten Nunukan, untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan responden , maka penulis akan melakukan pengamatan langsung melalui wawancara dan dokumentasi, sekaligus untuk menggali beberapa fenomena yang timbul dilapangan.

Tabel 3.2. Jadwal Penelitian di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Bulan Juli dan Agustus Tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		Juli				Agustus				November			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II		
1	Kunjungan Ke Peternak	■	■										
2	KunjunganKePasar Tradisional		■	■	■								
3	Kunjungan Kepelaku Usaha				■	■							
4	Wawancara ke Narasumber					■	■	■	■				
8	Ujian Sidang												■

G. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan, disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif kemudian dinarasikan sesuai dengan masalah penelitian. Proses analisis data ini dilakukan selama proses penulisan tesis, mulai dari pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi kemudian mencermati hasil data yang ada ke dalam bentuk narasi atau laporan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan metode interaktif dari Miles dan Huberman. Dalam model jenis ini

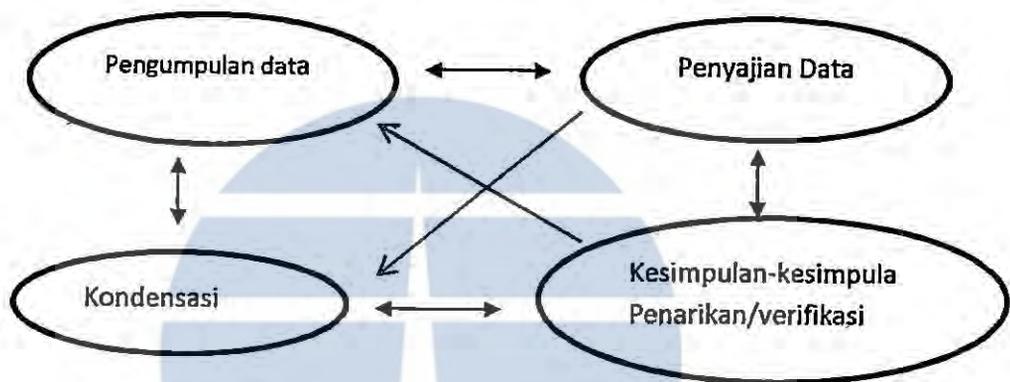
terdapat tiga komponen analisis, yaitu kondensasi data, sajian data, penarikan kesimpulan (Miles, Huberman dan Saldana 2014 :14)

Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan (secara interaktif) ketiga komponen utama tersebut:

1. Kondensasi data sebagai proses pemilihan tema-tema yang relevan, dipusatkan pada simplikasi, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan artinya data yang ada dilakukan pemilahan dan disederhanakan . Proses pemilahan itu sendiri dilakukan melalui penajaman, penggolongan, pembuangan (data yang tidak diperlukan) agar memberikan kemudahan dalam menampilkan , menyajikan dan menarik kesimpulan sementara.
2. Penyajian data, dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, utuh dan integratif yang digunakan sebagai pijakan kepada peneliti untuk melakukan pembahasan berikutnya, apakah peneliti sudah dapat menarik kesimpulan dari data yang ada atautkah peneliti masih perlu melakukan penelusuran kembali sebelum menarik kesimpulan. Dalam menyajikan data ini didasarkan pada sekumpulan informasi dan teks naratif dari hasil wawancara, didukung oleh dokumen yang terdiri dari berbagai macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada responden. Sedangkan penyajian data ini dimaksudkan untuk mengkombinasikan berbagai data yang diperoleh dalam suatu bentuk laporan yang terpadu. Sehingga memudahkan dalam mengamati apa yang sedang terjadi, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara benar dan tepat.

3. Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju kepada kesimpulan akhir yang isinya secara menyeluruh dan berisi rekomendasi dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian tersebut. Adapun proses analisis interaktif dimaksud dapat disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut ;

Diagram 1. Data Model Interaktif yang dimaksud sebagai berikut :



Gambar : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.

Sumber : Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014 : 14)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Nunukan merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 dan Nomor 7 Tahun 2000. Dimana Kabupaten Bulungan merupakan wilayah induk/asal dari tiga kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Malinau, Kota Tarakan dan Tanah Tidung. Kabupaten Nunukan bersama empat kabupaten/kota lainnya saat ini telah menjadi satu wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi termuda saat ini. Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara sebagai hasil dari pemekaran Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan lewat rapat paripurna DPR RI pada tanggal 25 Oktober 2012. Pemekaran ini dilakukan untuk memperpendek rentang kendali pada bagian utara wilayah dari Pemerintah Kalimantan Timur yang begitu luas yang mencapai 1,5 kali luas pulau Jawa.

Wilayah Kabupaten Nunukan terletak paling Utara di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dimana terdapat dua negara bagian Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Nunukan yaitu Sabah di bagian Timur dan Serawak di bagian Barat. Wilayah Kabupaten Nunukan memiliki panjang sekitar 780 Km yang membentang dari Timur ke Barat sedangkan dari Utara ke Selatan sepanjang 350 Km dengan luas wilayah 14.263,68 Km² atau 7,06% dari luas Kalimantan Timur. Secara geografi Kabupaten Nunukan terletak pada 115⁰33' - 118⁰03' BT dan 3⁰15' - 4⁰24' LU.

Luas wilayah Kabupaten Nunukan menyimpan begitu banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun juga mempunyai permasalahan yang tidak ringan yang harus diatasi apalagi berada diperbatasan negara dengan panjang garis perbatasan langsung dengan Negara tetangga sepanjang 520.724,43 km. Batas-batas wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

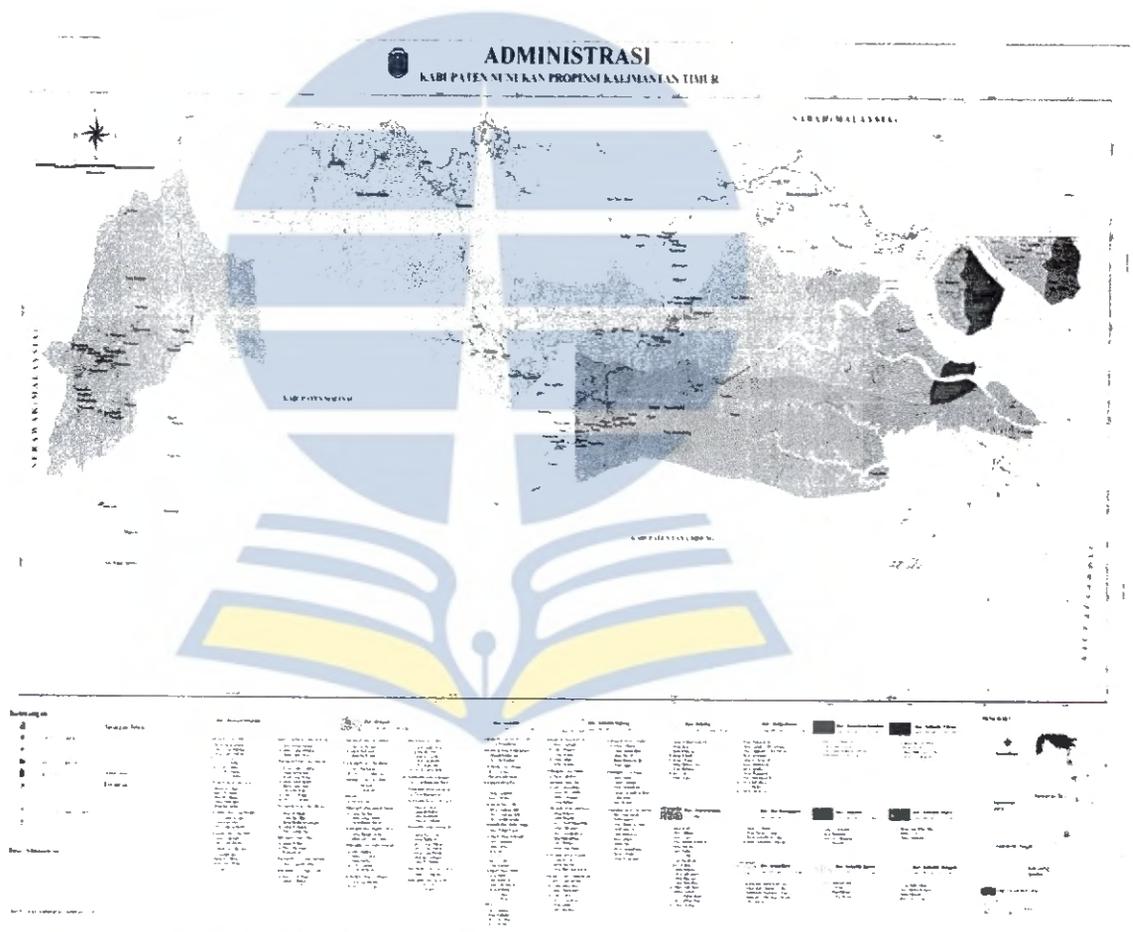
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia).

Sejak Tahun 2015 secara Administratif Wilayah Kabupaten Nunukan terbagi dalam 19 wilayah kecamatan yang sebelumnya hanya 9 kecamatan, dimana 13 kecamatan diantaranya merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia (Sabah dan Serawak). Sedangkan jumlah desa/kelurahan mencapai 232 desa/kelurahan. Wilayah Kabupaten Nunukan terdiri atas pulau-pulau dan daratan Kalimantan.

Pada wilayah Pulau Nunukan, terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Sedangkan kecamatan yang berada pada Pulau Sebatik terdapat beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara. Wilayah Nunukan yang berada di daratan Kalimantan terdiri dari daerah dataran rendah di sebelah Timur, meliputi Kecamatan Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai, Tulin Onsoi, Lumbis dan Lumbis Ogong serta di sebelah Barat yang merupakan daerah dataran

tinggi mencakup Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Krayan Timur, dan Krayan Barat dan Krayan Tengah. Kecamatan yang terletak di daerah dataran tinggi sampai saat ini masih dalam keadaan terisolasi dibanding dengan kecamatan lain dengan akses yang dapat ditempuh kesana hanya bisa menggunakan pesawat udara. Berikut ini peta administrasi Kabupaten Nunukan.

Gambar 4.1.
Peta Administrasi Kabupaten Nunukan



Sumber : Bappeda Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Nunukan per Kecamatan tahun 2016

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
Krayan Selatan	1.757,66 km ²
Krayan	1.834,74 km ²
Lumbis Ogong	3.357,01 km ²
Lumbis	290,23 km ²
Sembakung Atulai	1.042,66 km ²
Sembakung	1.000,00 km ²
Sebuku	1.608,48 km ²
Tulin Onsoi	1.513,36 km ²
Sei Menggaris	850,48 km ²
Nunukan	564,50 km ²
Nunukan Sel	181,77 km ²
Sebatik Barat	93,27 km ²
Sebatik	51,07 km ²
Sebatik Timur	39,17 km ²
Sebatik Tengah	47,71 km ²
Sebatik Utara	15,39 km ²
Total wil Kab. Nunukan	14.247,50 km ²

Sumber : Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nunukan , 2016

Kabupaten Nunukan terdiri dari tiga pulau yaitu pulau Nunukan dengan kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan , pulau Sebatik yang terdiri dari lima kecamatan yaitu kecamatan Sebatik barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Timur , Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Induk atau Sebatik. Sementara yang paling mencolok adalah kecamatan sebatik timur dan Utara ada yang langsung berbatasan dengan Negara tetangga Malaysia, sehingga yang membuat kita tentu berfikir bagaimana cara melakukan pengawasan antar kedua Negara tersebut, apakah masih berlaku adanya Regulasi atau Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah ini. Dimana keluar masuknya produk ternak harus memiliki surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi. Tentunya hal ini akan berbeda dan agak sulit diterapkan sebagaimana mestinya. Sehingga

Implementasi Perda Tahun 2012 Nomor 03 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak dapat berjalan secara normal, demikian pula dengan wilayah Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, dimana hampir semua produk ternak seperti daging ayam potong didatangkan dari Negara tetangga yaitu Lawas Malaysia. Oleh sebab itu penelitian ini hanya sebatas wilayah Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan. Karena hampir sebagian besar wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia kita belum melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana mestinya.

2. Kondisi Demografis

Penduduk

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari peran serta penduduknya sebagai subjek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan pembangunan jika kuantitas dibarengi dengan kualitas yang tinggi pula. Namun demikian jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan masalah jika penyebarannya tidak merata.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk berdasarkan data BPS, pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Nunukan sebanyak 177.607 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 11,93 jiwa/km² dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 4,51%. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, kemudian terbukanya lapangan kerja diberbagai sektor khususnya perkebunan kepala sawit serta sektor jasa.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin tahun 2014 - 2015

Kecamatan	2014		2015	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Krayan Sltm	1.097	982	1.075	970
Krayan	3.670	3.153	3.609	3.126
L. Ogong	2.665	2.544	2.667	2.568
Lumbis	2.570	2.331	2.573	2.353
S. Atulai	1.421	1.301	1.325	1.268
Sembakung	3.052	2.792	3.180	2.889
Sebuku	6.260	5.164	6.570	5.467
Tulin Onsoi	4.327	3.187	4.541	3.376
S.Menggaris	4.857	3.854	5.094	4.079
Nunukan	31.39	27.827	32.72	29.43
Nunukan Sltm	10.20	8.510	11.14	9.378
Sebatik Brt	4.077	3.530	4.183	3.654
Sebatik	2.430	2.080	2.493	2.153
Sebatik Timur	6.224	5.932	6.387	6.137
Sebatik Tenga	3.776	3.345	3.876	3.461
Sebatik Utara	2.796	2.687	2.869	2.779
Jumlah	90.82	79.218	94.51	83.09

Sumber data : BPS, Nunukan dalam Angka 2017

Penyebaran penduduk Kabupaten Nunukan menurut kecamatan terpusat di Kecamatan Nunukan sebanyak 47.056 jiwa (59,80 %) diikuti dengan Nunukan Selatan sebanyak 10.453 jiwa (33,09%). Hal ini menarik untuk diamati karena konsentrasi penduduk hanya terpusat di Pulau Nunukan dan Pualu Sebatik mencapai 67,52% dari total penduduk Kabupaten Nunukan sehingga memicu kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan daerah lainnya. Gambaran ini menunjukkan ketidak merataan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Pertanian merupakan sektor primer yang mendominasi aktivitas perekonomian di Kabupaten Nunukan. Dilihat dari struktur perekonomian Kabupaten Nunukan, sektor pertanian menyumbang andil 20%. Pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan

peternakan selalu diupayakan untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Tabel 4.3. Distribusi PDRB Kab. Nunukan Menurut Lapangan Usaha (%)

Sektor PDRB	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehut, Perikan	19,51	17,76	18,06	18,56	20,30	21,68	23,81
Pertambangan dan Penggalian	45,77	51,43	52,15	52,72	51,35	47,59	44,37
Industri Pengolahan	10,09	8,73	8,29	7,86	7,68	8,25	8,20
Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Konstruksi	8,68	7,36	7,32	6,94	6,51	6,81	7,3
Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil, Sepeda Motor	5,67	5,40	5,17	5,02	4,76	5,23	5,58
Transportasi dan Pergudangan	1,98	1,85	1,80	1,89	1,90	2,13	2,14
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,08	1,02	0,97	0,92	0,87	0,96	1,01
Informasi dan Komunikasi	1,89	1,68	1,60	1,56	1,49	1,63	1,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,36	0,32	0,33	0,34	0,32	0,35	0,37
Real Estate	0,68	0,58	0,54	0,52	0,47	0,49	0,50
Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Administrasi Pemerintah Pertahanan dan Jaminan Sosia	2,65	2,36	2,21	2,09	2,7	2,93	2,97
Jasa Pendidikan	1,04	1,01	1,08	1,2	1,22	1,42	1,52
Jasa Kesehatan dan Keg Sosial	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
Jasa Lainnya	0,46	0,39	0,35	0,33	0,32	0,40	0,45

Sumber data : BPS Kabupaten Nunukan Tahun 2016

Pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Nunukan mencapai 4,660 triliun (dengan migas) dengan pertumbuhan ekonomi 4,5% (tanpa migas). Struktur perekonomian Kabupaten Nunukan masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 51,34% (Rp 2,392 triliun), diikuti sektor pertanian 20% (Rp 1,043 triliun) dan jasa 9,29% (357,11 milyar) pada sektor pertanian PDRB masih didominasi sub sektor perkebunan Rp 442,6 milyar (42,41%), tanaman bahan makanan Rp 247,9 milyar (23,75%) dan kehutanan Rp 151,7 milyar (14,54%).

3. Karakteristik Responden

Tabel 4.4 dibawah ini menjelaskan tingkat pengembalian angket yang disebar untuk mengumpulkan data penelitian, angket dibagikan kepada warga Nunukan secara acak. Dari 40 daftar angket yang disebar, dan yang kembali 38 angket sedangkan 2 angket tidak diterima kembali oleh peneliti tanpa ada alasan dari orang yang bersangkutan.

Tabel 4.4. Ikhtisar distribusi dan pengembalian angket

No	Keterangan	Jumlah Kuisisioner	Persentase
1.	Angket yang disebar	40	100 %
2.	Angket yang kembali	38	95 %
3.	Angket yang tidak Kembali	2	5 %

Sumber : Hasil angket responden tahun 2017

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 38 responden telah mengembalikan lembar angket yaitu sebanyak 95 %, jumlah tersebut dianggap cukup untuk mewakili untuk diteliti dan dianalisis. Karakteristik responden yang menjawab dan mengembalikan angket dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, usia dan pekerjaan seperti yang tercantum pada tabel-tabel berikut ini.

Jumlah responden terbanyak adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 22 orang (57 %) dan responden perempuan adalah 16 orang (42%) . Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak karena berhubungan dengan profesi yang berhubungan dengan perdagangan daging, penyediaan dan pengolahan daging.

Tabel 4.5 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

No	Keterangan	SMP	SMA	Sarjana	Pascasarjana
1.	Pendidikan	3	13	19	3
	Jumlah	38			

Sumber data : Hasil angket responden tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan jumlah responden terbanyak adalah responden dengan status pendidikan sarjana dan pascasarjana berjumlah 22 orang dan diikuti oleh SMA sebanyak 13 orang dan SMP sebanyak 3 orang. Responden dengan pendidikan tinggi yaitu sarjana dan pascasarjana menurut peneliti lebih rasional dalam menjawab lembar angket, hal ini terkait oleh semakin tinggi pendidikan responden maka daya cerna dan sikap untuk mengambil keputusan dapat hampir akurat, dibandingkan dengan berpendidikan rendah yang rata-rata pada penelitian kami ada 3 orang yang berpendidikan SMP terkait dengan profesi mereka adalah peternak. Dan para pelaku usaha di Nunukan rata-rata pada masyarakat pada level tingkat menengah (SMA) dan pengambil keputusan adalah tingkat pejabat yang menduduki pendidikan yang rata-rata Sarjana dan Pascasarjana.

Tabel 4.6. Karakteristik responden berdasarkan usia

No	Keterangan	21-30 thn	31-40 thn	41-50 thn	51-60 thn
1.	Usia	4	15	11	8
	Jumlah	38			

Sumber data : Hasil angket responden tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan usia menyatakan bahwa responden yang memiliki usia 21-30 tahun berjumlah 4 orang, 31 – 40 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 15 orang dan diikuti oleh usia antara 41-50 tahun sebanyak 11 orang dan 8 orang diatas 51 tahun . Melihat hal tersebut bahwa usia responden cukup beragam dan sudah mewakili untuk sampel penelitian. Mengapa tingkat usia sangat menentukan hal ini dilihat pada segi tingkat pemikiran terhadap orang yang cukup dewasa untuk mengambil keputusan, semakin dewasa seseorang maka akan semakin teliti dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Tabel 4.7. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

No	Keterangan	IRT	PNS	Swasta	Wiraswasta
1.	Pekerjaan	5	16	6	11
	Jumlah	38			

Sumber data : Hasil angket responden tahun 2017

Tabel 4.7. menunjukkan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dimana unsur PNS berjumlah 16 orang atau sebesar 42 %, diikuti oleh wiraswasta 11 orang atau 28 %, dan swasta 6 orang atau 15% dan ibu rumah tangga 5 orang atau 13 %. Dan yang paling mempengaruhi dalam mengambil keputusan adalah berdasarkan pekerjaan seseorang, dimana responden yang terkait langsung dengan

Implementasi Perda Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan.

Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Study tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan)

Implementasi Perda No. 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai otoritas, untuk merealisasikan isi dari kebijakan ketersediaan pangan asal hewan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan selaku sasaran, dalam rangka menciptakan serta mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang aman, sehat, utuh dan halal.

a. Populasi Ternak

Terkait sumber daya ternak peneliti melakukan study dokumentasi terhadap Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan tahun 2012 - 2016 bahwa populasi ternak berjumlah 8.632 ekor untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8. Populasi Ternak di Kabupaten Nunukan Tahun 2016

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sapi Potong	7.102	8.847	8.266	8.150	8.632
2.	Kerbau	2.830	3.242	3.473	3.332	3.663
3.	Kambing	2.010	2.529	2.964	2.342	2.430
4.	Domba	-	44	66	187	189
5.	Babi	3.491	3.845	4.660	4.349	4.106
6.	Ayam buras	73.003	78.300	60.784	69.643	65.036

7.	Ayam ras petelur	9.500	9.000	25.100	25.100	-
8.	Ayam ras Pedaging	73.700	330.250	96.928	128.300	330.200
9.	Itik	13.553	13.688	13.721	12.490	12.453
10.	Ayam Nunukan	3.307	604	150	150	150

Sumber : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan Tahun 2016

Jumlah populasi ternak terbesar di Kabupaten Nunukan tahun 2015 – 2016 didominasi oleh ternak sapi sejumlah 8.632 ekor, ternak kerbau sebesar 3.663, ternak kambing 2.430 ekor, ternak babi 4.106 ekor. Untuk ternak unggas yaitu peternakan ayam potong sejumlah 330.200 ekor, yang banyak diusahakan di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Dan populasi ayam buras tercatat sebanyak 65.036 ekor yang tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.9. Tingkat Pertumbuhan Populasi Ternak Sapi di Kabupaten Nunukan

No	Tahun	Jumlah	Tingkat Pertumbuhan (%)
1.	2011	6.285	0
2.	2012	7.102	12,99
3.	2013	8.847	24,57
4.	2014	8.266	- 6,5
5.	2015	8.150	- 1,4
6.	2016	8.632	5,9

Sumber data : Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kab. Nunukan 2016

Melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012 -2016 menyatakan bahwa :

“Perkembangan ternak yang sangat minim terjadi pada tahun 2012 – 2016 karena pertama tingkat pemotongan yang tinggi dan penjualan ternak di masyarakat sangat besar, kedua data yang tidak akurat, ketiga sumber daya manusia peternakan yang masih sangat sedikit untuk mengurus 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan sehingga pengawasan ternak belum optimal, dan adanya pos cek point ternak yang belum berfungsi dengan benar.”

Sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh Kepala Seksi Kesehatan

Hewan yang menyatakan bahwa :

“ Untuk Kabupaten Nunukan penurunan populasi ternak bukan karena suatu keadaan penyakit hewan yang mematikan, penurunan populasi di Nunukan disebabkan oleh proses pemotongan dan penjualan ternak di Masyarakat.”

Tabel 4. 10. Populasi Sapi di Kabupaten Nunukan tahun 2011-2016 untuk per Kecamatan

NO.	KECAMATAN	Sapi Potong					
		2016	2015	2014	2013	2012	2011
1	NUNUKAN	1.278	1.242	1.177	1.000	899	1.251
		36	65	177	101	-352	
2	SEIMENGGARIS	724	637	618	929	906	-
		87	19	-311	23	906	
3	NUNUKAN SELATAN	1.610	1.498	1.565	1.543	847	830
		112	-67	22	696	17	
4	SEBATIK	843	771	673	750	846	1.598
		72	98	-77	-96	-752	
5	SEBATIK TIMUR	666	551	529	767	623	-
		115	22	-238	144	623	
6	SEBATIK UTARA	351	327	303	262	183	-
		24	24	41	79	183	
					-	-	-
7	SEBATIK BARAT	997	1.052	1.228	1.079	995	1.280
		-55	-176	149	84	-285	
					-	-	-
8	SEBATIK TENGAH	439	430	425	587	121	-
		9	5	-162	466	121	
					-	-	-
9	SEMBAKUNG	407	398	368	599	492	335
		9	30	-231	107	157	
					-	-	-
10	SEMBAKUNG ATULA	4	4				
		0	4	0	0	0	
					-	-	-
11	LUMBIS	199	199	217	178	172	213
		0	-18	39	6	-41	
					-	-	-
12	LUMBIS OGONG	51	64	98	49	38	-
		-13	-34	49	11	38	
					-	-	-
13	SEBUKU	379	321	308	283	206	651
		58	13	25	77	-445	
					-	-	-

14	TULIN ONSOI	583	551	652	714	664	-
		32	-101	-62	50	664	
					-	-	-
15	KRAYAN	101	105	105	107	107	124
		-4	0	-2	0	-17	
					-	-	-
16	KRAYAN SELATAN	-	-	-	-	3	3
		0	0	0	-3	0	
	Jumlah	8.632	8.150	8.266	8.847	7.102	6.285

Sumber Data : Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan Tahun 2011 – 2016

Masyarakat Nunukan kurang memiliki minat untuk berinvestasi pada pengembangan ternak sapi, tetapi minat terhadap sapi bantuan pemerintah cukup besar, namun setelah sapi bantuan diserahkan ternyata kemampuan mengembangkan sangat terbatas. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari seorang PPL peternakan yaitu :

“ Peternakan di Kabupaten Nunukan sangat sulit berkembang hal ini dari sikap petani peternak sapi masih memiliki komitmen yang lemah, ketika diseleksi untuk calon penerima sapi pemerintah, dengan sistem perguliran mereka sangat antusias ingin memiliki dan memelihara, serta didukung sarana lahan yang luas, namun ketika sapi telah diberikan satu bulan sapi masih aktif diberi makan, setelah dua bulan sapi mulai dibawa ke ladang dan diikat, namun setelah tiga bulan sapi mulai tidak terurus bahkan cenderung kurus dan sering tidak dikandangkan dan diikat sepanjang hari di pepohonan. Hal ini sering terjadi karena kesibukan petani akan mencari penghasilan lainnya, selain beternak mereka juga biasanya adalah petani padi sawah, namun bisa beralih menjadi petani rumput laut. Ketidakpastian usaha petani tersebut membuat perlakuan terhadap usaha pengembangan sapi semakin terbatas.”

Berdasarkan hasil dari study dokumentasi dan wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan populasi ternak di Kabupaten Nunukan masih belum optimal. Penurunan populasi bukan sebab penyakit ternak namun karena proses pemotongan dan penjualan ternak di masyarakat.

a. Distribusi Pasokan Daging

Distribusi sapi potong di Kabupaten Nunukan saat ini berasal dari pemasukkan ternak luar daerah yaitu dari pulau Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dengan jumlah 318 pada tahun 2016 hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 11. Pemasukan Ternak di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 – 2016

No	Jenis Ternak	Pemasukan					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sapi Potong	407	396	1058	702	397	318
2.	Kerbau	1	20	149	27	-	-
3.	Kambing	643	742	1213	815	894	868

Sumber data : Badan Karantina kelas II Tarakan, Kab. Nunukan Tahun 2011 -2016

Selanjutnya dari tabel pemasukkan ternak hewan qurban dapat terlihat distribusi pasokan daging di Kabupaten Nunukan

Tabel 4.12. Data Pematangan Hewan Qurban di Kabupaten Nunukan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah			Ket.asal ternak
		Sapi	Kerbau	Kambing	
1.	Nunukan Selatan	40	-	12	Lokal
2.	Nunukan	195	-	30	64 (pare-pare)
3.	Lumbis	10	-	2	Lokal
4.	Tulin onsoi	18	-	4	Lokal
5.	Sembakung	13	-	11	Lokal
6.	Seimenggaris	30	-	-	Lokal
7.	Sebatik timur	40	-	-	Lokal
8.	Sebatik utara	24	-	4	Lokal
9.	Sebatik barat	30	-	4	Lokal
10.	Krayan	5	1	-	Lokal
	Jumlah	405	1	67	

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan 2017

Senada dengan hasil wawancara dengan Kasi Perbibitan dan Budidaya Ternak Provinsi Kaltara yang menyatakan bahwa :

“Swasembada ternak sapi masih sangat jauh, namun kemampuan Kab. Nunukan dalam pengembangan ternak sapi masih cukup baik bila dibandingkan dengan Kab. Lain di Prov. Kaltara ini. Dengan jumlah populasi kurang lebih 8000 ekor dan pematangan pertahun 250- 300 ekor sapi untuk acara Idul adha maka ternak sapi Nunukanlah yang banyak

dipotong. Demikian pula dengan penjualan dan pengeluaran ternak ke Kab. lain di Prov. Kaltara secara rutin terdeteksi banyak mengalir ke Kab. Malinau, Kota tarakan.

Kemudian distribusi pasokan daging ayam potong berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2014 -2017 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13. Data Pemasukan Produk Ternak di Kecamatan Nunukan 2014-2017

No	Produk	Jumlah (kg)				Daerah asal
		2014	2015	2016	2017 (jan-Agust)	
1.	Daging Ayam	279.920	233.515	129.080	41.460	Sulawesi
2.	Telur	146.500	797.400	581.400	279.171	Sulawesi

Sumber Data : Badan Karantina Kelas II Tarakan 2014 -2017.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa :

“Dalam penyediaan pangan asal hewan dinas memiliki strategi utama yang bisa dijadikan bahan acuan, pemenuhan berdasarkan pemotongan dalam daerah untuk daging ayam kita sudah swasembada namun untuk daging sapi kita masih memasukkan dari Tarakan secara resmi oleh eks Bulog, dan masyarakat harus kita utamakan jaminan kualitasnya tentang daging yang ASUH”.

Selanjutnya menurut Kasi Perbibitan dan Budidaya Provinsi Kaltara menyatakan bahwa :

“Dalam penyediaan pangan asal hewan dinas berusaha mengembangkan populasi ternak sapi sebanyak mungkin guna menyediakan pangan asal ternak terutama daging sapi yang sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi saat ini pemerintah masih sangat jauh dalam swasembada ternak sapi. Sehingga jalan yang terbaik adalah memasukan daging beku Allana asal India secara resmi atau legal.”

Selanjutnya menurut Peternak dan Pedagang ayam pedaging (mambunut dalam) :

“ Rata-rata rumah makan mengambil daging ayam dari Malaysia karena harga perkilonya Rp 35.000,- sementara daging lokal seharga Rp 38.000,- .

Setelah kami turunkan daging kami menjadi Rp 35.000,- daging Malaysia masuk dengan harga Rp 30.000,-. Sunggu kami sangat sedih, mengapa daging ayam dari Malaysia selalu masuk sehingga hasil peternakan kami tidak ada yang membelinya.

Dan keterangan ini dikuatkan dengan pernyataan dari peternak ayam potong (peternak pemula) yaitu :

“ peternak butuh perhatian dari pemerintah daerah. Karena sejak bulan Agustus setelah Idul Fitri kami beternak ayam cukup banyak, namun karena pasar lagi lesu, maka sampai sekarang ayam mereka belum laku terjual. Sehingga mereka menginginkan agar ayam yang masuk dari Tawau harus dihentikan. “

Tabel 4.14. Pemasukan Daging Sapi/Kerbau di Kabupaten Nunukan Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Pemasukan daging Ilegal dari Malaysia (kg)	Jumlah Pemasukan dari Jakarta(kg)	Kebutuhan daging Perbulan (kg)
1.	Maret	7.500	-	7.500
2.	April	8.000	-	8.000
3.	Mei	6.200	1.400	8.000
4.	Juni	7.200	800	8.000
5.	Juli	8.000	-	8.000
6.	Agustus	8.000	-	8.000
	Jumlah	44.900	2.200	47.100

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan Tahun 2017

Terkait dengan sumber pasokan daging maka pedagang daging juga sebagai ketua asosiasi pedagang daging Indonesia cabang Nunukan menyatakan bahwa :

“Kebutuhan daging sapi kita berasal daging kerbau merk Allana dari India yang masuk dari Malaysia ke Nunukan secara ilegal, sementara daging legal yang masuk dari Jakarta ke Tarakan masih sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh pemasok dari Nunukan belum tersedia, dan masih diproses secara bertahap. Sehingga kebutuhan daging masih dipenuhi oleh daging ilegal asal Malaysia.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pasokan daging atau ternak sapi untuk pemotongan hewan qurban Kabupaten Nunukan sudah dapat menyediakannya sendiri namun untuk sapi bibit masih mendatangkan dari

Sulawesi, walaupun harga jual sapi saat qurban cukup tinggi. Sementara untuk daging ayam potong di Nunukan telah mencapai swasembada daging ayam potong.

b. Kebutuhan Konsumsi dan Ketersediaan Daging di Nunukan

Angka kebutuhan konsumsi biasanya menggunakan angka tetap yang diperoleh secara nasional, tingkat kebutuhan konsumsi daging ayam potong maupun daging sapi di Nunukan dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini :

Tabel 4.15 Rata-rata Kebutuhan Daging Per tahun di Nunukan

No	P. Nunukan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan perkapita per tahun (kg)	Total Kebutuhan Perthn (kg)
1	Daging ayam	44.514	9	400.626
2	Daging sapi	44.514	2,9	129.090

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan Tahun 2017

Selanjutnya data ketersediaan daging ayam ras per tahun di beberapa kecamatan Nunukan di Kabupaten Nunukan yang terbagi dalam empat zona wilayah yaitu zona satu untuk pulau Nunukan , zona dua pulau Sebatik, zona tiga wilayah di pulau Kalimantan yaitu Sebuku dan sekitarnya dan zona empat adalah wilayah Krayan dan Krayan Selatan dapat terlihat pada tabel diatas tersebut.

Tabel 4.16. Ketersediaan Daging ayam potong per tahun di Kabupaten Nunukan

No	Kec. / Pulau	Jumlah Populasi Ayam pedaging (ekor)	Berat Bdn per ekor hidup (kg)	Berat Karkas per ekor (kg)	Total Produksi karkas (kg)
1.	P. Nunukan	603.567	2	1,7	1.026.064
2.	P. Sebatik	9.600	2	1,7	16.320
3.	P.Sebuku, embakung, Lumbis, S. Menggaris	150.000	2	1,7	255.000
4.	Kec.Krayan,Krayan Selatan	-	-	-	-
	Total				1.297.384

Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan Tahun 2017

Dari Tabel 4.16 diatas untuk ketersediaan daging ayam potong pertahun di pulau Nunukan dibutuhkan ketersediaan adalah 1.026.064 kg. Sehingga untuk total ketersediaan di Kabupaten Nunukan adalah 1.297.384 kg pertahun.

Tabel 4.17. Ketersediaan daging sapi potong di Kabupaten Nunukan

No	Kec. / Pulau	Jumlah Populasi Sapi potong	Berat Bdn per ekor hidup (kg)	Berat Karkas per ekor (kg)	Total Produksi karkas (kg)
1	P. Nunukan	789	200	114	89.946
2	P. Sebatik	659	200	114	75.126
3	P.Sebuku, sembakung, Lumbis, S. Menggaris	340	200	114	28.760
4	Kec.Krayan,Krayan Selatan	12	200	114	1.368
	Total	1.800	200	114	205.200*

Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan tahun 2016

Berdasarkan perhitungan ketersediaan daging sapi potong di Nunukan pada tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa pulau Nunukan memiliki ketersediaan 89.946 kg dari melihat jumlah populasi temak sapi saat ini.

Tabel 4.18

Kebutuhan dan Ketersediaan daging Sapi dan ayam potong di Pulau Nunukan

No	Jenis Produk	Kebutuhan Kg/ thn	Ketersediaan (kg)	Kekurangan/ Kelebihan (kg)	Asal daerah Pemasukan
1.	Daging Sapi segar	129.090	5.472	123.618	Sulawesi
2	Daging beku	123.618	3.500	120.118	Malaysia, Jakarta
3.	Daging Ayam Potong	400.626	1.026.064	625.438	Lokal Nunukan

Sumber data: Karantina Hewan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan 2016

Berdasarkan Tabel 4.18 diperoleh hasil perhitungan antara kebutuhan dan ketersediaan daging sapi adalah untuk daging sapi segar Nunukan masih kekurangan 123.618 kg pertahun sementara untuk kebutuhan daging ayam Nunukan adalah 400.626 ,ketersediaan mencapai 1.026.064, sehingga diperoleh kelebihan daging ayam 625.438 kg. Hal ini meneunjukkan bahwa di Nunukan telah swasembada daging ayam. Kelebihan daging ayam banyak dibawa ke kecamatan lain seperti ke Sebuku, Sembakung dan Lumbis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Nunukan menyatakan bahwa:

“ Untuk kebutuhan daging sapi kita masih menghandalkan daging dari luar misalnya daging beku dari Jakarta, yang masuk secara resmi. Sementara untuk daging ayam potong di Nunukan sendiri telah swasembada daging, dimana kebutuhan daging ayam dapat terpenuhi bahkan saat ini sangat berlebihan.”

Hal senada juga dipaparkan oleh kasi Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu :

“ Daging yang beredar dipasar di Nunukan sebagian besar adalah daging dari luar yaitu daging beku Allana, entah daging beku dari Jakarta atau dari Malaysia, yang mengetahui secara pasti adalah pedagang daging atau kios daging tersebut. Karena daging segar masih memiliki harga jual yang cukup tinggi yaitu Rp 130.000,- perkilo nya. Sementara daging beku memiliki nilai jual hanya Rp 80.000 – 85.000 perkilo.”

Hal senada juga diutarakan oleh Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan yang menyatakan bahwa :

“ Perdagangan daging saat ini masih aman, artinya tidak ada masalah. Namun masih ada beberapa produk yang masuk secara ilegal ke wilayah Nunukan, namun itu bukan wewenang kami, itu wilayah kerja Bea Cukai sehingga barang dari sebelah dapat masuk.”

Dari hasil perhitungan kebutuhan dan ketersediaan daging serta hasil wawancara dengan pejabat terkait, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Nunukan masih mengandalkan daging beku dari Jakarta namun kenyataan bahwa daging ilegal asal Malaysia masih beredar untuk memenuhi ketersediaan daging sapi di Nunukan, dan untuk daging ayam potong Nunukan telah swasembada bahkan sangat berlebihan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Studi Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan) belum bisa dilaksanakan secara optimal disebabkan oleh populasi ternak sapi yang masih terbatas, sementara untuk daging ayam Nunukan telah swasembada daging ayam namun, dibutuhkan pengawasan yang lebih baik guna menghambat masuknya daging ayam dari negara Tetangga Malaysia.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Study tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan Di Nunukan)

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi pelaksanaan atau penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu tentang Kebijakan penyediaan produk pangan asal hewan di Nunukan. Dalam penelitian ini peneliti tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian akhir (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan. Variabel - variabel yang

mempengaruhi implementasi kebijakan sesuai dengan pendapat Van Metter dan Van Horn, teori Grindle dan teori Edward III yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya dapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi menurut Edward III dalam Winarno (2014 : 156-158), yaitu :

- a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau ambigu/mendua.
- c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau maka dapat membingungkan bagi pelaksana di lapangan.

Terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam pelaksanaan tugas fungsi dalam hal penyediaan pangan asal hewan yang baik, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa :

“Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam hal komunikasi tentang kurangnya pengetahuan tentang penyediaan pangan asal hewan yang masih menjadi kendala, misalnya kemampuan Kabupaten Nunukan dalam menyiapkan dan menyediakan daging yang dibutuhkan masyarakat, memang dinas Pertanian bidang Peternakan yang harus menyiapkan namun hal ini terkendala oleh swasembada ternak yang gagal pada tahun 2014 yang telah dicanangkan sebelumnya. Oleh sebab itu maka, keputusan untuk melakukan import daging beku asal India menjadi solusi untuk menutupi kekurangan tersebut, namun hal ini disikapi hal yang kurang tepat oleh beberapa pihak, karena import daging akan menurunkan motivasi peternak sapi lokal, sehingga nilai jual ternak akan semakin rendah.”

Hal senada juga disampaikan kepala Seksi Kesehatan Hewan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan , menyatakan bahwa :

“ Kendala masalah komunikasi dengan pihak terkait, memang selalu ada hal ini menunjukkan bahwa semua pihak turut merespon akan keberadaan daging ilegal asal Tawau Malaysia yang telah lama dinikmati oleh warga Nunukan, hal ini memang harus diluruskan secara perlahan, kemampuan pemerintah dalam menyiapkan daging segar memang masih minim, namun secara perlahan kita sudah mengambil sikap dengan cara memasukan daging beku secara legal atau resmi, sehingga terjaga keamanan dan keutuhan, kehalalan dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Bagi pihak yang diuntungkan

dengan adanya daging beku asal Malaysia, maka mereka akan ada respon yang negatif, namun hal ini perlu adanya komunikasi dari dua belah pihak, pedagang daging, masyarakat dan dinas terkait seperti dinas perdagangan dan kesehatan Kabupaten Nunukan, turut serta memberikan advis dan mengangkat hal ini secara transparan dan fleksibel, dalam arti hubungan yang saling menguntungkan, terutama kesehatan masyarakat Nunukan harus terjamin.

Selanjutnya menurut Kepala Seksi pembibitan dan Budidaya Ternak Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, terkait dengan hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan instansi dengan masyarakat terutama pedagang daging, menyatakan bahwa :

“Hambatan yang ditemui dalam hal komunikasi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan proses dan tugas pemerintah yang harus melindungi masyarakat terkait penyediaan pangan asal hewan. Sehingga keberadaan daging Legal asal Jakarta perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat guna membeli daging yang benar-benar sehat dan terjamin kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan akan kehalalannya. Karena kita tau masyarakat di Nunukan adalah masyarakat muslim sehingga segi kehalalan adalah yang utama.”

Sedangkan menurut Kepala Seksi pembibitan dan Budidaya Ternak bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Nunukan, terkait dengan hambatan dan kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan dan staf dalam proses pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi ternak guna menunjang swasembada ternak dan mencapai pemenuhan daging sapi dan ayam yang segar dan berkualitas bagi masyarakat, menyatakan bahwa :

“ Kalau dari pihak seksi pembibitan dan budidaya ternak yang paling terpenting dalam masalah komunikasi adalah sangat penting dimana semua kegiatan saat ini harus memiliki komunikasi yang intens mengenai perkembangan ternak di Kecamatan yang membutuhkan tenaga trampil dan cekatan dalam hal peternakan, maupun dalam mengirimkan data ternak setelah melakukan inseminasi buatan pada ternak sapi dan selanjutnya harus dilihat atau diperiksa tingkat keberhasilan berupa kebuntingan pada ternak tersebut, setelah itu dilaporkan hasilnya secara intens, dan yang menjadi kendala adalah sarana dan prasarana dalam bekerja, misalnya faktor kondisi wilayah yang cukup luas, sementara petugas yang sangat terbatas membuat kita harus bekerja sama dan saling mendukung. Tapi saat ini yang paling menyenangkan adalah dengan adanya fasilitas komunikasi yang murah dan cepat lewat HP, secara SMS,

atau WA amat sangat membantu dalam pekerjaan kami. Demikian pula terhadap peternak yang membutuhkan petugas ketika ingin mengawinkan sapi atau perawatan terhadap ternaknya yang sakit, hanya dengan pelayanan HP, maka petugas akan siap melayani, baik siang, malam kami selalu siap siaga.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan atau kendala yang ditemui dalam hal komunikasi antara pimpinan, staf ataupun pada masyarakat dalam pelaksanaan penyediaan pangan asal hewan, dan peningkatan populasi ternak maupun dalam pendataan ternak, untuk mensukseskan program swasembada ternak lewat Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) ini maka masing-masing seksi memiliki hambatan dan kendala namun saat ini semua bidang di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih bisa ditolerir, hanya komunikasi dengan masyarakat sebagai pedagang atau pelaku usaha peternakan dan konsumen daging beku yang masih belum optimal. Karena adanya daging beku asal Jakarta dan daging beku asal Malaysia memiliki fisik yang sama.

b. Sumberdaya

Menurut Edward III dalam Agustino (2016 : 158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah terdiri dari :

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*Street-level-bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan , salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Informasi. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu : pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

- Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Disatu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
 - d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hal Senada diutarakan oleh Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Nunukan menyatakan bahwa :

“SDM bidang Peternakan masih terbatas jumlahnya, apalagi harus melayani 19 Kecamatan yang ada, sehingga tenaga honor digalakkan untuk mengikuti pelatihan dibidang Peternakan seperti mengikuti Khursus IB, PKB dan ATR. Kualitas SDM Peternakan memang masih sangat kurang mengingat luasnya wilayah Kabupaten Nunukan ini, sehingga dari segi jumlah dan kualitas memang masih perlu ditingkatkan. Untuk ke depannya DPKP bidang Peternakan harus meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas Peternakan untuk selalu disiapkan sebagai tenaga Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan dan ATR. Dan memang kebutuhan akan dokter hewan masih sangat diperlukan dimana dokter hewan yang ada saat ini hanya satu orang.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan, terkait dengan SDM yaitu jumlah pegawai dan SDA yaitu ternak, lahan dan peternak yang merupakan aset dari peternakan itu sendiri yang berimbas pada perkembangan ternak dan peningkatan populasi ternak secara intensif sehingga penyediaan pangan asal

ternak semakin tercapai untuk menuju swasembada ternak dan daging, menyatakan bahwa :

“Dalam penyediaan pangan asal hewan untuk daging ayam potong Kabupaten Nunukan sudah swasembada, namun untuk daging sapi dinas memiliki strategi utama yang bisa dijadikan bahan acuan, pemenuhan berdasarkan pemotongan dalam daerah tetapi skenario tidak dapat diandalkan karena populasi ternak sangat terbatas, apalagi pemotongan dilakukan setiap hari. Skenario yang kedua pemotongan dalam daerah menghandalkan ternak dari luar daerah, kendalanya membutuhkan anggaran yang cukup tinggi untuk mendatangkan ternak ke Kab. Nunukan. Sehingga ketersediaan masih mengandalkan daging beku yang terjamin kualitasnya. Untuk itu dengan masuknya daging beku legal tersebut kita jauh lebih terjamin kualitasnya, dan keamanan pangan dapat tercapai, kewaspadaan kehalalan dan keutuhan serta kesehatan masyarakat dapat terjamin.

Sama halnya dengan dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan , Kepala Seksi Perbibitan Provinsi Kaltara juga menyatakan bahwa :

“Dalam proses swasembada ternak tahun 2026 mendatang, maka dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi saat ini memiliki program pengembangan ternak dengan cara Inseminasi Buatan dan Asuransi Ternak, sehingga selain IB juga perlu perkawinan alam, karena sistem beternak masyarakat Nunukan adalah dengan cara ekstensif yaitu ternak dibiasakan mencari makan sendiri dilepas dipadang penggembalaan yang luas, sehingga agak susah untuk dilakukan perkawinan secara Inseminasi Buatan, tetapi program Upsus Siwab adalah fleksibel yaitu meningkatkan angka kebuntingan ternak dan peningkatan populasi dengan kebuntingan Inseminasi buatan maupun kawin alam semua adalah untuk meningkatkan populasi ternak sapi atau kerbau. Dan perlindungan terhadap sapi /kerbau betina produktif dengan mendaftarkan sebagai peserta Asuransi Ternak.

Senada dengan pendapat diatas, kepala Seksi Kesehatan Ternak di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan , terkait dengan sumber daya ternak dan peternak di Kabupaten Nunukan menyatakan , bahwa :

“Keberadaan ternak di Kabupaten Nunukan belum dapat dikatakan bahwa kita belum mampu berswasembada ternak/daging, hal ini berkaitan dengan anggaran setiap tahunnya untuk bidang Peternakan masih sangat sedikit,

sehingga untuk mencapai swasembada kita masih sangat jauh, namun kita berusaha mengembangkan ternak yang ada, pencegahan penyakit ternak perlu diwaspadai. Sehingga program unggulan yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan populasi ternak dengan Inseminasi Buatan dan kawin alam, asuransi ternak serta perlindungan terhadap pengurasan dan pemotongan sapi/kerbau betina produktif harus tetap dijaga, dan program pendistribusian ternak kepada masyarakat masih tetap dilakukan untuk setiap tahunnya namun jumlahnya sangat terbatas, hal ini imbas dari anggaran yang masih sangat minim. Sehingga untuk penyediaan pangan asal hewan yaitu daging sapi masih didatangkan dari luar berupa daging beku Allana dari India yang telah didatangkan dari Jakarta lewat Tarakan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sumber daya ternak yang telah berkembang di Kabupaten Nunukan sebagai aset atau sumber daya yang menentukan tingkat perkembangan peternakan di Kabupaten Nunukan, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini peternakan di Kabupaten Nunukan masih sangat butuh tenaga SDM dan demikian pula dengan sumberdaya ternak dan sumberdaya finansial.

c. Disposisi

Edward III dalam Winarno (2012:142-143), mengemukakan bahwa “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana kebijakan mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2016:139-140), mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

- a. Efek disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Karena itu pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dengan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
- c. Melakukan pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*) ; dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukkan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan terkait disposisi dan pemilihan personil atau pelaksana kebijakan haruslah berdedikasi pada kepentingan warga masyarakat, beliau menyatakan bahwa :

“Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan terkait dengan ketersediaan daging memang tugas kami yang mengadakan, namun untuk ketersediaan daging sapi kita masih sangat kurang. Namun untuk wewenang keluar masuknya daging sapi lebih dititik beratkan pada persoalan wilayah perbatasan yang banyak melibatkan pihak karantina hewan dan kantor Bea Cukai di Kabupaten Nunukan. Jadi untuk melarang keluar masuknya daging adalah wewenang pusat. Untuk memasukkan produk pangan asal hewan dari wilayah Negara Malaysia harus meminta izin dari pemerintah pusat yang di Jakarta.”

Dan berdasarkan wawancara dengan Kasi perbibitan dan Budidaya ternak Provinsi Kaltara, menyatakan bahwa :

“Kebutuhan daging sapi telah ada solusinya yaitu daging beku yang masuk secara resmi dari Jakarta. Sehingga masing-masing Kabupaten dapat berhubungan dengan pemasok daging yaitu eks-Bulog yang berkedudukan di Tarakan.”

Hal senada juga diutarakan oleh Kasi Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa :

“ Daging ilegal seharusnya tidak dapat dibiarkan masuk di wilayah Kabupaten Nunukan. Namun masih maraknya peredaran daging di pasar – pasar ataupun yang dipakai dalam pembuatan produk pangan asal hewan yaitu berupa bakso, maka kita harus selalu waspada, jangan ada unsur pembiaran dari aparaturnya terkait.”

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan para pejabat tersebut diatas bahwa kebijakan untuk memasukkan daging harus memiliki surat yang resmi, atau dilakukan secara legal. Dan ketersediaan daging beku yang resmi telah ada yaitu eks-Bulog yang berkedudukan di Tarakan.

d. Karakteristik Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan (Agustino, 2016 : 134-135)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa :

“Wewenang dalam menjaga keluarmasuknya produk daging di Kabupaten Nunukan adalah tupoksi Karantina Hewan dan Bea Cukai, bukan wewenang Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, tugas kami adalah Budidaya ternak dan pembinaan terhadap peternak.”

Sementara hasil wawancara dengan Kabid Perdagangan dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa :

“ Untuk pencegahan keluarmasuknya daging adalah tugas dari Bea dan Cukai dan Karantina Hewan seandainya mereka bertugas dengan benar maka daging ilegal tidak mungkin akan masuk. Sehingga pengawasan sebaiknya harus dilakukan jika daging beku resmi telah masuk dari Tarakan. Dan terkait masih masuknya daging ayam dari Malaysia, hal ini memang adanya faktor pembiaran dari instansi terkait atau instansi yang berwenang dalam hal ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat terkait diatas maka masuknya daging ilegal yaitu baik berupa daging sapi beku atau daging ayam segar maupun beku karena ada instansi terkait yang memang tidak bekerja secara optimal, misalnya Karantina Hewan, Kantor Bea dan Cukai serta instansi terkait yang memang belum bekerja secara baik.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Pangan asal Hewan di Nunukan

Berdasarkan hasil responden masyarakat Nunukan dalam menentukan keinginan mereka untuk mengkonsumsi daging adalah sebagai berikut.

a. Alternatif Sumber Ketersediaan Daging di Kabupaten Nunukan

Tabel 4.19. Alternatif Sumber Ketersediaan Daging di Nunukan

No	Sumber Ketersediaan Daging	Jumlah Responden	Persentase
1.	Daging Beku dari Malaysia	3	7,8
2.	Daerah lain di Indonesia	3	7,8
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	14	36,9
4.	Daging Beku dari Indonesia	18	47,4
	Jumlah	38	100

Sumber : Hasil angket responden , 2017

Berdasarkan hasil angket, persepsi responden sebagian masyarakat Nunukan menunjukkan hasil seperti pada tabel 4.19 berikut, alternatif sumber ketersediaan daging di Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa sebanyak 8,7 % responden menginginkan ketersediaan daging beku asal Malaysia dan 8,7 % responden menginginkan dari daerah lain di Indonesia , sebanyak 36,9 % responden menginginkan pemotongan sapi di Nunukan, dan 47,4 % menginginkan ketersediaan daging dipenuhi oleh daging beku dari Indonesia.

b. Penilaian Terhadap Kriteria Pertimbangan dalam Mengonsumsi Daging

Tabel 4.20. Penilaian Responden Terhadap Kriteria yang menjadi Pertimbangan dalam mengonsumsi daging

No	Faktor Pendukung	Jumlah Responden	Persentase
1.	Kemudahan mendapatkan	2	5,26
2.	Harga terjangkau	17	44,73
3.	Jaminan Kualitas	17	44,73
4.	Daging berasal dari per - dagangan yang jujur & adil	2	5,26
	Jumlah	38	100

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Pada tabel 4.20 mengenai penilaian responden terhadap kriteria yang menjadi pertimbangan dalam mengonsumsi daging adalah 5,26 % untuk kemudahan mendapatkannya dan daging berasal dari perdagangan yang jujur dan adil, dan 44,73 % responden memilih jaminan kualitas dan harga terjangkau sebagai kriteria yang menjadi pertimbangan dalam mengonsumsi daging.

1). Ketersediaan daging berdasarkan kriteria kemudahan dalam mendapatkan

Tabel 4.21. Alternatif Ketersediaan Daging Berdasarkan Kriteria Kemudahan Dalam Mendapatkan.

No	Faktor	Jumlah Responden	Persentase
1.	Daging Beku dari Malaysia	28	73,6
2.	Daerah lain di Indonesia	2	5,26
3.	Pemotongan Sapi di Nunukan	5	13,1
4.	Daging Beku dari Indonesia	3	7,8
	Jumlah	38	100

Sumber : Hasil Kuisisioner Responden , 2017

Dari tabel 4.21 yaitu alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria kemudahan dalam mendapatkan adalah 5,26 % dari daerah lain di Indonesia, 13,1 % melalui pemotongan sapi di Nunukan dan 7,8 % daging beku dari Indonesia, dan selebihnya kemudahan mendapatkan daging beku asal Malaysia mencapai 73,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran daging beku ilegal masih sangat mudah di dapatkan di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Nunukan.

2). Ketersediaan Daging Berdasarkan Keterjangkauan Harga

Tabel 4.22. Alternatif Ketersediaan Daging Berdasarkan Kriteria Keterjangkauan Harga.

No	Faktor	Jumlah Responden	Persentase
1.	Daging Beku dari Malaysia	24	63,15
2.	Daerah lain di Indonesia	0	0
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	2	5,26
4.	Daging Beku dari Indonesia	12	31,57
	Jumlah	38	100

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Dari tabel 4.22 diatas, maka alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria keterjangkauan harga yang digemari responden adalah 5,26 % melalui pemotongan sapi di Nunukan, 31,57 % menggemari daging beku dari Indonesia, dan 63,15 % menggemari daging beku asal Malaysia.

3). Ketersediaan Daging Berdasarkan Kontinuitas Pasokan Daging

Tabel 4. 23. Alternatif Ketersediaan Daging berdasarkan Kriteria Kontinuitas Pasokan daging

No	Faktor	Jumlah Responden	Persentase
1.	Daging Beku dari Malaysia	30	78,94
2.	Daerah lain di Indonesia	3	7,89
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	1	2,63
4.	Daging Beku dari Indonesia	3	7,89
	Jumlah	38	100

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Tabel 4.23 menunjukkan Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria kontinuitas pasokan daging dimana 2,63 % diperoleh dari pemotongan sapi di Nunukan, 7,89 % diperoleh dari daerah lain dan daging beku dari Indonesia, dan 78,94 % diperoleh dari daging beku dari Malaysia.

4). Ketersediaan Daging Berdasarkan Jaminan Kualitas

Tabel. 4.24. Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria jaminan kualitas

No	Faktor	Jumlah Responden	Persentase
1.	Daging Beku dari Malaysia	0	0
2.	Daerah lain di Indonesia	1	2,63
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	35	92,10
4.	Daging Beku dari Indonesia	2	5,26
	Jumlah	38	100

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Tabel 4.24 menunjukkan alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria jaminan kualitas menunjukkan bahwa 0 % daging beku dari Malaysia kurang memiliki jaminan kualitas hal ini dikarenakan faktor ilegal yang mempengaruhinya, selanjutnya 2,63% dari daerah lain di Indonesia, 5,26 % daging Beku dari Indonesia dan 92,10 % pemotongan sapi di Nunukan.

5). Ketersediaan Daging Berasal dari Perdagangan Yang Adil dan Jujur

Tabel 4.25. Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria daging berasal dari perdagangan yang adil dan jujur

No	Faktor	Jumlah Responden	Persentase
1.	Daging Beku dari Malaysia	0	0
2.	Daerah lain di Indonesia	1	2,63
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	16	42,10
4.	Daging Beku dari Indonesia	21	55,26
	Jumlah	38	100

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Tabel 4.25 menunjukkan alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria daging berasal dari perdagangan yang adil dan jujur menunjukkan bahwa 0 % untuk daging beku dari Malaysia. Dan 2,63% untuk pemasukan dari daerah lain , 42,10 % untuk pemotongan di Nunukan dan 55,26 % untuk daging beku dari Indonesia.

6). Ketersediaan daging berdasarkan kriteria mengurangi ketergantungan dari Luar

Tabel 4.26. Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria mengurangi ketergantungan dari Luar

No	Faktor-faktor	Jumlah Responden	Persentase
1.	Daging Beku dari Malaysia	0	0
2.	Daerah lain di Indonesia	8	21,05
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	7	18,42
4.	Daging Beku dari Indonesia	23	60,52
	Jumlah	38	100

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Dari Tabel 4.26 . tentang alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria mengurangi ketergantungan dari luar adalah 18,42 % melalui pemotongan sapi di Nunukan, 21,05 % dari daerah lain dan 60,52% melalui pemasukan daging beku dari Indonesia sementara daging beku dari Malaysia tidak ada yang memilih atau 0%.

Tabel 4. 27. Persentase Alternatif Terhadap Kriteria

No	Kriteria- Kriteria	Alternatif Ketersediaan Kebutuhan Daging di Kabupaten Nunukan				Jumlah
		Daging Beku dari Malaysia (%)	Dari Daerah lain (%)	Pemotongan Sapi di Nnk (%)	Daging Beku di Indonesia (%)	
1.	Kemudahan dlm mendapatkannya	73,6	5,26	13,1	7,8	100 %
2.	Keterjangkauan Harga	63,15	0	5,26	31,57	100 %
3.	Kontinyuitas Pasokan Daging	78,94	7,89	2,63	7,89	100 %
4.	Jaminan Kualitas	0	2,63	92,10	5,26	100 %
5.	Perdagangan yang Adil dan jujur	0	2,63	42,10	55,26	100 %
6.	Mengurangi Ketergantungan dari Luar	0	21,05	18,42	60,52	100 %

Sumber : Hasil angket responden 2017

Berdasarkan tabel 4.27 , alternatif atas masuknya daging beku dari Malaysia merupakan nilai tertinggi untuk kemudahan dalam mendapatkannya 73,6% , keterjangkauan harga 63,15 % dan kontinyuitas pasokan daging dengan 78,94 % . Sementara untuk Pemotongan sapi di Nunukan memiliki nilai tertinggi dalam jaminan kualitas yaitu 92,10 % , dan Daging beku dari Jakarta memiliki nilai tertinggi dalam perdagangan yang adil dan jujur yaitu 55,26 % dan untuk mengurangi ketergantungan dari luar sebesar 60,52%.

Tabel 4.28. Alternatif Sumber Ketersediaan Daging di Kabupaten Nunukan

No	Sumber Ketersediaan Daging	Jumlah Responden	Persentase
1.	Daging Beku dari Malaysia	3	7,8
2.	Daerah lain di Indonesia	3	7,8
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	14	36,9
4.	Daging Beku dari Indonesia	18	47,4
	Jumlah	38	100

Sumber : Hasil Kuisisioner Responden, 2017

Berdasarkan tabel 4.28 diatas, keyakinan responden terhadap alternatif yang bisa memenuhi ketersediaan daging di Nunukan adalah daging beku di Indonesia 47,4 %, atau mencapai 18 responden yang memilih, 36,9 % memilih pemotongan sapi di Nunukan dan 7,8 % menginginkan ketersediaan daging bersumber dari daging beku dari malaysia atau dari daerah lain di Indonesia.

c. Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Sumber pemenuhan Ketersediaan Daging di Nunukan

Tabel 4.29. Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Sumber Pemenuhan Ketersediaan Daging di Nunukan

No	Persepsi Responden	Jumlah Responden (orang)					Jumlah
		Sangat tidak memuaskan	Tidak memuaskan	Cukup memuaskan	Memuaskan	Sangat memuaskan	
1	Daging beku dari Malaysia	-	-	-	-	-	-
2	Pemasukan dr daerah lain	-	-	3	1	-	4 (10,52%)
3	Pemotongan sapi di Nunukan	-	2	3	3	2	10 (26,3%)
4	Daging Beku dari Indonesia	1	5	9	9	-	24 (63,15%)

Sumber : Hasil angket responden, 2017.

Berdasarkan kriteria sumber pemenuhan daging pada tabel 4.29 diatas sebanyak 24 orang responden atau sebesar 63,15 % responden yang menyatakan pemenuhan ketersediaan daging beku dari Indonesia, yang terdiri 9 responden merasa puas (memuaskan) , 9 orang cukup memuaskan dan 6 orang menyatakan tidak memuaskan. Dan 10 orang responden atau sebesar 26,3 % menyatakan ketersediaan daging dari pemotongan sapi di Nunukan , yang terdiri dari 2 orang menyatakan tidak memuaskan, 3 orang cukup memuaskan, 3 orang responden menyatakan memuaskan dan 2 orang menyatakan sangat memuaskan.

Tabel 4.30. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria kemudahan mendapatkan daging

No	Persepsi Responden	Jumlah Responden (orang)					Jumlah
		Sangat tdk me-muaska	Tdk me muaskan	Cukup memuas-kan	memua skan	Sangat me muaskan	
1.	Daging beku dari Malaysia	-	5	17	2	-	24
2.	Pemasukan dr daerah lain	-	1	-	-	1	2
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	-	-	1	2	1	4
4.	Daging Beku dari Indonesia	-	2	5	1	-	8

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Berdasarkan kriteria kemudahan mendapatkan daging pada tabel 4.30 menunjukkan bahwa 24 orang atau sebesar 63,15% responden menyatakan daging beku dari Malaysia sangat mudah didapatkan dengan rincian 17 orang merasa cukup memuaskan, 5 orang tidak memuaskan dan 2 orang menyatakan memuaskan. Dan 8 orang menyatakan kemudahan mendapatkan daging dari daging beku dari Indonesia, dengan rincian 5 orang cukup memuaskan, 2 orang tidak memuaskan, 1 orang memuaskan.

Tabel 4.31. Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap kriteria harga daging yang Terjangkau

No	Persepsi Responden	Jumlah Responden (orang)					Jumlah
		Sangat tidak me muaska	Tidak memua ska	Cukup memuas-Kan	Memua skan	Sangat memuas-Kan	
1.	Daging beku dari Malaysia	-	9	7	3	1	20
2.	Pemasukan dr daerah lain	-	-	-	-	-	-
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	-	1	-	-	1	2
4.	Daging Beku dari Indonesia	-	3	6	6	1	16

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Berdasarkan kriteria harga daging yang terjangkau pada tabel 4.31 untuk kriteria harga daging yang terjangkau adalah daging beku dari Malaysia mendapatkan responden yang terbesar yaitu 20 orang dengan rincian kepuasan adalah 9 orang merasa tidak memuaskan, 7 orang cukup memuaskan, 3 orang memuaskan dan 1 orang sangat memuaskan. Dan selanjutnya 16 responden menyatakan bahwa harga daging beku dari Indonesia sudah cukup terjangkau, dengan rincian 3 orang menyatakan tidak memuaskan, 6 orang menyatakan cukup memuaskan, 6 orang memuaskan dan 1 orang menyatakan sangat puas.

Tabel 4.32. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria pasokan daging yang kontinyue

No	Persepsi Responden	Jumlah Responden (orang)					Jumlah
		Sangat tidak memuaskan	Tidak memuaskan	Cukup memuaskan	Memuaskan	Sangat memuaskan	
1.	Daging beku dari Malaysia	-	6	20	1	1	28
2.	Pemasukan dr daerah lain	-	-	-	1	-	1
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	-	-	1	-	1	2
4.	Daging Beku dari Indonesia	-	2	5	-	-	7

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Tabel 4.32 menunjukkan tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria pasokan daging yang kontinyue, 28 responden dari 38 responden menyatakan daging beku dari Malaysia memiliki pasokan daging yang kontinyue, dengan rincian 20 menyatakan cukup memuaskan, 6 orang tidak memuaskan, dan 2 orang menyatakan memuaskan dan sangat memuaskan. Dan untuk daging beku asal Indonesia hanya 7 responden menyatakan cukup memuaskan 5 orang dan 2 orang menyatakan tidak memuaskan.

Tabel 4.33. Tingkat kepuasan konsumen terhadap jaminan kualitas

No	Persepsi Responden	Jumlah Responden (orang)					Jumlah
		Sangat tidak me-Muaskan	Tidak me muaskan	Cukup memua skan	Memuaska n	Sangat me muaskan	
1.	Daging beku dari Malaysia	-	-	-	-	-	-
2.	Pemasukan dr daerah lain	-	-	-	-	-	-
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	-	2	11	15	7	35
4.	Daging Beku dari Indonesia	-	-	2	1	-	3

Sumber : Hasil angket responden, 2017.

Berdasarkan tabel 4.33. Tingkat kepuasan konsumen terhadap jaminan kualitas adalah pemotongan sapi di Nunukan memiliki responden terbesar yaitu 35 responden dari 38 responden seluruhnya menyatakan untuk jaminan kualitas memang pemotongan sapi di Nunukan memiliki jaminan kualitas terbaik, karena sapi yang di potong di Nunukan adalah sapi yang terbaik, memiliki kualitas daging yang masih segar, dan tingkat keamanan dari segi kehalalan pemotongan dilakukan oleh masyarakat sendiri yang memang muslim, sehingga masyarakat aman untuk mengkonsumsinya.

Tabel 4.34. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria prosedur perdagangan daging yang jujur dan adil

No	Persepsi Responden	Jumlah Responden (orang)					Jumlah
		Sangat tidak me-muaskan	Tidak me-muaskan	Cukup me muaskan	Memuask an	Sangat Memuask-an	
1.	Daging beku dari Malaysia	-	-	-	-	-	-
2.	Pemasukan dr daerah lain	-	-	-	-	-	-
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	-	1	5	4	2	12
4.	Daging Beku dari Indonesia	-	3	15	6	2	26

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Berdasarkan tabel 4.34 menunjukkan tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria prosedur perdagangan daging yang jujur dan adil, maka 26 responden menyatakan daging beku dari Indonesia memiliki prosedur perdagangan daging yang jujur dan adil, dengan 15 orang menyatakan cukup memuaskan, 6 orang memuaskan dan 3 orang tidak memuaskan dan 2 orang sangat memuaskan, dan 12 responden lainnya menyatakan bahwa pemotongan sapi di Nunukan merupakan kriteria prosedur perdagangan daging yang adil dan jujur.

Tabel 4.35. Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria mengurangi ketergantungan daging dari luar

No	Persepsi Responden	Jumlah Responden (orang)					Jumlah
		Sangat tdk memuaskan	Tidak memuaskan	Cukup memuaskan	Memuaskan	Sangat memuaskan	
1.	Daging beku dari Malaysia	-	-	-	-	-	-
2.	Pemasukan dr daerah lain	-	3	1	-	-	4
3.	Pemotongan sapi di Nunukan	1	2	4	2	-	9
4.	Daging Beku dari Indonesia	2	16	5	2	-	25

Sumber : Hasil angket responden, 2017

Berdasarkan Tabel 4.35 menunjukkan tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria mengurangi ketergantungan daging dari luar, maka 25 responden menyatakan bahwa daging beku dari Indonesia adalah yang tepat, dan 9 responden menyatakan bahwa untuk mengurangi ketergantungan daging dari luar adalah pemotongan sapi di Nunukan, dan 4 responden sisanya menyatakan pemasukan dari daerah lain guna mengurangi ketergantungan daging dari luar.

C. Pembahasan Penelitian

Pembahasan berdasarkan hasil penelitian dan telah dapat dilakukan analisa terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Study tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan asal Hewan di Nunukan)

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Study tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan asal Hewan di Nunukan)

a. Populasi Ternak

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa populasi ternak masih dalam kategori memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah karena untuk meningkatkan populasi dibutuhkan sumberdaya ternak atau sapi indukan cukup banyak pula. Untuk membeli indukan dibutuhkan biaya yang cukup tinggi, peternak yang handal dan lahan penanaman hijauan pakan ternak harus optimal, hal ini sesuai dengan teori pengembangan usaha peternakan menurut Ekowati et al (2011), mengemukakan bahwa:

“Pengembangan usaha ternak sapi dilakukan dengan maksud untuk memenuhi tingkat kecukupan daging. Upaya pencapaian kecukupan daging sapi dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut :

- 1). Peningkatan produktivitas
- 2). Peningkatan populasi ternak
- 3). Substitusi dan diversifikasi produk
- 4). Pembinaan dan pengembangan kelembagaan.

Jumlah populasi ternak terbesar di Kabupaten Nunukan tahun 2015 – 2016 didominasi oleh ternak sapi sejumlah 8.632 ekor, ternak kerbau sebesar 3.663, ternak kambing 2.430 ekor, ternak babi 4.106 ekor. Untuk ternak unggas yaitu

peternakan ayam potong sejumlah 330.200 ekor, yang banyak diusahakan di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Dan populasi ayam buras tercatat sebanyak 65.036 ekor yang tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.36. Tingkat Pertumbuhan Populasi Ternak Sapi di Kabupaten Nunukan

No	Tahun	Jumlah	Tingkat Pertumbuhan (%)
1.	2011	6.285	0
2.	2012	7.102	12,99
3.	2013	8.847	24,57
4.	2014	8.266	- 6,5
5.	2015	8.150	- 1,4
6.	2016	8.632	5,9

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan 2017

Tingkat pertumbuhan populasi sapi di Kabupaten Nunukan dalam 6 tahun terakhir rata-rata mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 24,57 %, dengan jumlah ternak mencapai 8.847 ekor. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah sapi sebesar – 6,5% atau terjadi penurunan jumlah sebesar 581 ekor, selanjutnya pada tahun 2015 juga mengalami penurunan jumlah ternak sebesar -1,4 % yaitu 116 ekor. Dan pada tahun 2016 mulai terjadi peningkatan kembali menjadi 8.632 ekor naik 5,9 %. Naik-turunnya populasi ternak tersebut diatas menunjukkan bahwa perkembangan ternak sapi memiliki dinamika yang fluktuatif.

Tabel 4.37. Pemotongan Ternak (ekor) di Kabupaten Nunukan tahun 2012 – 2016

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sapi Potong	112	36	828	792	832
2.	Kerbau	14	33	41	141	148
3.	Kambing	52	79	600	658	691
4.	Babi	248	245	636	468	491
5	Ayam buras	80.990	89.875	91.401	104.465	114.911

6.	Ayam ras petelur	11.560	12.200	12.550	12.550	13.805
7.	Ayam ras Pedaging	42.400	97.650	88.135	203.605	213.785
8.	Itik	500	4.250	6.861	6.245	6.557

Sumberdata :Dinas PertanianTanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan 2016

Tabel 4.37 menunjukkan bahwa tingkat pemotongan ternak dari tahun ke tahun semakin besar jumlahnya, tanpa ada pengawasan yang ketat terhadap penyembelihan atau pemotongan ternak sapi yang tepat maka hal ini akan semakin menguras populasi sapi di Nunukan. Pengeluaran ternak sapi terlihat pada kecamatan yang berhubungan langsung dengan wilayah perbatasan antar Negara maupun perbatasan antar Provinsi. Hal ini senada diungkapkan oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan Kabupaten Nunukan yang menyatakan bahwa :

“ Pengurangan ternak sapi terjadi diwilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia yaitu wilayah Kecamatan Sebatik yang pada tahun 2014 sempat terjadi pengurangan ternak sapi sebanyak 750 ekor, yang terindikasi banyak dibawa ke wilayah tetangga Malaysia dan Ke Tarakan lewat jalur laut.” Dan wilayah Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Lumbis populasi menurun karena adanya penjualan ternak ke wilayah Provinsi tetangga yang telah memiliki RPH dan melakukan pemotongan sapi cukup banyak setiap harinya.”

Sementara pada Pasal 6 Perda Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan menyebutkan bahwa : “ dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak ruminansia betina produktif dilakukan seleksi untuk pemuliaan sedangkan ternak ruminansia tidak produktif dijadikan ternak potong.” Sehingga penjualan dan pemotongan ternak tidak bisa dilakukan secara sembarangan, hal ini terkait dengan penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.

Setelah dianalisa maka hal ini sejalan dengan keadaan di Kabupaten Nunukan yaitu, program swasembada ternak belum tercapai di Kabupaten Nunukan tahun 2014. Swasembada ternak belum tercapai pada tahun 2014 disebabkan oleh beberapa faktor terkait (Kahar, 2014).

Dalam lingkungan kebijakan dikenal dengan dua bagian yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua lingkungan tersebut mempengaruhi program swasembada daging, lingkungan internal meliputi :

Sumber daya manusia (petani peternak) memiliki beberapa kelemahan yaitu :

a). Beternak adalah Usaha Sambilan

Sebagian besar usaha ternak sapi masih bersifat usaha sambilan karena sebagian besar pekerjaan peternak di Nunukan di dominasi oleh petani sawah dan nelayan (budidaya rumput laut), dan perkebunan sawit yang masih tahap awal panen. Kemampuan rata-rata pemeliharaan ternak sapi hanya berkisar 1-3 ekor perumah tangga petani, lebih dari itu petani belum mampu dalam manajemen ternak sapi yang baik, seperti pemberian makan pada ternak sapi hanya sebagai pengisi waktu, ketika telah pulang dari sawah atau budidaya rumput laut. Hal ini menyebabkan tingkat kepemilikan ternak sapi potong masih rendah. Kepemilikan ternak sapi potong yang masih rendah, yaitu rata-rata kepemilikan sapi dalam tiap-tiap rumah tangga petani adalah 1 – 3 ekor sapi, sehingga pengembangan peternakan rakyat memiliki kemampuan swasembada sangat lemah. Hal ini berhubungan dengan kepemilikan lahan yang masih kecil, sehingga pakan ternak jumlah terbatas. Belum adanya pemanfaatan limbah pertanian secara optimal. Pemanfaatan limbah pertanian yang belum optimal, sehingga program pendukung peningkatan populasi tidak bisa tercapai untuk

mendukung pencapaian swasembada daging atau ternak. Program swasembada ternak dipengaruhi oleh tingkat kesuburan lahan, sebagai sumber pakan hijauan ternak yang berkualitas, dan sebagai lahan penggembalaan ternak yang subur.

b) Tingkat Pendidikan Petani Peternak masih Rendah

Pendidikan peternak masih rendah sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan program secara optimal, rendahnya pengetahuan petani mempengaruhi pelaksanaan program, program tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ditentukan. Rendahnya tingkat pendidikan petani seharusnya diikuti dengan upaya peningkatan kemampuan petani melalui pembinaan petani dilapangan.

c) Masih rendahnya Komitmen Peternak

Masih rendahnya komitmen peternak dalam melaksanakan budidaya peternakan karena sebgaiian besar ternak yang ada di masyarakat merupakan ternak bantuan pemerintah. Proses pengembangan peternakan adalah pengembangan peternakan rakyat, dengan cara pembibitan ternak sapi pada kelompok tani yang dianggap mampu untuk mengembangkan. Rendahnya minat masyarakat dalam mengembangkan usaha peternakan karena dianggap tidak ekonomis, karena tingginya biaya produksi daging yang disebabkan tingginya biaya tenaga kerja dan tingginya biaya hidup.

Sedangkan lingkungan eksternal yang mempengaruhi program swasembada daging di Kabupaten Nunukan meliputi :

1). Harga pakan ternak utamanya konsentrat yang cukup tinggi .

Harga pakan ternak yaitu konsentrat yang cukup tinggi menyebabkan biaya produksi daging ayam potong di Kabupaten Nunukan cukup tinggi. Harga pakan ternak ayam potong dari Surabaya sampai ke Nunukan sudah mencapai Rp

415.000 perkarungnya, sementara pakan asal Tawau Malaysia harga pakan hanya Rp 345.000,- perbedaan harga inilah yang menyebabkan harga daging ayam potong dari Indonesia dengan daging ayam potong dari Tawau Malaysia berbeda cukup jauh.

Sehingga beberapa upaya sedang ditempuh oleh peternak ayam potong di Nunukan untuk melakukan pembentukan Asosiasi Peternak Ayam Potong Nunukan, agar memperoleh pakan langsung dari Surabaya yang hanya Rp 265.000 perkarung, dengan menggunakan transportasi Tol Laut yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat dengan ongkos sewa perkonteiner cukup murah Rp 219.000,- sehingga usaha ini akan menekan biaya pakan yang cukup tinggi selama ini. Namun peternak ayam potong terbentur oleh pemasaran yang masih terbatas, saat ini di Nunukan telah ada 49 peternak dengan memiliki 93 kandang dengan daya tampung perkandang kurang lebih 1000 – 1500 ekor. Bertumpuknya ayam potong di kandang saat ini menyebabkan banyak peternak pemula gulung tikar. Saat ini yang tersisa hanya peternak bermodal besar kurang lebih 20 orang dengan memiliki pangsa pasar yang jelas sehingga peternak lama ini masih eksis. Bagi peternak pemula hal ini merupakan hambatan, belum lagi masih maraknya daging ayam yang berasal dari Tawau Malaysia. Hal ini menyebabkan peternak ayam potong semakin terpuruk. Sehingga sebaiknya pengawasan terhadap masuknya daging di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia sudah selayaknya ditegakkan.

2). Banyaknya terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan.

Banyaknya terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan utamanya perkebunan kelapa sawit yang menjadi primadona masyarakat di

Kabupaten Nunukan, yang merupakan penghambat program swasembada daging

3). Masih lemahnya kelembagaan petani ternak.

Kelompoktani yang dibentuk masih berkonsentrasi pada bantuan ternak pemerintah (terutama ternak sapi) dan belum menjalankan usaha-usaha agribisnis maupun usaha lain yang mendukung usaha budi daya ternak.

4). Belum adanya usaha kemitraan dengan pihak ketiga.

Belum adanya usaha kemitraan dengan pihak ketiga sehingga usaha budidaya peternakan masih berjalan dengan swadaya peternak, kelompok ternak dan pemasaran hasil usaha juga berjalan dengan swadaya masing-masing. Peternak ayam pedaging atau ayam potong saat ini belum memiliki kemitraan dengan pihak ketiga seperti di kota-kota besar lainnya, sehingga beternak ayam potong masih usaha swadaya dengan mengandalkan modal sendiri, sehingga pola ini menyebabkan peternak rawan bangkrut jika pemasarannya belum tersedia, sehingga saat ini kemitraan dengan pihak ketiga harus dilakukan sehingga peternak dapat beternak dengan aman, dan pengurusan pemasaran daging ayam potong diserahkan pada mitra tersebut.

5). Pola pemeliharaan yang masih tradisional.

Pola pemeliharaan yang masih tradisional sehingga kebijakan program swasembada daging belum bisa berjalan secara optimal. Kebanyakan ternak sapi dipelihara secara dilepas dipadang pengembalaan atau bahkan diikat di pepohonan tanpa diberi hijauan yang berprotein sehingga pertumbuhan sapi dapat terhambat serta beternak secara ekstensifikasi dengan ternak dibiarkan lepas liar dipadang rumput. Saat ini program Upsus Siwab pada ternak sapi di Nunukan sedikit memiliki hambatan karena pola pemeliharaan ternak sapi yang masih

ektensifikasi, sehingga program Inseminasi Buatan (Upsus Siwab) sedikit mengalami kesulitan.

6). Lemahnya kerjasama terutama disektor produksi, transpotasi dan jasa.

Lemahnya kerjasama terutama di sektor produksi, transportasi dan jasa sehingga menyebabkan tingginya harga pembelian bibit sapi dari sentra pembibitan diluar Nunukan yaitu dari pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat untuk sampai di Nunukan.

7). Kebijakan Pemerintah Belum Konsisten Dilaksanakan.

Maraknya peredaran daging ilegal asal Malaysia di Nunukan menjadi salah satu penyebab menurunnya motivasi peternak dalam mengembangkan usaha peternakan sapi potong. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah membuat Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang pengawasan peredaran produk asal ternak yang ilegal. Perda ini jelas melarang peredaran daging beku ilegal asal Malaysia tetapi kenyataannya daging ilegal masih ada dipasar. Kebijakan pemerintah Kabupaten Nunukan yang tidak konsisten menjadi penyebab tidak berkembangnya program peternakan. Sebenarnya telah ada daging legal beku asal Jakarta lewat Tarakan, namun memiliki nilai jual yang masih tinggi yaitu untuk perkilo daging beku Rp 85.000 – 90.000,- sementara daging Ilegal asal Tawau Malaysia hanya Rp 65.000 – 70.000,- sampai di Nunukan, kondisi inilah yang semakin memperburuk motivasi peternak sapi untuk membudidayakan ternak sapi di Kabupaten Nunukan.

Menurut Agustino (2016: 162) Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan stakeholder. Oleh karena itu, koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu

implementasi kebijakan. Terkadang suatu kebijakan dianggap baik dalam segi konten tapi lemah dalam segi pelaksanaan. Realita ini sangat mungkin terjadi karena koordinasi antarlembaga atau antar organisasi yang seharusnya dijalankan, dan atau mengawasi justru tidak dilaksanakan koordinasi tersebut. Padahal apabila koordinasi itu dilakukan bukan tidak mungkin suatu masalah publik dapat diselesaikan dengan segera.

8). Kondisi Sosial Ekonomi

Pada tahun 2012 - 2016 sebagian besar masyarakat Nunukan melakukan perubahan pola usaha masyarakat petani akibat berkembangnya usaha budidaya rumput laut sehingga menyebabkan pergeseran usaha. Hampir sebagian besar masyarakat di daerah yang menjadi sentra peternakan beralih fungsi menjadi petani rumput laut. Hal ini diakibatkan oleh karena usaha budidaya rumput laut dikerjakan hanya dalam tiga bulan, langsung dapat dipanen dan secara ekonomi sangat cepat menguntungkan petani dibandingkan usaha peternakan yang tidak jelas rentang waktunya.

Menurut Agustino (2016 :150) kondisi sosial – ekonomi dan teknologi, perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

Sehingga solusi yang terbaik adalah bersaing harga dengan daging beku dari Malaysia, pemerintah daerah harus memikirkan bagaimana produk yang masuk dari Malaysia yang lebih murah dapat bersaing dengan produk Indonesia melalui

persaingan harga yang lebih murah. Hal ini jauh lebih baik untuk mencegah masuknya daging beku atau daging ayam dari Malaysia dengan sendirinya. Usaha Pemerintah Pusat dengan mendatangkan Kapal Laut (Tol Laut) lebih berguna dan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Namun usaha masih terus diupayakan oleh pemerintah daerah untuk kembali meningkatkan populasi sapi melalui program Nasional yaitu Upsus Siwab, dan dalam menambah jumlah populasi ternak di Kabupaten Nunukan adalah dengan pendistribusian bibit ternak sapi ke kelompok tani, dan program Inseminasi Buatan (IB) ternak yang disertai dengan peningkatan ketrampilan dan kemampuan petugas teknis (inseminator) untuk meningkatkan angka kebuntingan melalui program Upaya Khusus sapi Indukan Wajib Bunting dan Asuransi Ternak sapi Betina Produktif (perlindungan terhadap pemotongan sapi Betina Produktif).

Menyadari peran yang sangat besar, maka pembangunan bidang peternakan menjadi mutlak diperlukan. Seperti halnya di Kabupaten Nunukan, pembangunan peternakan cukup mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah dengan cara merancang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis. Target peningkatan produksi ternak adalah pencapaian swasembada yaitu terpenuhinya konsumsi daging masyarakat yang berasal dari sumber daya lokal sebesar 90% sehingga 10% disisakan untuk impor.

Swasembada daging yang akan diinginkan akan bersifat berkelanjutan, artinya pencapaian swasembada akan didahului oleh swasembada yang *on trend*, yang akan selanjutnya akan menuju ke arah swasembada sepenuhnya sehingga ketahanan pangan bertumpuh pada sumber daya lokal. Pada tahap kedaulatan

tercapai maka pada titik ini kedaulatan peternak ini akan menjadi subjek yang menentukan perencanaan penyediaan pangan.

Konsep swasembada juga dimaksudkan untuk pemberdayaan peternak dan ternak lokal, sehingga kegiatan-kegiatan teknis menyangkut peningkatan populasi dan produksi ternak yang dikhususkan pada ternak asli dan lokal Indonesia. Salah satu prinsip Program Swasembada Daging Sapi adalah dapat dihasilkannya daging yang memenuhi persyaratan teknis yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Aman berarti daging tersebut terbebas dari berbagai cemaran dan residu, sehat berarti bebas dari potensi serangan penyakit, utuh berarti tidak ada percampuran dengan daging lainnya dan halal memenuhi persyaratan kaidah-kaidah agama Islam karena mayoritas masyarakat menganut agama Islam.

Sebagai langkah-langkah teknis dan strategis, maka program swasembada daging sapi dan kerbau melakukan langkah-langkah untuk peningkatan populasi dan produktivitas. Langkah ini ditempuh dengan peningkatan kelahiran melalui kegiatan reproduksi yaitu penyelamatan sapi betina produktif, pemeriksaan dan penanganan gangguan reproduksi, intensifikasi kawin alam, optimalisasi IB, dan menurunkan kematian pedet.

Langkah teknis kedua yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas ternak, yang pada aspek ini akan ditangani masalah kesehatan hewan, pakan dan perbibitan. Penanganan aspek kesehatan dilakukan melalui penanggulangan penyakit yang berdampak ekonomi tinggi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan. Dari aspek pakan ditangani penyediaan dan pengembangan pakan melalui revitalisasi padang penggembalaan dan pengembangan kebun bibit. Selain itu dikembangkan pula integrasi ternak sapi dan sawit dan pengawetan hijauan pakan

diwilayah intensifikasi kawin alam. Sedangkan pada aspek perbibitan dilakukan penguatan kelembagaan unit pembibitan pemerintah dengan rencana aksi pemuliabiakan sapi potong dan penguatan *village breeding centre*.

Peningkatan kualitas peternak dan kelembagaan yang mencakup langkah-langkah peningkatan ketrampilan peternak sapi potong melalui fasilitasi sekolah lapang agribisnis sapi potong dan terbentuknya kelembagaan peternak melalui peran SDM dan para penyuluh.

a. Distribusi Pasokan Daging

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa distribusi pasokan daging di Kabupaten Nunukan umumnya dan khususnya pulau Nunukan masih mengandalkan pasokan sapi bibit dari Sulawesi, sementara untuk daging ayam potong di Nunukan telah ada usaha peternakan rakyat dan memiliki produktivitas yang cukup tinggi bahkan dapat dikatakan telah mencapai swasembada daging ayam potong.

Menurut Tjiptono (2008 :585) distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaan sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan).

Mengapa daging sapi memiliki harga jual yang tinggi di Nunukan hal ini karena melihat proses distribusi ternak, serta penyebaran ternak sehingga untuk perkembangan ternak sapi dibutuhkan perkembangan sapi yang sangat perlahan karena pertumbuhan sapi adalah dalam setahun setiap indukan hanya mampu menghasilkan satu ekor anakan, sementara kebutuhan akan daging sapi sangat tinggi mengikuti pertumbuhan masyarakat di Nunukan yang semakin pesat baik oleh pertumbuhan masyarakat lokal maupun dari penambahan dari pendatang dari Provinsi lain seperti dari pulau Sulawesi, dan dari NTB maupun dari NTT yang

bertujuan untuk mencari pekerjaan di Nunukan maupun proses pemulangan TKI dari negara tetangga Malaysia. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan ternak sapi sehingga menyebabkan kekurangan ketersediaan pangan asal hewan terutama daging sapi sangat terbatas.

Hal ini mengakibatkan masyarakat melakukan berbagai aktifitas dalam pemenuhan daging sapi diantaranya adalah memasukkan daging beku asal India lewat Tawau Malaysia secara ilegal atau tanpa diikuti oleh dokumentasi yang resmi. Hal ini tentunya berimbas pada penyimpangan Implementasi Perda Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 52 tentang penanganan, peredaran dan pemeriksaan ulang daging.

Kabupaten Nunukan adalah wilayah perbatasan sehingga pemasukkan ternak sapi banyak didatangkan dari wilayah diluar provinsi misalnya dari wilayah Sulawesi dan memiliki nilai jual ternak yang cukup mahal karena faktor distribusi yang memiliki perjalanan atau transportasi yang cukup jauh sehingga harga menjadi mahal ketika sampai di Pulau Nunukan. Kelebihan potensi populasi sapi potong di Sulawesi yang sangat besar, sulit untuk disalurkan ke Nunukan, akibat sistem logistik yang belum cukup baik.

Pengangkutan ternak di Sulawesi masih menggunakan kapal berfungsi ganda yaitu sebagai kapal penumpang dan pengangkut barang yang berkapasitas kecil, sekitar 20-30 ekor sapi per pengiriman. Kondisi proses pengangkutan sapi seperti itu mengakibatkan pasokan daging sapi lokal di wilayah sentra ke wilayah yang membutuhkan menjadi sangat terbatas dan biaya angkutnya menjadi mahal. Tidak mengherankan apabila daging beku eks India asal tawau Malaysia jauh lebih cepat didatangkan dan biayanya pun lebih murah.

Menurut Bhatnagar (2009:10-14), setiap perusahaan pastinya harus mengambil keputusan untuk penggerak penggerak *Supply Chain* mereka berdasarkan pada dua area, yaitu:

Transportation. Pada area ini, perusahaan melakukan pertimbangan untuk pergerakan rantai pasokan. Karena mengacu pada semua pergerakan dari bahan baku hingga barang jadi. Model transportasi yang cepat seperti pesawat sangat responsive tetapi biayanya lebih besar. Mode yang lambat seperti kapal dan kereta api lebih efisien pada biaya tapi tidak responsive. sehingga pengambilan keputusan pada area ini sangatlah penting. Dan terdapat beberapa cara umum dalam transportasi yang dapat dipilih oleh perusahaan, yaitu:

- Ship. Kapal memiliki efisiensi pada biaya yang besar. tetapi juga merupakan carayang paling lambat dalam pengiriman. Dan juga adanya keterbatasan pada penggunaan antara lokasi dan fasilitas seperti pelabuhan
- Truck. Truk pada umumnya relatif lebih cepat dan cara transportasi yang flexibel. Karena dapat pergi hampir kemana saja. Akan tetapi biayanya berubah-ubah tergantung pada harga dari bahan bakar dan juga variasi dari kondisi jalan

Saat ini biaya angkutan antar pulau sangat tinggi, biaya angkutan sapi potong jenis sapi bali dari Sulawesi Barat ke Nunukan mencapai Rp 1.200.000,-/ekor atau sekitar Rp 8.000,-/kg sapi hidup, dengan asumsi berat hidup 200 kg, bila diasumsikan harga sapi Bali di Sulawesi Barat dengan bobot 200 kg seharga Rp 7.000.000,-/per ekor maka harga sapi tersebut setelah tiba di Nunukan menjadi Rp 8.200.000,-. Bila diasumsikan persentase daging sebesar 40 % dari berat hidup (200 kg) maka menghasilkan daging kurang lebih 80 kg. Bila dikonfersi modal dengan jumlah daging yang dihasilkan maka setidaknya biaya produksi perkilogram daging di Nunukan mencapai Rp 120.000,- harga tersebut tentunya sangat berbeda dengan daging beku eks India yang masuk lewat Tawau Malaysia yang harga jual berkisar antara Rp 65.000 – 70.000,-. Perkilogram.

Dari fenomena diatas maka faktor harga sangat menentukan kemampuan masyarakat Nunukan dalam mengkonsumsi daging sapi dan daging ayam secara rutin setiap harinya. Dalam mengkonsumsi daging segar dibutuhkan harga yang cukup tinggi sementara kemampuan dan daya beli masyarakat masih sangat rendah. Faktor sosial ekonomi turut serta dalam menentukan kemampuan suatu daerah dalam mengkonsumsi daging yang sehat.

Menurut Van Mettter dan Van Horn faktor terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementai publik adalah lingkungan eksternal, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Sehingga antara kebijakan yang terbaik untuk mencegah masuknya daging asal Malaysia , maka pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berkoordinasi untuk memperkuat armada pengangkutan lewat laut (Tol Laut) difungsikan secara optimal dengan melengkapi kebutuhan pengangkutan daging beku dengan perlengkapan frezer dan kebutuhan listrik dalam kapal untuk mendatangkan secara langsung daging beku asal Indonesia dari Jakarta ke kabupaten Nunukan, hal ini akan memangkas harga yang berbeda cukup jauh dengan harga daging beku dari Tawau Malaysia. Begitu pula dengan kebutuhan kosentrat sebagai pakan ayam yang memiliki harga jual yang tinggi di Nunukan , sehingga daging ayam potong di Nunukan sangat mahal bila dibandingkan dari Sulawesi, karena pakan ayam (konsentrat yang mahal) penyebab tingginya produksi ayam. Hal ini

untuk memperkuat armada pengangkutan lewat laut (Tol Laut) difungsikan secara optimal dengan melengkapi kebutuhan pengangkutan daging beku dengan perlengkapan freezer dan kebutuhan listrik dalam kapal untuk mendatangkan secara langsung daging beku asal Indonesia dari Jakarta ke kabupaten Nunukan, hal ini akan memangkas harga yang berbeda cukup jauh dengan harga daging beku dari Tawau Malaysia. Begitu pula dengan kebutuhan konsentrat sebagai pakan ayam yang memiliki harga jual yang tinggi di Nunukan, sehingga daging ayam potong di Nunukan sangat mahal bila dibandingkan dari Sulawesi, karena pakan ayam (konsentrat yang mahal) penyebab tingginya produksi ayam. Hal ini dapat diperbaiki dengan menggunakan Tol Laut sebagai pengangkut yang tepat dan lebih murah. Untuk satu konteiner hanya Rp 219.000,- untuk ongkos buruh angkut dipelabuhan Rp 100.000,- maka masalah harga daging ayam dapat teratasi begitu pula dengan daging sapi beku. Bahkan bila mungkin jika Nunukan dapat menghadirkan harga yang cukup murah, kita mampu mengekspor balik barang tersebut ke Malaysia.

c. Kebutuhan Konsumsi dan Ketersediaan Daging di Nunukan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa untuk mencukupi kebutuhan konsumsi daging di Nunukan masih mengandalkan daging beku yang berasal dari daging beku resmi dari Jakarta ataupun daging beku ilegal yang masuk lewat Tawau Malaysia yang tidak dilengkapi dengan surat resmi.

Menurut Baliwati dan Roosita (2004), ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah dan jenis pangan yang di konsumsi penduduk. Ketersediaan pangan (*food availability*) disuatu daerah atau wilayah ditentukan oleh berbagai faktor seperti keragaman

produksi pangan, tingkat kerusakan dan kehilangan pangan karena penanganan yang kurang tepat dan tingkat ekspor /import pangan.

Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (PSDLH) Kemendesa Faizul Ishom, mengatakan, konsumsi daging sapi orang Indonesia terbilang masih rendah, yakni hanya 2,2 kg per kapita/tahun. angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti Argentina yang mencapai 55 kg per kapita/tahun, Brazil 40 kg per kapita/tahun, dan Jerman 40-45 kg per kapita/tahun. Sementara Singapura dan Malaysia sebanyak 15 kg per kapita/tahun (JAKARTA, KOMPAS.com).

1). Ketersediaan Daging Ayam Potong di Nunukan

Ketersediaan bahan makanan dari sisi energi untuk kelompok daging, komoditas daging ayam pedaging merupakan bahan makanan yang paling dominan kontribusinya dalam penyediaan daging di Nunukan. Daging ayam pedaging yang tersedia sebagian besar diproduksi di wilayah Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan sebesar 889.912 kg. Swasembada daging ayam telah tercapai untuk ketersediaan akan kebutuhan setiap harinya, yakni sebesar 95 persen dan 5 persen lainnya berasal dari Tawau Malaysia dan Sulawesi.

Tabel 4.38. Data Pemasukan Produk Ternak di Kecamatan Nunukan 2014-2017

No	Produk	Jumlah (kg)				Daerah asal
		2014	2015	2016	2017 (jan-Agust)	
1.	Daging Ayam	279.920	233.515	129.080	41.460	Sulawesi
2.	Telur	146.500	797.400	581.400	279.171	Sulawesi

Sumber Data : Badan Karantina Kelas II Tarakan 2014 -2017.

melihat kondisi pertebalan daging, kondisi daging yang lebih keras dan karkas yang lebih besar berat 3 -5 kg perekor (pakan ayam Malaysia telah ditambahkan jagung) bila dibandingkan dengan karkas ayam produk Indonesia (Nunukan) yang masih memiliki bobot badan 1-1,5 kg perekor telah dilakukan pemotongan (pakan masih berupa konsentrat).

Melihat kondisi peternak ayam potong saat ini terjadi perubahan pasar dimana produksi ayam berlimpah sementara permintaan pasar rendah hal ini mengakibatkan, peternak pemula harus merugi karena belum berpengalaman untuk melihat resiko pasar, sehingga salah perhitungan dalam pemasaran ayam, sebenarnya ketika kita memelihara ayam maka kita harus membuat studi kelayakan minimal tiga tahun sebelumnya sehingga kita bisa memperhitungkan kapan harus memelihara dan kapan harus pelan-pelan, dan kapan harus berhenti. Berbisnis ayam potong harus memiliki pemasaran yang pasti, pelanggan yang tetap dan memiliki freezer (pendingin) yang besar, sehingga faktor kerugian dapat teratasi.

Tabel 4.39. Kebutuhan dan ketersediaan daging sapi dan ayam potong di pulau Nunukan

No	Jenis Produk	Kebutuhan Kg/ thn	Ketersediaan (kg)	Kekurangan/Kelebihan (kg)	Asal daerah Pemasukan
1.	Daging Sapi Segar	129.090	5. 472	123.618	Sulawesi
2	Daging beku	123.618	3.500	120.118	Malaysia, Jakarta
3.	Daging Ayam Potong	400.626	1.026. 064	625.438	Lokal Nunukan

Sumber data: Karantina Hewan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan 2016

Berdasarkan tabel 4.39 menunjukkan antara kebutuhan dan ketersediaan daging ayam potong di pulau Nunukan yaitu kebutuhan 400.626 kg dan ketersediaan adalah 1.026.064 kg sehingga kelebihan adalah 625.438 kg pada tahun 2016 .

Tabel 4.40. Produksi ayam pedaging di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan di Kabupaten Nunukan tahun 2017

Bulan	Jumlah Produksi (ekor)	Pemotongan (ekor)
Januari	32.300	29.197
Februari	35.900	35.500
Maret	42.400	35.900
April	56.550	46.500
Mei	56.750	42.250
Juni	58.400	33.450
Juli	63.200	55.200
Agustus	53.320	51.600
Jumlah	398.820	329.597

Sumber data : DPKP Kabupaten Nunukan 2017

Rata-rata pemotongan perhari untuk ayam pedaging di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan adalah kurang lebih 1200-1800 ekor. Hal ini hanya untuk kebutuhan wilayah Pulau Nunukan dan sekitarnya. Sementara untuk pulau lain yaitu daerah Pulau Sebatik dan Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan kebutuhan daging ayam berasal dari Negara Malaysia, hal ini disebabkan jarak antar kedua negara hanya ditempuh sekitar lima belas menit, hal ini membuat hampir sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang bermukim di pulau Sebatik dan Krayan memakai produk asal Malaysia.

Menurut Thomas Presiden Direktur CPIN, (2016) tingkat konsumsi daging ayam masyarakat Indonesia baru mencapai 9 kilogram (kg) per kapita per tahun. Sedangkan Malaysia mencapai 36 kg per kapita per tahun. Kalau dilihat dari statistik angkanya cukup jauh. Menurut Thomas, agar tingkat konsumsi daging ayam meningkat, penerimaan upah yang diterima masyarakat Indonesia harus ditingkatkan, karena akan berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap daging ayam. "

Permasalahan yang dihadapi oleh usaha peternakan ayam pedaging di Nunukan adalah peraturan perizinan usaha ayam tingkat rendah masih belum tersentuh. Sementara yang memiliki usaha peternakan banyak yang menimbulkan permasalahan lingkungan yang kurang sehat terkait pada usaha peternakan yang

masih tradisional dan dimiliki oleh masyarakat yang berpenghasilan masih menengah kebawah. Hal ini dikuatkan oleh Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

“untuk perizinan usaha peternakan ayam pedaging itu wajib karena menyangkut terhadap legalitas peternak, sehingga pembinaan dan sistem pemeliharaan atau budidaya ternak dapat dilaksanakan. Namun dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang Peternakan hanya sebatas memberikan surat rekomendasi teknis peternakan , sementara izin usaha peternakan dikeluarkan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Nunukan. Diharapkan kedepannya ada Perda yang mengatur tentang perizinan usaha peternakan rakyat yang memiliki usaha yang bermodal masih kecil dibawah seratus juta rupiah.”

Melihat kondisi peternakan ayam pedaging yang semakin pesat, namun tidak dibarengi dengan usaha perizinan ,maka tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang Peternakan harus semakin besar, minimal harus melakukan sosialisasi tentang bagaimana membangun peternakan yang maju berbasis agribisnis yang aman dan sehat lingkungan, harus sudah ditanamkan pada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha peternakan yang lebih terarah, higienis dan memiliki asas legalitas yang jelas dan transparan, hal ini guna membina peternakan ayam menjadi lebih maju dan modern ditengah perkembangan zaman yang semakin maju dan memiliki dinamika kehidupan yang sangat berfluktuatif.

Kelemahan peternak ayam potong di Nunukan adalah belum adanya asosiasi peternak ayam potong sehingga keberadaan peternak ayam potong masih lemah, kondisi ini diperburuk dengan masih maraknya peredaran ayam pedaging dari Malaysia yang masuk secara illegal dan memiliki nilai jual yang jauh lebih murah. Kondisi persaingan yang tidak sehat ini menyebabkan peternak ayam potong rawan mengalami kerugian, sehingga saat inipun banyak peternakan ayam

potong yang harus tutup dalam arti tidak berproduksi sehingga kondisi pasar cukup baik.

Pemasaran hasil memang menentukan untuk melakukan produksi ayam di Nunukan, tanpa ada kemitraan dengan perusahaan - perusahaan besar di Nunukan maka peternak ayam belum mampu bersaing secara sehat, peternak membutuhkan perlindungan dari pemerintah daerah, baik untuk membina kemitraan dengan pihak ketiga maupun dalam permodalan dalam beternak ayam potong.

Pada akhir tahun seperti saat ini usaha peternakan ayam potong sangat sepi sehingga usaha peternakan ayam potong yang tadinya perkandang mencapai populasi 1000-1500 ekor turun menjadi 300-500 ekor perkandang. Sehingga dari 53 peternak dengan 95 kandang saat ini mengurangi jumlah populasi ternaknya agar tidak mengalami kerugian yang besar.

Peternak ayam potong di Nunukan berusaha membuat Asosiasi peternak ayam yang pernah terbentuk namun tidak aktif lagi (bentuk koperasi peternak ayam potong), dan untuk membangun kekuatan peternak dalam modal dan kemitraan dengan pihak ketiga maka, para peternak berusaha membuat asosiasi yang baru dengan bekerjasama dengan perusahaan agar pemasaran dan kebutuhan pakan dan bibit ayam potong dapat teratasi.

2). Ketersediaan Daging Sapi Potong di Kabupaten Nunukan

Sementara ketersediaan daging sapi dan daging kerbau Kabupaten Nunukan masih mengandalkan dan membutuhkan daging beku Allana dari India yang masuk lewat dua jalur yaitu yang masuk dari Indonesia lewat Jakarta ataupun masuk dari Tawau Malaysia , kebutuhan daging 90 % dari luar (daging Beku Allana) dan 10 % dari pemotongan di wilayah Nunukan.

Tabel 4.41. Produksi Daging (kg) di Kabupaten Nunukan

No	Jenis Ternak	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Sapi Potong	131.715	125.988	132.288
2.	Kerbau	8.490	29.196	30.656
3.	Kambing	8921	9.783	10.272
4.	Babi	41.264	30.364	31.883
5.	Ayam buras	67.363	76.990	84.689
6.	Ayam ras petelur	11.320	11.320	12.452
7.	Ayam ras Pedaging	72.712	167.974	176.373
8.	Itik	5.660	5.152	5.410

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan 2016

Kondisi pemenuhan daging di Kabupaten Nunukan hasil perhitungan secara Nasional (Widya Karya Pangan dan gizi ke VIII, 2004) untuk angka kecukupan gizi protein perkapita perhari adalah 52 gram pada tingkat konsumsi dan 75 gram pada tingkat persediaan. Ketersediaan protein perkapita perhari pada tahun 2011 untuk Kabupaten Nunukan sebesar 65,05 gram, yang berasal dari kontribusi sumber pangan nabati dan sebanyak 40,31 gram perhari dan dari sumber pangan hewani sebesar 24,74 gram perhari.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Study Tentang Kebijakan Keterdiaan Pangan Asal Hewan) membahas tentang hewan yang memiliki peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 46 yaitu kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan dalam bentuk penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan, dan pasal 52 tentang penanganan, peredaran dan pemeriksaan ulang daging, dimana daging yang didatangkan dari luar daerah harus dilengkapi surat keterangan kesehatan dan asal daging serta

harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan atau petugas peternakan, hal ini menyangkut pengawasan terhadap peredaran produk pangan asal hewan secara illegal.

Melihat keberadaan daging ilegal dan daging legal memiliki tekstur dan mutu yang sama karenanya sangat susah untuk dibedakan, apalagi memang kedua daging berasal dari produk yang sama atau memiliki merk dagang yang sama yaitu daging Kerbau Allana asal dari India. Di Kabupaten Nunukan sendiri masih banyak daging Allana yang masuk lewat Tawau Malaysia, meskipun tidak masuk secara terang-terangan tapi keberadaannya tetap beredar di lingkungan pasar dan menjadi bahan pasokan daging di rumah makan yang ada di Kabupaten Nunukan, walaupun pedagang makanan mengaku bahwa daging dari Tarakan yang Legal, maka dilihat dari daftar kebutuhan dan pemasukan daging asal Jakarta memang tidak seimbang.

Hal yang menjadi permasalahan baru ini terkait adanya daging legal yang masih sangat terbatas, sehingga peredaran daging ilegal masih marak. Sehingga usaha utama kita sebagai aparaturnya adalah memperlancar kedatangan daging legal asal Jakarta, melalui dinas terkait kita berusaha agar keamanan konsumen dapat terjaga. Kita harus menyiapkan investor sebagai pemasok yang bertanggungjawab guna penyediaan daging beku lebih lancar, aman dan terjamin kualitasnya.

Sambil menunggu kestabilan ketersediaan daging Allana dari Jakarta, maka untuk menjaga kualitas daging, dan terjaminnya kesehatan masyarakat sebagai konsumen daging beku ilegal, saat ini pemerintah daerah menfokuskan untuk selalu memeriksa ketersediaan daging untuk selalu diperiksa akan kandungan zat

yang dapat merusak tubuh. Seperti pemeriksaan terhadap kadar formalin, boraks dan tes kehalalan daging di Kabupaten Nunukan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Study tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan Di Nunukan)

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan tersebut merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan tersebut. Sehingga dibutuhkan komunikasi yang intens dan tepat agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Implikasinya, masalah yang muncul berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan pertentangan, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

Menurut Donald van Meter dan Carl Van Horn, keberhasilan implementasi suatu kebijakan memerlukan dukungan, koordinasi instansi lain. Pelaksana kebijakan membutuhkan pengawasan bahkan pengendalian. Bentuk pengawasan yang dilakukan Satpol PP sebagai penegak perda, adalah melakukan penindakan. Kegiatan penindakan dapat berupa patroli pengawasan dan juga kegiatan yang berbasis operasi tangkap tangan. Kegiatan pengawasan dan penindakan dalam penegakan perda ini, tentunya membutuhkan koordinasi instansi terkait seperti Polri.

Segala macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, akan selalu menimbulkan konflik baik antar masyarakat, pedagang, pelaku usaha peternakan,

dan pemerintah atau orang-orang yang merasakan kepentingan didalamnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan upaya atau tindakan secara preventif dilakukan dengan keterbukaan informasi antara aparatur, pedagang, pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen. Sedangkan tindakan koersif yang dilakukan dapat berupa sanksi pidana.

Merille Grindle menjelaskan bahwasanya, dalam konteks implementasi kebijakan, strategi aktor yang terlibat juga menentukan keberhasilan implementasi. Sebagai OPD dalam bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, memiliki strategi untuk lebih mengedepankan kerjasama tim dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masuknya produk pangan asal hewan di Kabupaten Nunukan.

Menurut Van Meter dan Van Horn Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana melalui koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan semakin kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi tak kalah pentingnya dalam melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan antar organisasi pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah koordinasi harus ditingkatkan. Sementara saat ini implementasi Perda no 03 tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan kurang optimal dilakukan karena faktor komunikasi antar instansi belum terlaksana secara optimal.

b. Sumberdaya

1. Sumber Daya Manusia

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Sumberdaya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumberdaya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedangkan secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Menurut Edward III dalam Agustino (2016 : 158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah terdiri dari :

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*Street-level-bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Informasi. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu : pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Disatu pihak, efektifitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektifitas akan menyurut manakala

wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

- d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Program swasembada ternak pada tahun 2014 bisa dibilang tidak tercapai, akibat keterbatasan SDM dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2011 – 2016, jumlah staf dibidang Peternakan hanya berjumlah 11 orang dengan rincian 4 orang staf struktural dan 7 orang staf fungsional, yang harus melayani seluruh wilayah Kabupaten Nunukan dengan jumlah 19 Kecamatan, yang ideal dalam setiap kecamatan harus memiliki minimal satu orang petugas peternakan/kesehatan hewan. Selain keterbatasan SDM, rendahnya komitmen aparatur dalam mensukseskan program yang ada diakibatkan kurangnya biaya operasional dalam pelaksanaan program, hal ini tidak terlepas dengan rendahnya anggaran pada Dinas Pertanian dan peternakan di Kabupaten Nunukan.

2. Sumber Daya Finansial

Pelaksanaan program swasembada ternak sapi masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di Kabupaten Nunukan karena pembangunan Peternakan di Kabupaten Nunukan belum memiliki dukungan dana yang memadai karena pembangunan di Kabupaten Nunukan masih diprioritas pada pembangunan fisik dan infrastruktur lainnya, bidang peternakan belum menjadi prioritas.

Tabel 4.42. Alokasi Anggaran pada Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan tahun 2010 - 2016

No	Tahun	Jumlah Dana	(%) APBD Dispertanak
1	2010	1.295.219.526	0,71
2	2011	1.803.902.714	0,96
3.	2012	1.767.129.068	1,12
4.	2013	2.785.290.048	12,89
5.	2014	807.276.476	8,79
6.	2015	808.396.476	9,76
7.	2016	290.900.936	5,46

Sumber data : Bappeda Kabupaten Nunukan 2016

Dalam tujuh tahun rata-rata alokasi anggaran untuk dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan yang diperuntukan pada bidang Peternakan hanya sebesar 5,67 %, kecilnya anggaran untuk Bidang Peternakan menyebabkan program swasembada daging di Kabupaten Nunukan sulit untuk dilaksanakan sehingga target sulit tercapai.

Menurut Agustino (2016 : 134) keberhasilan implementasi tidak hanya pada faktor sumberdaya manusia tetapi faktor sumber daya finansial juga sangat diperhitungkan. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

3. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Di Kabupaten Nunukan ini telah memiliki SDM namun sarana prasarana yang mendukung Implementasi yaitu adanya sarana transportasi laut guna menunjang alat angkut barang yang masih sangat minim. Dan pada tahun 2017 ini telah ada kapal besar yang berfungsi sebagai pengangkutan barang antar wilayah di Kalimantan dan Jawa dengan sebutan Tol Laut, yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh petani dan peternak dalam membeli barang kebutuhan seperti pakan yaitu konsentrat yang masih didatangkan dari Surabaya dengan ongkos angkut yang mahal dengan adanya tol laut ini maka akan memangkas ongkos yang lebih besar. Demikian pula dengan pengangkutan daging beku asal Jakarta, dengan menggunakan tol laut maka, masyarakat akan mampu mendatangkan daging beku yang memiliki nilai jual yang lebih rendah, bahkan mampu untuk menyaingi harga daging beku asal Tawau Malaysia.

Dalam *Supply Chain Management*, banyak peluang yang tersedia untuk meningkatkan nilai produk dengan biaya yang rendah. Di pihak pemasok, teknik seperti JIT (*Just In Time*) dan kerja sama pemasok yang dapat membantu dalam distribusi. Dan di sisi distribusi, terdapat juga teknik yang biasa digunakan seperti *Drop Ship* yang berarti pemasok akan langsung mengirimkan produknya ke konsumen pemakai dan bukan kepada penjual, agar dapat menghemat waktu dan biaya pengangkutan ulang.

Dimana, kunci dari sebuah *Supply Chain Management* yang efektif adalah penyeimbangan pada arus produksi dengan permintaan konsumen yang selalu berubah-ubah. *Supply Chain Management* yang efektif membuat para supplier sebagai partner dalam strategi perusahaan untuk memuaskan kondisi pasar yang

berubah-ubah. Dimana, keunggulan kompetitif dapat bergantung pada hubungan yang dekat melalui strategi hubungan kerja sama jangka panjang dengan beberapa supplier. bagi banyak perusahaan, biaya dan mutu produk pastinya meliputi sebagian besar dari perusahaan manufaktur, restoran, pedagang besar dan juga eceran. Sehingga, dengan diterapkannya *Supply Chain Management* yang baik memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetitifnya.

c. Disposisi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi - organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama diantara banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi suatu kebijakan publik.

Menurut Edward III dalam Winarno (2014 :177) , terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni “ Standart Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi “. Standart Operasional Prosedure merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP

atau prosedur kerja ini biasanya digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan standar operasional prosedur, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2014:178), menjelaskan bahwa : “SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, makin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.” “namun demikian disamping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luas dan kontrol yang besar atau program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggungjawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.”

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2014:179) menjelaskan bahwa “Fregmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fregmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit

dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik: “Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu pula, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantar dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk”. “Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan”.

Terkait dengan mekanisme sistem penyediaan pangan asal hewan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan menyatakan bahwa: “dalam penyediaan pangan asal hewan dinas memiliki strategi utama yang bisa dijadikan bahan acuan yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 54 berbunyi pemasukan bahan pangan asal hewan dari luar daerah harus memiliki dokumen-dokumen yang lengkap.

d. Karakteristik Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian melalui beberapa wawancara dengan pejabat terkait dengan pemasukkan produk pangan asal hewan dari negara tetangga

Malaysia yang tidak dilengkapi surat yang resmi, maka yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas yang terkait yang bertanggungjawab.

Adanya Regulasi (Perda Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan). Dalam menerapkan implementasi dibutuhkan regulasi yang jelas, hal ini tergambar dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa pasal mengenai peraturan tentang cara pemasukan produk pangan asal hewan diatur secara jelas.

Isi, maksud , tujuan dan ketentuan-ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengenai ketersediaan pangan asal hewan terutama pasal 54 , yaitu setiap orang dilarang memasukan, menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan / atau bagian yang berasal dari : daging ilegal, daging gelonggongan, daging oplosan, daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging dan daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi masih belum berjalan optimal, oleh karena itu komunikasi perlu dilakukan secara intens agar para pegawai sebagai implementor atau pelaksana dapat memahami dan melaksanakannya, demikian pula masyarakat sebagai pelaku atau pedagang dapat mentaati peraturan yang berlaku.

Penerapan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (tentang ketersediaan pangan asal hewan yang belum optimal karena masih masuknya daging beku ilegal asal Malaysia maka, membutuhkan berbagai koordinasi dari berbagai instansi yang berwenang, misal Bea Cukai, Karantina Hewan dan Polisi Pamong Praja serta Kepolisian serta dinas terkait yaitu dinas Perdagangan dan dinas Pertanian Ketahanan Pangan bidang

Peternakan guna mencegah masuknya daging beku ilegal dan dapat masuknya daging beku legal yang lebih aman dikonsumsi masyarakat Nunukan secara aman dan terjamin kualitasnya.

Di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki jumlah sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, namun untuk implementasi kebijakan peraturan bupati nomor 03 tahun 2012 tentang peternakan dan kesehatan hewan dalam pasal pengawasan lalulintas ternak dan produk ternak merupakan tugas dari beberapa instansi yang tergabung dalam pengawasan di daerah perbatasan ini yaitu dari badan Karantina Hewan, Bea Cukai dan dari bidang Peternakan kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner, sehingga pengawasan harus terus dipantau oleh dinas terkait tersebut. Sehingga keamanan produk peternakan yang masuk dapat lebih selektif guna, meningkatkan keamanan pangan produk ternak yang beredar di Kabupaten Nunukan. Hal senada ini juga diutarakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan yang mengutarakan bahwa:

”Pengawasan harus ditingkatkan terhadap peredaran produk ternak terutama daging beku asal Malaysia, karena telah ada daging beku Legal yang sudah beredar di Kabupaten Nunukan, sehingga kita tidak akan mentolerir lagi masuknya daging beku dari Malaysia. Dan pengawasan ini haruslah menjadi tanggungjawab instansi terkait, misalnya Bea Cukai, Kantor Karantina Hewan dan Satuan Pamong Praja, bahkan pihak kepolisian dapat diikutsertakan dalam pengamanan.”

Demikian juga yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan yaitu :

“Kebutuhan pangan asal ternak yaitu daging sapi dan daging ayam masih aman, namun yang menjadi masalah adalah masih masuknya daging beku ilegal asal Malaysia yang masih beredar di pasar-pasar Kabupaten Nunukan, hanya kita belum menyadarinya. Kita masih beranggapan bahwa daging yang beredar adalah daging beku legal dari Jakarta, namun ternyata daging beku Jakarta belum bisa masuk secara sepenuhnya.”

Hal ini disebabkan oleh belum ada pemasok yang menangani secara tepat. Dan solusi yang terbaik adalah harus menyelesaikan dulu ketersediaan daging di Kabupaten Nunukan setelah itu baru kita selesaikan pengawasannya. Pengawasan harus ditegakkan oleh instansi yang berwenang, masuknya daging ilegal tersebut dikarenakan memang ada dinas atau instansi yang masih lemah dalam pengawasan daging tersebut, misalnya Bea Cukai, dan Kantor Karantina Hewan yang melakukan pengawasan masih sangat lemah.”

Edward III dalam Winarno (2012:142-143), mengemukakan bahwa “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana kebijakan mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Winarno (2014:172-173), mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu pengangkatan yang pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dengan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki jumlah sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, namun untuk Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pengawasan lalulintas ternak dan produk ternak merupakan tugas dari beberapa instansi yang tergabung dalam pengawasan di daerah perbatasan ini yaitu dari Kantor Karantina Hewan, Bea Cukai dan dari bidang Peternakan Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner, sehingga pengawasan harus terus dipantau oleh dinas terkait tersebut. Sehingga keamanan produk peternakan yang masuk dapat lebih selektif guna, meningkatkan keamanan pangan produk ternak yang beredar di Kabupaten Nunukan.

Demikian pula ketika daging legal telah masuk maka petugas pengawas lalulintas ternak atau bahan pangan asal ternak dilapangan harus sering menjaga

secara efektif dan lebih ketat dalam pengawasan terhadap masuknya daging ilegal asal Malaysia, hal ini adalah tanggungjawab beberapa instansi misal Bea cukai, Badan Karantina Hewan dan Polisi Pamong Praja serta Kepolisian agar menjaga ketertiban terhadap perdagangan yang sehat dan halal.

Menurut Gridlee lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa penelitian tentang Implementasi Perda No 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan akan berhasil jika didukung oleh segenap aparatur dan instansi terkait dan sebaiknya didukung oleh penguasa daerah setingkat Bupati , guna membantu mendorong para pejabat untuk mensukseskan suatu kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan, demi membantu kesejahteraan masyarakat yang bergerak didunia agribisnis Peternakan terutama Peternakan ayam potong sebagai pemasok untuk kebutuhan protein hewani yang segar, sehat, utuh dan halal .

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan

a. Alternatif Sumber Ketersediaan Daging di Kabupaten Nunukan

Berdasarkan hasil angket, persepsi responden sebagian masyarakat Nunukan menunjukan alternatif sumber ketersediaan daging di Kabupaten Nunukan menunjukan bahwa sebanyak 8,7 % responden menginginkan ketersediaan daging beku asal Malaysia dan 8,7 % responden menginginkan dari daerah lain di Indonesia , sebanyak 36,9 % responden menginginkan pemotongan

sapi di Nunukan, dan 47,4 % menginginkan ketersediaan daging dipenuhi oleh daging beku dari Indonesia.

Menurut Aaker (1997) menyatakan bahwa ketersediaan merupakan faktor ketertarikan berdasarkan logika atau pertimbangan-pertimbangan bagaimana produk mudah diperoleh.

Menurut Rusell (2000:372) *Supply Chain management* adalah pengkoordinasian dari setiap kegiatan sehingga kebutuhan konsumen dapat disediakan dengan cepat dan servis yang dapat dipercayakan dari produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Dimana, fasilitas yang mencakup *supply chain* termasuk para pekerja, gudang , pusat distribusi, pusat pelayanan dan retail.

Menurut Pujawan (2005:22) *Supply Chain Management* adalah suatu metode atau pendekatan secara integrative dalam pengelolaan aliran produk, informasi dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak dari hulu ke hilir yang terdiri atas para supplier, pabrik serta jaringan distribusi dan jasa logistik.

Menurut Said (2006:6) *Supply Chain Management* adalah pengelolaan informasi, barang dan jasa mulai dari pemasok paling awal sampai ke konsumen paling akhir dengan menggunakan pendekatan sistem yang terintegrasi dengan tujuan yang sama.

Definisi *Supply Chain management* menurut Heizer dan Render (2011:452) adalah integrasi aktivitas untuk mendapatkan material dan servis, mengubahnya

menjadi barang setengah jadi dan barang jadi , dan mengirimkannya kepada konsumen. Aktivitas ini termasuk juga aktivitas pembelian, aktivitas outsourcing yang ditambah dengan fungsi lain yang penting untuk hubungan antara supplier dan distributor.

Dari beberapa definisi *Supply Chain Management* diatas, maka dapat disimpulkan *Supply Chain Management* adalah suatu metode yang mengintegrasikan pengelolaan aliran informasi, produk, barang dan jasa dalam fungsi *supply chain* dengan pendekatan yang terintegrasi. Dari dalam *Supply Chain Management* bisa meliputi penetapan: 1. Pengangkutan, 2. Penransferan kredit dan tunai, 3. Pemasok (Supplier), 4. Distributor dan Bank, 5. Utang dan Piutang, 6. Pergudangan, 7. Pemenuhan pesanan dan 8. Pembagian informasi mengenai peramalan pada permintaan, produksi dan kegiatan pada pengendalian persediaan. Dimana, penetapan diatas membuat sebuah rantai pasokan yang berfokus pada memaksimalkan nilai kepada konsemen yang dituju.

Alasan mengapa masyarakat menginginkan ketersediaan daging sapi/kerbau dipenuhi oleh daging beku dari Indonesia karena masyarakat telah faham bahwa untuk mengkonsumsi daging segar membutuhkan dana yang besar, sehingga untuk memenuhi pemenuhan gizi keluarga maka solusi yang paling tepat adalah mengkonsumsi daging beku, tetapi daging beku yang dikonsumsi hendaknya memiliki surat resmi yang jelas dari pemerintah Republik Indonesia, sehingga ketentraman bathin masyarakat dapat teratasi. Selama ini daging beku yang masuk lewat negara tetangga adalah daging beku tanpa dokumen resmi atau ilegal, sehingga penjaminan atas kualitas daging masih sangat lemah.

b. Penilaian Terhadap Kriteria Pertimbangan dalam Mengonsumsi Daging

Penilaian responden terhadap kriteria yang menjadi pertimbangan dalam mengonsumsi daging adalah 5,26 % untuk kemudahan mendapatkannya dan daging berasal dari perdagangan yang jujur dan adil, dan 44,73 % responden memilih jaminan kualitas dan harga terjangkau sebagai kriteria yang menjadi pertimbangan dalam mengonsumsi daging.

Hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat Kabupaten Nunukan masih sangat terbatas, hal ini ditunjukkan oleh pengeluaran perkapita penduduk Nunukan tahun 2014 adalah Rp 742.468,- dan distribusi pengeluaran penduduk Nunukan 52,81 % untuk makanan dan hanya 47,19 % adalah non makanan (BPS Kabupaten Nunukan, 2015). Dan dari 52,81 % yang digunakan untuk pengeluaran makanan berupa pengeluaran untuk daging adalah 3,01 %. Hal inilah yang menyebabkan tingkat pembelian terhadap daging masih sangat rendah. Sehingga kebutuhan daging beku dengan harga Rp 80.000,- per kilo sangat digemari, sementara daging sapi segar adalah Rp 120.000,- per kilonya, agak sulit dipasarkan karena faktor harga yang terlalu tinggi.

1). Ketersediaan daging Berdasarkan Kriteria Kemudahan Dalam Mendapatkan

Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria kemudahan dalam mendapatkan adalah 5,26 % dari daerah lain di Indonesia, 13,1 % melalui pemotongan sapi di Nunukan dan 7,8 % daging beku dari Indonesia, dan selebihnya kemudahan mendapatkan daging beku asal Malaysia mencapai 73,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran daging beku ilegal masih sangat mudah di dapatkan di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Nunukan.

Menurut Tjiptono (2004 : 63) mempunyai pendapat bahwa untuk mengukur kepuasan konsumen adalah dengan kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa. Ketersediaan produk juga akan memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Pelanggan akan semakin puas apabila produk mudah dijangkau dan selalu tersedia untuk dibeli konsumen (pasokan yang kontinyue).

Dan kenyataan yang ada juga pendapat yang diutarakan oleh pedagang daging serta Ketua Asosiasi Daging Kabupaten Nunukan menyatakan selama bulan Maret saat pertama kalinya diluncurkan daging beku oleh eks Bulog dari Jakarta ke Tarakan , maka sampai sekarang Nunukan hanya mendapat 2,2 ton daging Allana masuk lewat Tarakan ke Nunukan, sementara kebutuhan akan daging di Nunukan dalam perharinya membutuhkan 100-150 kg daging sapi. Sehingga kekurangan daging tersebut didapatkan dari daging beku ilegal asal Malaysia. Hal ini didukung oleh pedagang bakso yang melakukan penggilingan dalam sehari dapat menggiling antara 80 – 100 kg daging sapi. Dan sisanya sekitar 50 kg tersebar di rumah makan dan penjual coto makasar serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

2). Ketersediaan Daging Berdasarkan Keterjangkauan Harga

Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria keterjangkauan harga yang digemari responden adalah 5,26 % melalui pemotongan sapi di Nunukan, 31,57 % menggemari daging beku dari Indonesia, dan 63,15 % menggemari daging beku asal Malaysia.

Keterjangkauan harga adalah harga sesungguhnya dari suatu produk yang tertulis di suatu produk yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Artinya pelanggan cenderung melihat harga akhir dan memutuskan apakah akan menerima nilai yang baik seperti yang diharapkan (digilib.uinsby.ac.id/5100/5/Bab%202.pdf diakses tanggal 12 Oktober 2017).

Harga daging segar di Nunukan Rp 120.000,- per kilonya sementara daging beku asal Malaysia hanya Rp 70.000 – Rp 75.000,-. Dan yang paling banyak memakai daging beku adalah pembuatan bakso, hal ini melihat tempat penggilingan bakso di Nunukan hanya dimiliki oleh dua orang pedagang makanan, dan sampai saat ini masyarakat masih menggemari bakso sebagai makanan favorit, dimana harga seporisi bakso masih terjangkau oleh masyarakat Nunukan yaitu Rp 10.000 – Rp 15.000,-, sehingga masyarakat masih dapat membeli karena masih dibawah harga seporisi nasi campur yang telah mencapai Rp 25.000,-.

3). Ketersediaan Daging Berdasarkan Kontinuitas Pasokan Daging

Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria kontinuitas pasokan daging dimana 2,63 % diperoleh dari pemotongan sapi di Nunukan, 7,89 % diperoleh dari daerah lain dan daging beku dari Indonesia, dan 78,94 % diperoleh dari daging beku dari Malaysia. Mengapa daging beku malaysia masih memiliki pasokan yang cukup banyak dan kontinyu, hal ini disebabkan daging beku asal Jakarta masih sangat terbatas, dan belum ada pemasok yang tetap sebagai pemasok yang bertanggungjawab atas ketersediaan daging beku asal Jakarta. Hal ini disebabkan pemasukan daging beku legal masih dalam proses penggarapan.

Sehingga masih butuh koordinasi dan kesepakatan antar instansi yang masih belum ada kata sepakat.

4). Ketersediaan Daging Berdasarkan Jaminan Kualitas

Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria Jaminan kualitas menunjukkan bahwa 0 % daging beku dari Malaysia kurang memiliki jaminan kualitas hal ini dikarenakan faktor ilegal yang mempengaruhinya, selanjutnya 2,63% dari daerah lain di Indonesia, 5,26 % daging Beku dari Indonesia dan 92,10 % pemotongan sapi di Nunukan.

Menurut Tjiptono (2004 : 67) definisi kualitas adalah produk yang bebas cacat, dengan kata lain kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat bagi pelanggan.

Hal senada yang dikemukakan oleh Duriyanto, dkk (2004 : 37), terdapat dimensi-dimensi yang dikategorikan kualitas suatu produk, antara lain :

- 1). *Performance*, yaitu karakteristik operasional suatu produk yang utama
- 2). *Features*, yaitu elemen sekunder dari produk atau bagian dari produk
- 3). *Conformance with specifications*, yaitu tidak ada produk yang cacat.
- 4). *Reliability*, yaitu konsistensi kinerja produk
- 5). *Durability*, yaitu daya tahan suatu produk

Dalam hal ini menunjukkan masyarakat Nunukan telah mengerti bahwa untuk jaminan kualitas memang daging sapi segar hal ini disebabkan oleh :

- a. Daging sapi segar memiliki kandungan gizi yang masih tinggi
- b. Daging sapi segar aman dikonsumsi karena belum terkena bahan kimia, misalnya bahan pengawet seperti formalin, dan sebagainya.

- c. Daging sapi segar memiliki tingkat keamanan akan proses pemotongan yang halal, dan keutuhan daging sangat terjamin.
- d. Proses pematangan daging cukup cepat sehingga sangat digemari masyarakat yang saat ini memiliki budaya makan makanan cepat saji.

5). Ketersediaan Daging Berasal dari Perdagangan Yang Adil dan Jujur

Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria daging berasal dari perdagangan yang adil dan jujur menunjukkan bahwa 0 % untuk daging beku dari Malaysia hal ini menunjukkan bahwa perdagangan daging beku adalah perdagangan yang ilegal sehingga tidak melalui prosedur perdagangan yang benar atau secara resmi, maka nilai kejujurannya sangat rendah, apalagi dari segi keadilan, masih sangat jauh. Karena daging beku asal Malaysia masuk secara ilegal sehingga tidak diketahui jaminan kualitasnya, apalagi pertanggungjawaban terhadap keamanan daging bila dikonsumsi oleh masyarakat. Dan 2,63% untuk pemasukan dari daerah lain, 42,10 % untuk pemotongan di Nunukan dan 55,26 % untuk daging beku dari Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa daging beku yang resmi memiliki tingkat keamanan yang baik, memiliki tingkat kejujuran yang tinggi karena telah melalui proses masuk dengan status dokumen yang jelas dan telah melalui pemeriksaan yang ahli sehingga masyarakat terjamin keamanannya ketika mengkonsumsi daging beku tersebut. Dan harga daging beku memang masih sangat wajar dan masih dapat ditolerir dimana harga masih sangat terjangkau oleh masyarakat yaitu Rp 85.000,- perkilonya. Dan daging beku legal asal Jakarta ini memang sudah pantas dikembangkan di Kabupaten Nunukan agar daging beku ilegal dari Malaysia dapat dihentikan segera.

6). **Ketersediaan Daging Berdasarkan Kriteria mengurangi Ketergantungan dari Luar**

Alternatif ketersediaan daging berdasarkan kriteria mengurangi ketergantungan dari luar adalah 18,42 % melalui pemotongan sapi di Nunukan, 21,05 % dari daerah lain dan 60,52% melalui pemasukan daging beku dari Indonesia sementara daging beku dari Malaysia tidak ada yang memilih atau 0%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat inginnya daging beku asal Indonesia dan menolak untuk daging ilegal, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah guna mensukseskan pemasukan daging beku legal dari Jakarta secepatnya, karena masyarakat saat ini sangat mendukung.

Tabel 4. 43. Persentase Alternatif Terhadap Kriteria

No	Kriteria- Kriteria	Alternatif Ketersediaan Kebutuhan Daging di Kabupaten Nunukan				Jumlah
		Daging Beku dari Malaysia (%)	Dari Daerah lain (%)	Pemotongan Sapi di Nnk (%)	Daging Beku di Indonesia (%)	
1.	Kemudahan dlm mendapatkannya	73,6	5,26	13,1	7,8	100 %
2.	Keterjangkauan Harga	63,15	0	5,26	31,57	100 %
3.	Kontinuitas Pasokan Daging	78,94	7,89	2,63	7,89	100 %
4.	Jaminan Kualitas	0	2,63	92,10	5,26	100 %
5.	Perdagangan yang Adil dan jujur	0	2,63	42,10	55,26	100 %
6.	Mengurangi Ketergantungan dari Luar	0	21,05	18,42	60,52	100 %

Sumber : Hasil angket responden, 2017.

Berdasarkan tabel 4.43 menunjukkan alternatif atas masuknya daging beku dari Malaysia merupakan nilai tertinggi untuk kemudahan dalam mendapatkannya.

73,6% , keterjangkauan harga 63,15 % dan kantinyuitas pasokan daging dengan 78,94 % . Sementara untuk Pematangan sapi di Nunukan memiliki nilai tertinggi dalam jaminan kualitas yaitu 92,10 % , dan Daging beku dari Jakarta memiliki nilai tertinggi dalam perdagangan yang adil dan jujur yaitu 55,26 % dan untuk mengurangi ketergantungan dari luar sebesar 60,52%.

Berdasarkan hasil angket, pilihan responden terhadap alternatif yang bisa memenuhi ketersediaan daging di Kabupaten Nunukan yakni 18 responden (47,4%) memilih daging beku dari Indonesia dan 14 orang responden (36,9%) menginginkan pematangan sapi di Nunukan.

Keyakinan responden terhadap alternatif yang bisa memenuhi ketersediaan daging di Nunukan adalah daging beku di Indonesia 47,4 % , atau mencapai 18 responden yang memilih, 36,9 % memilih pematangan sapi di Nunukan dan 7,8 % menginginkan ketersediaan daging bersumber dari daging beku dari malaysia atau dari daerah lain di Indonesia.

c. Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Sumber pemenuhan Ketersediaan Daging di Nunukan

Berdasarkan kriteria sumber pemenuhan daging sebanyak 24 orang responden atau sebesar 63,15 % responden yang menyatakan pemenuhan ketersediaan daging beku dari Indonesia, yang terdiri 9 responden merasa puas (memuaskan) , 9 orang cukup memuaskan dan 6 orang menyatakan tidak memuaskan. Dan 10 orang responden atau sebesar 26,3 % menyatakan ketersediaan daging dari pematangan sapi di Nunukan , yang terdiri dari 2 orang menyatakan tidak memuaskan, 3 orang cukup memuaskan, 3 orang responden menyatakan memuaskan dan 2 orang menyatakan sangat memuaskan.

Berdasarkan kriteria kemudahan mendapatkan daging menunjukkan bahwa 24 orang atau sebesar 63,15% responden menyatakan daging beku dari Malaysia sangat mudah didapatkan dengan rincian 17 orang merasa cukup memuaskan, 5 orang tidak memuaskan dan 2 orang menyatakan memuaskan. Dan 8 orang menyatakan kemudahan mendapatkan daging dari daging beku dari Indonesia, dengan rincian 5 orang cukup memuaskan, 2 orang tidak memuaskan, 1 orang memuaskan.

Berdasarkan kriteria harga daging yang terjangkau adalah daging beku dari Malaysia mendapatkan responden yang terbesar yaitu 20 orang dengan rincian kepuasan adalah 9 orang merasa tidak memuaskan, 7 orang cukup memuaskan, 3 orang memuaskan dan 1 orang sangat memuaskan. Dan selanjutnya 16 responden menyatakan bahwa harga daging beku dari Indonesia sudah cukup terjangkau, dengan rincian 3 orang menyatakan tidak memuaskan, 6 orang menyatakan cukup memuaskan, 6 orang memuaskan dan 1 orang menyatakan sangat puas. Tingkat kepuasan memang berbeda karena untuk daging asal dari Indonesia memang belum tersedia pemasok utama, sehingga pedagang sendiri yang mengambil dari tarakan, namun karena terhambat oleh faktor biaya transportasi daging yang cukup tinggi. Namun rata-rata pedagang daging telah menyadari adanya daging yang sehat, daging yang legal dan ilegal sehingga baik pedagang maupun konsumen atau masyarakat Nunukan menginginkan yang legal karena terjamin keamanan dan pertanggungjawaban akan keberadaan daging tersebut aman.

Tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria pasokan daging yang kontinyue, 28 responden dari 38 responden menyatakan daging beku dari Malaysia memiliki pasokan daging yang kontinyue, dengan rincian 20

menyatakan cukup memuaskan, 6 orang tidak memuaskan, dan 2 orang menyatakan memuaskan dan sangat memuaskan. Dan untuk daging beku asal Indonesia hanya 7 responden menyatakan cukup memuaskan 5 orang dan 2 orang menyatakan tidak memuaskan, hal ini terkait dengan jumlah pasokan terbatas karena memang untuk daging beku legal dari Indonesia, belum memiliki pemasok yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, hal ini masih perlu dikoordinasikan oleh instansi terkait dengan pihak ketiga untuk menjadikan pemasok utama daging beku legal asal Indonesia, hal inilah yang menghambat keberadaan daging legal asal Indonesia masih sangat kurang masuk di wilayah Nunukan.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Pedagang daging dan Ketua Asosiasi pedagang daging di Kabupaten Nunukan yaitu :

“ Memang pasokan daging legal saat ini masih terbatas karena pemasok belum ditentukan atau ditunjuk oleh Pemda Kab. Nunukan. Dan masih dalam tahap penyediaan awal guna mendapatkan solusi yang terbaik bagi masyarakat Nunukan.”

Berdasarkan Tingkat kepuasan konsumen terhadap jaminan kualitas adalah pemotongan sapi di Nunukan memiliki responden terbesar yaitu 35 responden dari 38 responden seluruhnya menyatakan untuk jaminan kualitas memang pemotongan sapi di Nunukan memiliki jaminan kualitas terbaik, karena sapi yang di potong di Nunukan adalah sapi yang terbaik, memiliki kualitas daging yang masih segar, dan tingkat keamanan dari segi kehalalan pemotongan dilakukan oleh masyarakat sendiri yang memang muslim, sehingga masyarakat aman untuk mengkonsumsinya. Masyarakat Nunukan sudah mengerti arti kualitas namun dari segi perekonomian masyarakat masih mencari yang murah sehingga terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari. Daging segar di Nunukan

memiliki nilai jual Rp 120.000,- per kilogramnya dalam kondisi hari Raya atau ketika pemakaian sangat besar (hari Lebaran).

Berdasarkan tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria prosedur perdagangan daging yang jujur dan adil, maka 26 responden menyatakan daging beku dari Indonesia memiliki prosedur perdagangan daging yang jujur dan adil, dengan 15 orang menyatakan cukup memuaskan, 6 orang memuaskan dan 3 orang tidak memuaskan dan 2 orang sangat memuaskan, dan 12 responden lainnya menyatakan bahwa pemotongan sapi di Nunukan merupakan kriteria prosedur perdagangan daging yang adil dan jujur.

Berdasarkan tingkat kepuasan konsumen terhadap kriteria mengurangi ketergantungan daging dari luar, maka 25 responden menyatakan bahwa daging beku dari Indonesia adalah yang tepat, dan 9 responden menyatakan bahwa untuk mengurangi ketergantungan daging dari luar adalah pemotongan sapi di Nunukan, dan 4 responden sisanya menyatakan pemasukan dari daerah lain guna mengurangi ketergantungan daging dari luar.

Di Kabupaten Nunukan laju permintaan daging terus meningkat setiap tahunnya tidak dapat diimbangi dengan percepatan produksi dari dalam provinsi. Untuk menutupi kesenjangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan sekarang menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan melakukan beberapa kebijakan pengadaan bibit sapi dari luar provinsi. Populasi sapi potong berjumlah 8.860 ekor pada tahun 2017 saat ini belum mampu menyediakan permintaan daging di Kabupaten Nunukan.

Pencapaian program swasembada daging sapi di Kabupaten Nunukan masih sulit dicapai karena pengembangan peternakan belum optimal. Selain itu populasi yang ada belum bisa diandalkan untuk memasok kebutuhan masyarakat Nunukan. Yang terjadi malah banyaknya pemotongan sapi betina produktif. Pengembangan peternakan di Kabupaten Nunukan apabila tidak diimbangi dengan produktivitas dari ternak, maka akan terjadi pengurusan populasi dan akibat-akibatnya lain yang tidak menguntungkan bagi pembangunan peternakan di Kabupaten Nunukan.

Ketidakmampuan penyediaan daging untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Nunukan menyebabkan kebutuhan daging masih menggunakan daging beku masuk lewat Tawau Malaysia yang masuk secara tidak resmi atau secara ilegal, hal ini memang masih berlaku sampai sekarang. Sehingga pemerintah daerah berusaha menyediakan daging yang aman, segar, utuh dan halal bagi masyarakat. Hal ini telah diusahakan dengan menyediakan daging beku legal yang didatangkan lewat jalur yang resmi oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun kendala yang dihadapi adalah belum ada pemasok tunggal yang ditunjuk untuk menyediakan daging beku asal Indonesia.

Sehingga untuk menyediakan daging beku yang benar-benar aman, segar, utuh dan halal tinggal selangkah lagi yaitu, dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan harus berkoordinasi dengan instansi dalam hal ini tupoksi Dinas Perdagangan bidang perdagangan dalam Negeri dengan eks Bulog sebagai pemasok daging legal yang ditunjuk dalam menyediakan daging beku di Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tarakan untuk bersama-sama menentukan perusahaan yang mampu menyediakan daging beku legal sampai di

Nunukan. Setelah pasokan daging sapi telah diperoleh maka fungsi pengawasan segera ditegakkan dengan bekerjasama antar instansi yaitu pengawasan terhadap masuknya daging ilegal melalui pintu-pintu masuk barang ilegal yang merupakan tugas kantor Bea dan Cukai serta Karantina Hewan, dengan instansi pemerintah daerah yaitu Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Agustino (2016 : 135) yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil responden yang masuk masyarakat menginginkan jaminan kualitas yang baik atas ketersediaan daging sapi maupun daging ayam di Kabupaten Nunukan. Namun karena faktor ekonomi maka kemampuan untuk menghadirkan daging yang segar, aman dan bernilai gizi yang tinggi membutuhkan nilai jual yang cukup tinggi, dan masyarakat belum mampu untuk membelinya. Sehingga daging beku legal yang menjadi pilihan utama, dimana harga masih dapat terjangkau juga memiliki keamanan dan tingkat kehalalan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017 (Study Kebijakan Penyediaan Pangan Asal Hewan) belum berjalan secara optimal karena ada dua faktor yaitu faktor internal berupa sumberdaya ternak (populasi ternak) masih terbatas untuk mencapai swasembada daging sapi, serta kondisi peternak yaitu beternak masih usaha sambilan dan tradisional, komitmen peternak masih lemah, dan faktor eksternal yang mempengaruhi kegagalan swasembada kurangnya fasilitas pendukung yaitu alat transportasi antar wilayah. Hal ini mengakibatkan harga pakan ternak utamanya konsentrat yang cukup tinggi, dan belum adanya usaha kemitraan dengan pihak ketiga, kebijakan pemerintah belum konsisten dilaksanakan yaitu kurangnya pengawasan dari instansi terkait.
2. Faktor penghambat dari implementasi yang juga berpengaruh adalah faktor disposisi dan karakteristik pelaksana, terutama koordinasi antar instansi harus tetap terjaga guna membentuk kerjasama antar instansi baik instansi vertikal maupun dengan pejabat pemerintah daerah guna menciptakan lingkungan yang sehat dalam mendukung ketersediaan

pangan asal hewan yang terjamin kualitasnya, melalui pengawasan yang optimal.

3. Persepsi masyarakat yang paling dominan terhadap ketersediaan daging pertama jaminan kualitas, kedua pasokan daging yang kontinyue, ketiga adalah kemudahan dalam mendapatkan, dan ke empat adalah keterjangkauan harga. Sehingga yang paling tepat dalam keinginan konsumen yaitu daging beku asal Jakarta yang mampu menjamin kualitas daging.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran dan masukan kepada dinas terkait , antara lain :

- (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (study kebijakan ketersediaan pangan asal hewan) masih belum berjalan optimal, karena kondisi peternak yang masih memiliki komitmen yang lemah dan sebelumnya pemerintah harus menyediakan stoks daging beku legal dari Jakarta setelah itu baru melakukan pengawasan dari instansi terkait seperti Kantor Bea Cukai dan Balai Karantina Pertanian kelas II wilayah kerja Kabupaten Nunukan masih sangat lemah .
- (2) Disposisi/sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehata Hewan di Kabupaten Nunukan Tahun

2017. Oleh karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah berasal dari orang-orang yang memiliki dedikasi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal

- (3) Belum ada pemasok yang ditunjuk oleh dinas terkait dan dapat menghadirkan harga daging yang bersaing dengan daging dari Malaysia melalui penggunaan kapal bersubsidi (Tol Laut), begitu pula dengan pembelian konsentrat sebagai pakan dapat menggunakan Tol Laut yang lebih murah, namun semua harus melalui koordinasi dengan dinas terkait. Dengan menghadirkan produk yang lebih murah dengan memangkas rantai distribusi tersebut maka Nunukan dapat menyaingi harga daging beku dan daging ayam Malaysia. Dengan harga yang lebih murah maka dengan sendirinya pemasukan daging beku dan daging ayam dari sebelah dapat terhambat dengan sendirinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Baliwati, Y.,F., Katrin,S. 2004. *Sistem Pangan dan Gizi*. Pengantar Ketahanan Pangan dan Gizi. Jakarta: Penebar Swadaya
- Bhatnagar, R.,& Teo, C. C. (2009). *Role of logistics in enhancing competitive advantage: A value chain framework for global supply chains*. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.
- Bogdan R dan Taylor, SJ. 1993. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh A. Khozim Afandi. Usaha Nasional. Surabaya.
- Darwin. 2000. *Implementasi kebijakan*. Yogyakarta Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Ekowati T, Darwanto DH, Nurtini S, Suryantini A. 2011. *The Analisis of Beef cattle subsystem agribusiness implementation in central Java Propince, Indonesia*. JITAA. 36 : 281-289.
- Fandy Tjiptono, 2004. *Perspektif Manajemen dan Pemasaran Kontemporer* Yogyakarta.
- Fariad, Andi Syamsu, sastro M. Wantu, 2012. *Studi Analisa Kebijakan*. Konsep, Teori dan aplikasi Teknik analisa kebijakan pemerintah. Penerbit PT Refika Aditama. Bandung.
- Heizer, J., & Render, B. (2011). *Principles of Operations Management*. 8. painos.
- Heizer, Jay dan Barry Render. (2004). *Principles of Operations Management*. Fifth Edition. Pearson Education, Inc. Upper Saddle River : New Jersey
- Kompas.com <http://www.indolivestock.com/news/market-update/33-konsumsi-daging-indonesia-masih-rendah.html> diakses tanggal 12 Oktober 2017
- Kompas.com.2016hhttp://ekonomi.kompas.com/read/2016/06/16/093000326/Konsumsi_Daging_Ayam_di_Indonesia_Masih_Kalah_Dibanding_Malaysia diakses tanggal 12 Oktober 2017.
- Leo. A. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Penerbit Alfabeta Bandung.
- Lubis Solly, 2007. *Kebijakan Publik*. Penerbit CV. Mandar Maju. Bandung

- Miles, MB. Huberman, A.M. dan Saldana.J. 2014. *Qualitative Dan Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA ; Sage Publications Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. UI-Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Nawawi. H. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nugroho dan Tilar., 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nugroho. R. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Pujawan, I. N. 2005. *Supply Chain Management*. Edisi Kedua. Guna Widya. Surabaya.
- Purwanto Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Konsep dan Aplikasinya di indonesia. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Russel R. S. and Benhard W. Taylor., 2000 . *Operation Management : Focus On Qualiry andCompetitiveness*, Upper Saddle River : Practice Hall. Inc.
- Suharno . 2010, *Dasar-dasar Kebijakan Publik, Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, UNY Press, Yogyakarta
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. CV. Bandung. Alfabeta
- Subarsono.AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Said, Andi Ilham, dkk, 2006. *Produktivitas dan Efisiensi dengan Supply Chain Management*. PPM. Jakarta.
- Suwitri.S, Kismartini, Santosa.S,Purnaweni.H, dan Yuwono .T. 2016. Buku *Materi Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka. Cetakan keempat.
- Swadaya Majalah. *Media Bisnis Pertanian*. Edisi 54. Februari 2016. Hal. 8.
- Tangkilisan, Hessel Nogi.S. 2003. *Kebijakan Publik yang membumi*. Lukman Offset. Jakarta
- Tribunnews.com. 2017. *Diduga Keracunan Makanan Saat Hajatan, 70 warga Nunukan Muntah-muntah*. Diakses tanggal 6 Juni 2017.

- Tribunnews.com. 2014. Kadinkes: *Beli daging Ayam Tanya Pedagang Pakai Formalin Tidak?.* Diakses tanggal 6 Juni 2017.
- Syukur Abdullah. 1987. *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan.* Persada. Ujung Pandang.
- Wahab, A. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno. Budi. 2007. *Kebijakan Publik.* Teori dan Proses. Yogyakarta. Med Press.
- Winarno. B. 2012. *Kebijakan Publik.* Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta. CAPS.
- Winarno.B. 2014. *Kebijakan Publik Era Globalisasi. Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif.* Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service).

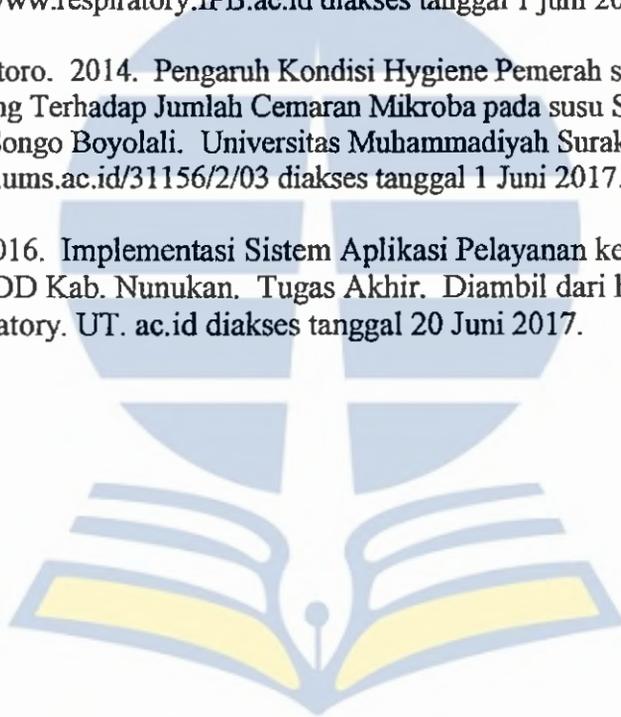
RUJUKAN PERATURAN

- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

TESIS

- Alisa Ardiyati. 2014. Analisis Proyeksi Swasembada Daging Sapi. Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik . Jakarta Januari 2011. [https://: google.com/searchg](https://:google.com/searchg). tesis analisi permintaan Daging Sapi.id.com diakses tanggal 2 Juni 2017
- Elya. S. 2016. Implementasi Kebijakan KTP-EL pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulungan (2016). Tugas Akhir. Diambil dari [Http://www. Respiratory. UT. ac.id](Http://www.Respiratory.UT.ac.id) diakses tanggal 18 Juni 2017

- Hairil Adzulyano Hadini. 2015. Konsumsi serta Produksi daging Broiler di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. <http://jurnal.UGM.ac.id> . Buletin Peternakan/article/view/1094 diakses tanggal 2 Juni 2017
- Kahar . 2013. Evaluasi Kebijakan Pemenuhan Daging di Kabupaten Nunukan. Tugas Akhir. Diambil dari <http://www.respiratory.UT.ac.id> diakses tanggal 19 Juni 2017
- Renny Yayuk Anggreini. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel . Tugas Akhir. Diambil dari [http// www.respiratory.UT.ac.id](http://www.respiratory.UT.ac.id) diakses tanggal 19 Juni 2017
- Resti Prastika Destiarni. 2016. Analisis Permintaan Daging Sapi Import. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Tugas Akhir. Diambil dari [Http//www.respiratory.IPB.ac.id](Http://www.respiratory.IPB.ac.id) diakses tanggal 1 juni 2017
- Satrio Bimantoro. 2014. Pengaruh Kondisi Hygiene Pemerah susu dan Sanitasi kandang Terhadap Jumlah Cemaran Mikroba pada susu Sapi di Peternakan MojoSongo Boyolali. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tugas Akhir <Eprint.ums.ac.id/31156/2/03> diakses tanggal 1 Juni 2017.
- Sudarmin. 2016. Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan kepegawaian (SAPK) di BKDD Kab. Nunukan. Tugas Akhir. Diambil dari [http//www.respiratory.UT.ac.id](http://www.respiratory.UT.ac.id) diakses tanggal 20 Juni 2017.



Lampiran 1 .

Daftar Nama-Nama Peternak Ayam Potong di Nunukan

No	Nama Peternak	Kapasitas Kandang (ekor)	Alamat	Terisi (ekor)
1.	H. Suwardi	24.000	Jl. Gang Damai S.Fatima	12.000
2.	Sabri	2.000	Jl. Ujang Dewa Sedadap	1.000
3.	Yusuf	1.000	Jl. Iskandar Muda	700
4.	Jusman	3.000	Jl. Mambunut selisun	2.000
5.	Lamsabrah	1.000	Jl. Pesantren Hidayatulla	500
6.	H. Lasakattu	1.500	Jl. Hasanuddin Selisun	-
7.	H. Maisah	1.000	Jl. Hasanuddin Selisun	500
8.	Lakadimmu	1.500	Jl. Lingkar	-
9.	Martha	2.200	Jl. Sei.Sembilan Gor	1.200
10.	Agus	2.000	Jl. Panah Mas	-
11.	H. Muje	7.500	Jl. Ujang Dewa Sedadap	7.500
12.	Ferry	1.000	Jl. Panah mas	800
13.	Muslimin	4.000	Jl. Ujang dewa Sedadap	3.000
14.	Supangat	1.500	Jl. Gang Limau Sedadap	1.500
15.	H. Godde	3.000	Jl. Panah Mas	-
16.	H. Dara	1.700	Jl. Lingkar	-
17.	H. Sopyan	1.500	Jl. Lingkar	500
18.	Muh. Sahir	1.500	Jl. Lingkar	-
19.	Anca	5.000	Mambunut dalam	3.000
20.	Sudirman	3.500	Mambunut	3.500
21.	H. Berlian	1.000	Jl. Sei. Apuk	400
22.	Sarifuddin	2.300	Jl. Sei. Apuk	2.300
23.	H. Zainuddin	2.000	Jl. Jagung manis Sedadap	1.500
24.	Suyakin	1.000	Jl. Patimura Selisun	-
25.	Midi	1.000	Jl. Patimura Selisun	-
26.	Raden	1.000	Jl. Pattimura Selisun	-
27.	Salmiah	1.500	Jl. Sei. Apuk	-
28.	Sawwiah	1.000	Jl.Pesantren Hidayatullah	500
29.	Bungawati	1.000	Jl.Pesantren Hidayatullah	500
30.	Natsir	2.000	Jl. Pesantren H.	1.600
31.	H. Jumatra	4.500	Jl. Pesantren.	4.500
32.	Suhajji	2.000	Jl. Pesantren. H	1.700
33.	Frans	1.500	Jl. Antasari (gor)	1.500
34.	Hamzah	6.500	Jl.Kampung Baru Selisun	6.500
35.	Mulyadi	1.200	Jl. Gang Limau	-
36.	Emil	2.000	Jl. Simpang Kadir	-
37.	H. Isse	1.000	Jl. Gang Langsung Selisun	800
38.	Andi Andang	1.000	Jl. Mambunut	-
39.	H. Kamaruddin	5.000	Jl. Rusunnawa	1.500
40.	Herman	1.000	Jl. Mambunut Dalam	1.000
41.	Allang B.	1.000	Jl. Mambunut Dalam	1.000
42.	Samsul Rijal	4.000	Jl. Selisun	4.000
43.	H. Ambo Tang	10.000	Jl. Persemaian	4.000
44.	Sunardi	5.000	Jl. Kampung Timur	2.500
45.	Thomas Ting-ting	2.000	Jl. Pongtiku	-
46.	Ronny	1.000	Jl. Ujang Dewa	500

47.	D. pangeran	1.000	Jl.Hasanudin Mambunut	800
48.	Hamka	1.000	Jl. Mambunut dalam	-
49.	Andi Alimin	1.000	Jl. Mambunut dalam	-
50.	H. Lampung	1.500	Jl. Gang Damai	-
51.	Erni	1.500	Jl. mambunut	1.500
52.	Sunarti	1.000	Jl.Pesantren Hidayatullah	1.000
53.	Ilyas	1.500	Jl. Tanjung cantik	1.500
	J U M L A H	140.400		78.800

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan 2017



Lampiran 2.**PEDOMAN WAWANCARA****IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DI KABUPATEN
NUNUKAN****(Studi Tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan di Nunukan)**

Informan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan, Dinas Perdagangan, Pelaku Usaha (Rumah makan), Pelaku Usaha (Penggilingan bakso), Pedagang daging, dan Peternak.

1. Komunikasi

- a. Menurut Ibu bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan dalam proses penyediaan pangan asal hewan?

.....

.....

- b. Apakah ketersediaan ternak sapi telah memenuhi target yang dicapai ?

.....

.....

.....

- c. Upaya apa saja yang dilakukan dalam memenuhi target tersebut?

.....

.....

.....

- d. Apa program unggulan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menambah Populasi ternak sapi ?

.....

.....

2. SUMBERDAYA

- a. Melihat perkembangan ternak yang sangat minim bahkan terkesan terjadi penurunan populasi ternak dari tahun 2010 – 2017, mengapa hal ini dapat terjadi ? faktor apa yang paling menghambat ?

.....

.....

b. Menurut ibu/bpk, butuh waktu berapa lama untuk memenuhi target tersebut?

.....

.....

c. Berapa penambahan ternak ideal setiap tahunnya untuk mencapai target tersebut?

.....

.....

d. Seberapa luas cakupan program yang telah dilaksanakan oleh DPKP? (apakah SDM Bidang Peternakan sudah cukup memadai)

.....

.....

3. DISPOSISI

a. Jika pemerintah pusat telah menyediakan daging beku harganya masih mahal, solusi apa yang sebaiknya ditempuh oleh bapak/ibu .

.....

.....

b. Kira-kira dapatkah daging dari malaysia tercegah masuk secara sendirinya, jika kita memiliki harga jual daging dibawah harga dari daging asal Malaysia.

.....

.....

c. Apakah merk daging beku dari Indonesia, dengan daging dari Malaysia sama mutunya.

.....

.....

d. Apakah dari program yang telah berjalan, hasil yang diinginkan telah tercapai. Jika belum . Apa Kendala dan hambatannya.

.....

.....

e. Apakah persediaan daging akan tercukupi bila daging dari Malaysia ditutup ,

dan digantikan dengan daging beku dari Indonesia.

.....

.....

4. KARAKTERISTIK PELAKSANA

- a. Menurut bapak perbedaan harga yang sedikit ini, sebaiknya ditempuh dengan cara apa guna mengimbangi harga daging beku dari Malaysia yang sangat murah
-
-

- b. Menurut bapak apakah keadaan seperti sekarang ini bila, dibiarkan berlarut-larut dimana daging legal dan ilegal bercampur dipasar kab. Nunukan, maka akan menyebabkan Daging allana dari Indonesia akan berkurang dan daging allana dari Malaysia yang banyak beredar saat ini. Kira-kira ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Sebaiknya keadaan seperti ini harus diselesaikan. Kira-kira kapan bisa teratasi.
-
-

- c. Siapa yang paling bertanggungjawab dengan keadaan tersebut diatas. Dan siapa yang sebenarnya harus bertindak guna mengatasi hal tersebut.
-
-

- d. Seandainya Pemda Kabupaten Nunukan tidak mampu mensubsidi terhadap transport daging beku sampai Nunukan, jalan apa lagi yang bisa ditempuh.
-
-

Lampiran 3.**DAFTAR ANGKET PENELITIAN**

Sebagai syarat menyelesaikan study Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka, kami melakukan penelitian tentang “ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Nunukan (Study Tentang Kebijakan Ketersediaan Pangan Asal Hewan)”. Mohon bantuan dan kesediaannya untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya kami akan menjamin kerahasiaan data yang Bapak/Ibu berikan, karena jawaban tersebut hanya sebagai bahan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan.

Dalam pengisian angket ini kami meminta bapak/ ibu menyisihkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan yang tentunya secara jujur dan apa adanya. Kami senantiasa menunggu jawaban dari bapak/ibu yang sangat berharga bagi kami.

Peneliti

Riatnah

Angket ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data/informasi tentang penyediaan pangan asal hewan di Kabupaten Nunukan.

Pertanyaan nomor 1 – 11 (lingkari salah satu jawaban yang dipilih)

1. Menurut Anda, penyediaan daging dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nunukan sebaiknya dipenuhi dari :
 - a. Daging Beku dari Malaysia
 - b. Daerah Lain di Indonesia
 - c. Pematangan sapi di Nunukan
 - d. Daging Beku dari Indonesia
2. Menurut Anda, kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memenuhi daging adalah :

- a. Kemudahan mendapatkannya
 - b. Harga yang terjangkau
 - c. Pasokan yang Kontinyu
 - d. Jaminan Kualitas
 - e. Berasal dari Perdagangan yang jujur dan Adil
 - f. Untuk mengurangi ketergantungan dari luar.
3. Menurut Anda , daging yang berasal dari mana yang mudah didapatkan ?
- a. Daging beku Alana Malaysia
 - b. Daerah lain di Indonesia
 - c. Pematongan sapi di Nunukan
 - d. Daging Beku Alana dari Indonesia
4. Menurut Anda, daging yang harganya terjangkau berasal dari mana ?
- a. Luar Negeri (Malaysia)
 - b. Daerah lain di Indonesia
 - c. Pematongan sapi di Nunukan
 - d. Daging Alana dari Indonesia
5. Menurut anda, daging yang pasokannya kontinyu berasal dari mana ?
- a. Luar negeri daging Alana Malaysia
 - b. Daerah lain di Indonesia
 - c. Pematongan sapi di Nunukan
 - d. Daging Alana dari Indonesia
6. Menurut anda, daging yang memiliki jaminan kualitas yang baik adalah daging yang berasal dari ?
- a. Luar negeri daging Alana Malaysia
 - b. Daerah lain di Indonesia
 - c. Pematongan sapi di Nunukan
 - d. Daging Alana dari Indonesia
7. Menurut Anda, pedagang dan daging yang dilakukan secara adil dan jujur adalah daging yang berasal dari mana ?
- a. Luar negeri daging Alana Malaysia
 - b. Daerah lain di Indonesia
 - c. Pematongan sapi di Nunukan
 - d. Daging Alana dari Indonesia

8. Menurut anda, untuk mengurangi ketergantungan dari luar, sebaiknya daging didatangkan dari ?
- Luar negeri daging Alana Malaysia
 - Daerah lain di Indonesia
 - Pemotongan sapi di Nunukan
 - Daging Alana dari Indonesia
9. Menurut Anda, apakah pemenuhan daging dengan import dari malaysia dapat memenuhi kebutuhan daging di Nunukan ?
- Ya
 - Tidak
 - Tidak tahu
10. Menurut Anda, Apakah pemenuhan daging dengan memasukan dari daerah lain dapat memenuhi kebutuhan daging di Nunukan ?
- Ya
 - Tidak
 - Tidak tahu
11. Menurut Anda, apakah pemenuhan daging dengan pemotongan sapi di Nunukan dapat memenuhi kebutuhan daging di Nunukan ?
- Ya
 - Tidak
 - Tidak tahu

Pertanyaan Nomor 12 – 18 (lingkari setiap alternatif jawaban yang dipilih) angka 1 s/d

5 pada skala yang mempunyai arti sebagai berikut :

1= Sangat tidak memuaskan

2= Tidak memuaskan

3= Cukup memuaskan

4= Memuaskan

5= Sangat memuaskan

No		1	2	3	4	5
12.	Pemenuhan Daging di Nunukan sebaiknya berasal dari .					
	a. Daging beku ilegal dari malaysia					
	b. Daerah lain di Indonesia					
	c. Pemotongan sapi di Nunukan					
	d. Daging beku legal Indonesia					
13.	Kriteria Kemudahan mendapatkan daging :					
	a. Daging beku ilegal dari Malaysia					
	b. Daerah lain di Indonesia					
	c. Pemotongan sapi di Nunukan					
	d. Daging beku legal Indonesia					
14.	Kriteria harga daging yang terjangkau					
	a. Daging beku ilegal dari Malaysia					

	b. Daerah lain di Indonesia						
	c. Pemotongan sapi di Nunukan						
	d. Daging beku legal Indonesia						
15.	Kriteria pasokan daging yang kontinu						
	a. Daging beku ilegal dari Malaysia						
	b. Daerah lain di Indonesia						
	c. Pemotongan sapi di Nunukan						
	d. Daging beku legal Indonesia						
16.	Kriteria Jaminan kualitas daging						
	a. Daging beku ilegal dari Malaysia						
	b. Daerah lain di Indonesia						
	c. Pemotongan sapi di Nunukan						
	d. Daging beku legal Indonesia						
17.	Kriteria Prosedur Perdagangan daging yang jujur dan adil adalah :						
	a. Daging beku ilegal dari Malaysia						
	b. Daerah lain di Indonesia						
	c. Pemotongan sapi di Nunukan						
	d. Daging beku legal Indonesia						
18.	Kriteria mengurangi ketergantungan daging dari luar						
	a. Daging beku ilegal dari Malaysia						
	b. Daerah lain di Indonesia						
	c. Pemotongan sapi di Nunukan						
	d. Daging beku legal Indonesia						

Pertanyaan nomor 19 -22 (lingkari salah satu jawaban yang dipilih) karakteristik responden :

19. Jenis kelamin Anda :

- a. Pria b. Wanita

20. Pendidikan formal terakhir :

- a. SMP b. SMU c. Diploma d. Sarjana e. Pasca Sarjana

21. Usia Anda saat ini :

- a. 21 – 30 thn b. 30-40 thn c. 40 -50 thn d. 50 -60 thn

22. Pekerjaan Anda :

- a. Ibu Rumah tangga b. PNS c. Wiraswasta d. Swasta

Identitas Responden :

Nama :

Alamat :

No Hp :

Lampiran 4 .

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Cholid Mohammad. SP
NIP	:	19590717 198603 1 031
Jabatan	:	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan
Alamat	:	Jl. Fatahillah, Rt. 10 Kel. Nunukan Tengah
Nomor HP	:	0858- 2131- 4850
Tempat Wawancara	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan
Tanggal Wawancara	:	7 Agustus 2017 (pukul 14.00 – 15.00)
Pewawancara	:	Riatnah
HASIL WAWANCARA		
A.KOMUNIKASI		
1.Pertanyaan	:	Bagaimana peran dan tanggungjawab pimpinan dalam ketersediaan pangan asal hewan khususnya ketersediaan daging ?
Jawaban	:	Dalam penyediaan pangan asal hewan dinas memiliki strategi utama yang bisa dijadikan bahan acuan, pemenuhan berdasarkan pemotongan dalam daerah untuk daging ayam kita sudah swasembada namun untuk daging sapi kita masih memasukkan dari tarakan secara resmi oleh eks Bulog, dan masyarakat harus kita utamakan jaminan kualitasnya tentang daging yang ASUH.
2.Pertanyaan	:	Apakah ketersediaan ternak sapi telah memenuhi target yang dicapai ?
Jawaban	:	Belum, karena anggaran yg sangat sedikit, dan kita akan berusaha secara pelan-pelan menuju swasembada daging.
3.Pertanyaan	:	Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas dalam memenuhi terget Tersebut?
Jawab	:	Upsus Siwab, Program Multi Livestock Marketing (MLM), Program Asuransi Ternak sapi betina produktif.
4.Pertanyaan	:	Apa program unggulan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menambah populasi ternak sapi
Jawab	:	Teknologi Tepat guna (Inseminasi Buatan), Pengadaan bibit sapi, Pengawasan sapi betina Produktif (pos cek point ternak harus difungsikan)
B.SUMBERDAYA		
1.Pertanyaan	:	Menurut Bapak/ibu, butuh waktu berapa lama untuk memenuhi target /swasembada ternak sapi di kab. Nunukan?

Jawab	:	Tidak dapat dipastikan, hanya kami mendukung program pemerintah bahwa swasembada akan tercapai pada tahun 2026. Jika semua faktor mendukung secara totalitas (pengadaan bibit ternak sapi, IB, dan pengawasan sapi betina produktif (cek point ternak berfungsidengan baik), pembinaan peternak dalam mendukung budidaya ternak yang baik, serta didukung oleh SDM yang trampil dan memadai baik segi jumlah dan pendidikan serta ketrampilan(Inseminator cukup tersedia, sarana prasarana, serta petugas IB, PKB dan ATR serta dokter hewan)
2.Pertanyaan	:	Melihat perkembangan ternak yang masih minim, dan malah terjadi penurunan populasi di Nunukan pada tahun 2010 – 2016 , hal ini disebabkan oleh apa ? kurang pengawasan kah sebab banyak terjadi penjualan ternak keluar daerah, atau memang terjadi kematian karena penyakit ?
Jawab	:	
2.Pertanyaan	:	Berapa penambahan ternak ideal setiap tahun nya untuk mencapai target tersebut ?
Jawab	:	Jika target lima tahun maka penambahan adalah 700 ekor pertahunnya. Sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan dana yang cukup besar guna mencapai swasembada daging.
3.Pertanyaan	:	Seberapa luas cakupan program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan ?
Jawab	:	dari 19 kecamatan dan yang baru tersentuh IB saat ini sudah sampai 14 kecamatan. Namun yang rutin dilakukan IB baru 2 Pulau yaitu Pulau Nunukan (dua Kecamatan) dan Pulau Sebatik (lima Kecamatan)
C.DISPOSISI		
1.Pertanyaan	:	Jika pemerintah pusat telah menyediakan daging beku, tapi harganya masih mahal, solusi apa yang sebaiknya ditempuh oleh bapak/ibu ?
Jawab	:	Solusinya adalah keseimbangan antara permintaan dengan penawaran pangan asal hewan terhadap tingkat kesejahteraan penduduk. Tetapi masyarakat masih memiliki pemilihan bahan makanan yang sangat mengutamakan harga dibandingkan kualitasnya. Karena peran pemerintah adalah penjaminan pangan asal hewan yang asuh.Salah satunya pangan asal hewan (daging legal) yang sehat terhadap sanitasi

		terhadap rantai dingin (Good Distribution Produk),
2.Pertanyaan	:	Kira-kira dapatkah daging dari Malaysia tercegah masuk secara sendirinya, jika kita memiliki harga jual daging dibawah harga dari daging asal Malaysia
Jawab	:	Sangat bisa. Yang penting masyarakat harus faham dan mengerti antara legal dan ilegal. Masyarakat akan mendukung yang legal, dan perbedaan harga tidak menjadi masalah, hanya sedikit perbedaannya.
3.Pertanyaan	:	Apakah merk daging beku dari Indonesia, dengan daging dari Malaysia sama mutunya.
Jawab	:	Sama-sama memiliki produk dengan merk dagang Allana yaitu daging kerbau dari India.
4.Pertanyaan	:	Apakah persediaan daging akan tercukupi bila daging dari Malaysia di tutup , dan digantikan dengan daging beku dari Indonesia
Jawab	:	Ya. Bulog sanggup mencukupinya.
D.Karakteristik Pelaksana		
1.Pertanyaan	:	Menurut bapak perbedaan harga yang sedikit ini, sebaiknya ditempuh dengan cara apa guna mengimbangi harga daging beku dari Malaysia yang sangat murah
Jawab	:	Sebaiknya tetap masyarakat harus tahu, dimana daging ilegal itu tdk layak dikonsumsi, dan perbedaan harga saya kira masyarakat pasti memakluminya. Dan pasti mau mengkonsumsi yang legal, bukan yang ilegal.
2.Pertanyaan	:	Menurut bapak apakah keadaan seperti sekarang ini bila, dibiarkan berlarut-larut dimana daging legal dan ilegal bercampur dipasar kab. Nunukan, maka akan menyebabkan Daging Allana dari Indonesia akan berkurang dan daging Allana dari Malaysia yang banyak beredar saat ini. Kira-kira ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Sebaiknya keadaan seperti ini harus diselesaikan.Kira-kira kapan bisa teratasi.
Jawab	:	Pengawasan harus ditingkatkan sehingga daging harus masuk dengan cara yang resmi. Secepat mungkin, kita akan mengatasi hal ini. Hal ini harus ada kerjasama yang baik dengan dinas terkait.
3.Pertanyaan	:	Siapa yang paling bertanggungjawab dengan keadaan tersebut diatas. Dan siapa yang sebenarnya harus bertindak guna mengatasi hal tersebut
Jawab	:	karantina hewan, Bea Cukai dan Polisi Pamong

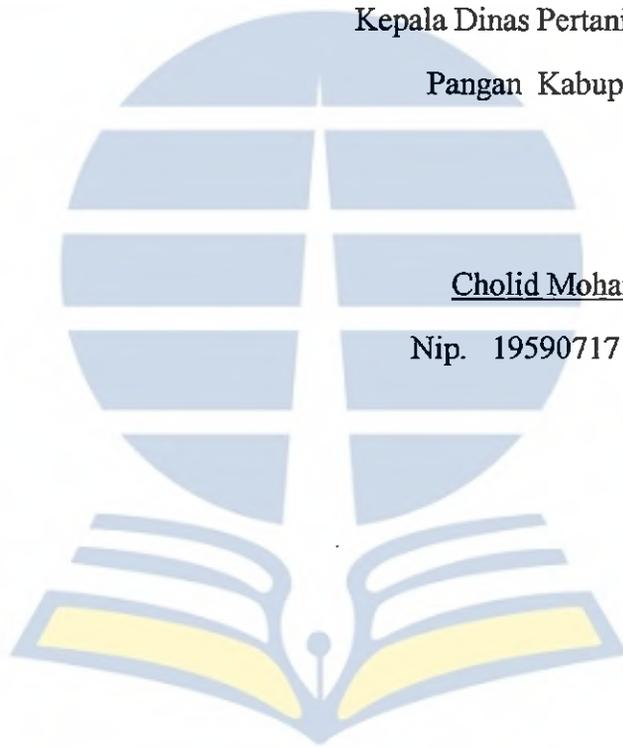
		Praja sebagai penindak.
4.Pertanyaan	:	Seandainya Pemda Kabupaten Nunukan tidak mampu mensubsidi terhadap transport daging beku sampai Nunukan, jalan apa lagi yang bisa ditempuh
Jawab	:	harus dikenakan bea cukai terhadap daging ilegal, dan daging lokal harus disiapkan guna swasembada daging akan tercapai.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Nunukan

Cholid Mohammad, SP

Nip. 19590717 198603 1 031



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Fathmi, SP.t , MS.i
NIP	:	19770919 200502 2 004
Jabatan	:	Kasi Pembibitan dan Budidaya Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara (Mantan Kasi Teknologi Tepat Guna Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Nunukan tahun 2010 – 2013)
Alamat	:	Tanjung Selor
Nomor HP	:	085250440684
Tempat Wawancara	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara
Tanggal Wawancara	:	1 Agustus 2017
Pewawancara	:	Riatnah
HASIL WAWANCARA		
A.KOMUNIKASI		
1.Pertanyaan	:	Bagaimana Peran dan tanggungjawab pimpinan dalam ketersediaan Pangan asal Hewan Khususnya ketersediaan Daging sapi (Selaku Kepala Seksi)
Jawaban	:	Dalam penyediaan pangan asal hewan dinas berusaha mengembangkan populasi ternak sapi sebanyak mungkin guna menyediakan pangan asal ternak terutama daging sapi yang sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi saat ini pemerintah masih sangat jauh dalam swasembada ternak sapi. Sehingga jalan yang terbaik adalah memasukan daging beku Allana asal India secara resmi atau legal.
2.Pertanyaan	:	Apakah ketersediaan ternak sapi telah memenuhi target yang dicapai ?
Jawaban	:	Belum, karena anggaran yg sangat sedikit, dan cek point ternak belum berfungsi secara optimal.
3.Pertanyaan	:	Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas dalam memenuhi terget Tersebut?
Jawab	:	Inseminasi dalam jumlah yang besar (4000 dosis) /tahun, pengadaan bibit ternak sapi minimal 2000 ekor/tahun
4.Pertanyaan	:	Apa program unggulan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menambah populasi ternak sapi ?
Jawab	:	Teknologi Tepat guna (Inseminasi Buatan), Pengadaan bibit sapi, Pengawasan sapi betina Produktif (pos cek point ternak harus difungsikan).
B.SUMBERDAYA		

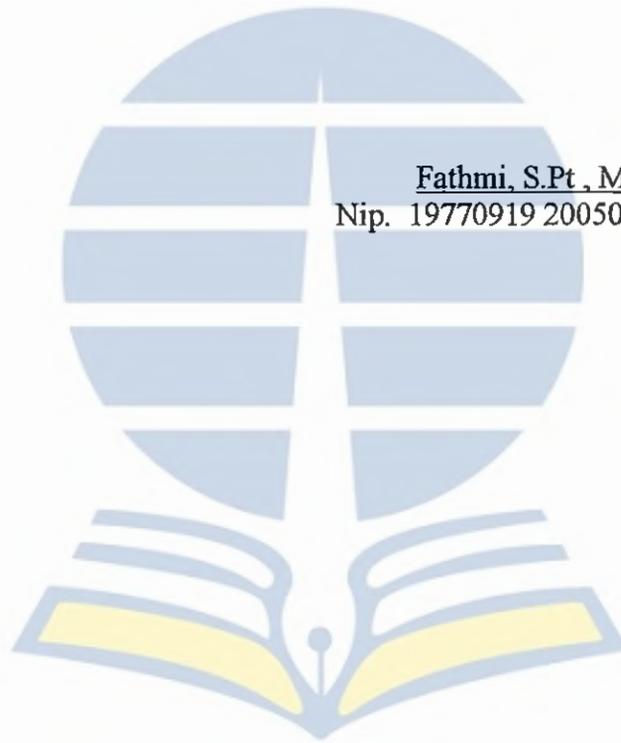
1.Pertanyaan	:	Menurut Bapak/ibu, butuh waktu berapa lama untuk memenuhi target /swasembada ternak sapi di kab. Nunukan?
Jawab	:	Tercapai dalam lima tahun jika semua faktor mendukung secara totalitas (pengadaan bibit ternak sapi, IB, dan pengawasan sapi betina produktif (cek point ternak berfungsidengan baik), pembinaan peternak dalam mendukung budidaya ternak yang baik, serta didukung oleh SDM yang trampil dan memadai baik segi jumlah dan pendidikan serta ketrampilan (Inseminator cukup tersedia, sarana prasarana, serta petugas IB, PKB dan ATR serta dokter hewan)
2.Pertanyaan	:	Berapa pertambahan ternak ideal setiap tahun nya untuk mencapai target tersebut ?
Jawab	:	Jika target lima tahun maka pertambahan adalah 700 ekor pertahunnya. Sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan dana yang cukup besar guna mencapai swasembada daging.
3.Pertanyaan	:	Melihat perkembangan ternak yang naik turun bahkan jika dilihat dari data ternak pada tahun 2010-2017 , maka bukan berkembang melainkan terjadi penurunan ternak. Hal ini disebabkan oleh apa? Kurang pengawasan kah, atau kematian yang tinggi ? atau pemotongan ternak secara besar-besaran terjadi ?
Jawab	:	Memang perkembangan ternak sangat menurun karena pemotongan ternak dan pengeluaran ternak masih sangat besar saat itu hal ini juga pengeluaran ternak dijual keluar daerah banyak terjadi melihat pengeluarannya di titik tertentu yaitu daerah perbatasan dengan wilayah lain atau perbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti wilayah Sebatik yang berbatasan langsung denga negara Malaysia.
3.Pertanyaan	:	Seberapa luas cakupan program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan ?
Jawab	:	dari 19 kecamatan dan yang baru tersentuh IB saat ini sudah sampai 14 kecamatan. Namun yang rutin dilakukan IB baru 2 Pulau yaitu Pulau Nunukan (dua Kecamatan) dan Pulau Sebatik (lima Kecamatan)
C.DISPOSISI		
1.Pertanyaan	:	Jika pemerintah pusat telah menyediakan daging beku, tapi harganya masih mahal, solusi apa yang sebaiknya ditempuh oleh bapak/ibu ?

Jawab	:	Solusinya adalah harus menahan daging dari luar. Atau subsidi harga daging agar harga menyaingi harga daging ilegal dari Malaysia
2.Pertanyaan	:	Kira-kira dapatkah daging dari Malaysia tercegah masuk secara sendirinya, jika kita memiliki harga jual daging dibawah harga dari daging asal Malaysia
Jawab	:	Sangat bisa.
3.Pertanyaan	:	Apakah merk daging beku dari Indonesia, dengan daging dari Malaysia sama mutunya.
Jawab	:	Sama-sama memiliki produk dengan merk dagang Allana yaitu daging kerbau dari India.
4.Pertanyaan	:	Apakah persediaan daging akan tercukupi bila daging dari Malaysia di tutup, dan digantikan dengan daging beku dari Indonesia
Jawab	:	Ya. Bulog sanggup mencukupinya.
D.Karakteristik Pelaksana		
1.Pertanyaan	:	Menurut bapak perbedaan harga yang sedikit ini, sebaiknya ditempuh dengan cara apa guna mengimbangi harga daging beku dari Malaysia yang sangat murah
Jawab	:	Jika bisa disubsidi biaya transport daging dari Tarakan ke Nunukan.
2.Pertanyaan	:	Menurut bapak apakah keadaan seperti sekarang ini bila, dibiarkan berlarut-larut dimana daging legal dan ilegal bercampur dipasar kab. Nunukan, maka akan menyebabkan Daging Allana dari Indonesia akan berkurang dan daging Allana dari Malaysia yang banyak beredar saat ini. Kira-kira pada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Sebaiknya keadaan seperti ini harus diselesaikan.Kira-kira kapan bisa teratasi.
Jawab	:	Pengawasan harus ditingkatkan sehingga daging harus masuk dengan cara yang resmi. Secepat mungkin, kita akan mengatasi hal ini. Hal ini harus ada kerjasama yang baik dengan dina terkait.
3.Pertanyaan	:	Siapa yang paling bertanggungjawab dengan keadaan tersebut diatas. Dan siapa yang sebenarnya harus bertindak guna mengatasi hal tersebut
Jawab	:	karantina hewan, Bea Cukai dan Polisi Pamong Praja sebagai penindak, dan dinas pertanian bidang peternakan, dan dinas kesehatan.
4.Pertanyaan	:	Seandainya Pemda Kabupaten Nunukan tidak

		mampu mensubsidi terhadap transport daging beku sampai Nunukan, jalan apa lagi yang bisa ditempuh
Jawab	:	harus dikenakan bea cukai terhadap daging ilegal, dan daging lokal harus disiapkan guna swasembada daging akan tercapai.

Kepala Seksi Pembibitan dan Budidaya

Ternak DPKP Provinsi Kaltara



Fathmi, S.Pt., M.Si

Nip. 19770919 200502 2 004

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Rendy Tri Dharmawan L
NIP	:	19810916 201001 1 005
Jabatan	:	Kasi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan tahun 2011 - Sekarang)
Alamat	:	Jl. Fatahillah, Rt. 10 Kel. Nunukan Tengah
Nomor HP	:	0852-9319-3406
Tempat Wawancara	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan
Tanggal Wawancara	:	3 Agustus 2017
Pewawancara	:	Riatnah
HASIL WAWANCARA		
A.KOMUNIKASI		
1.Pertanyaan	:	Bagaimana Peran dan tanggungjawab pimpinan dalam ketersediaan Pangan asal Hewan Khususnya ketersediaan Daging sapi (Selaku Kepala Seksi Kesehatan Hewan)
Jawaban	:	Dalam penyediaan pangan asal hewan dinas memiliki strategi utama yang bisa dijadikan bahan acuan, pemenuhan berdasarkan pemotongan dalam daerah tetapi skenario tidak dapat diandalkan karena populasi ternak sangat terbatas, apalagi pemotongan dilakukan setiap hari. Perkiraan dalam waktu 6 bulan, skenario yang kedua pemotongan dalam daerah menghandalkan ternak dari luar daerah, kendalanya membutuhkan anggaran yang cukup tinggi untuk mendatang ternak ke Kab. Nunukan. Salah satu contoh Kec. Sebuku telah menjual ternaknya ke Kab. Malino dan ternak dari kec. Sebatik dijual ke Kota tarakan. Dan sementara ternak yang masuk di kab Nunukan adalah ternak berasal dari pulau Sulawesi.
2.Pertanyaan	:	Apakah ketersediaan ternak sapi telah memenuhi target yang dicapai ?
Jawaban	:	Belum, karena anggaran masih sangat minim. Sementara untuk mencapai target swasembada membutuhkan sapi sebanyak 250.000 ekor. Dan pengadaan bibit sapi dalam setahunnya di kab. Nunukan ini hanya 40-50 ekor /tahun. Sehingga untuk mencapai swasembada masih sangat jauh. Mungkin 10 tahun pun belum tentu tercapai, jika tidak ada investor yang mau menanamkan modal untuk pengembangan ternak sapi di kab. Nunukan.
3.Pertanyaan	:	Upaya apa saja yang dilakukan oleh dinas dalam memenuhi terget tersebut?

Jawab	:	Upsus Siwab, Program Multi Livestock Marketing (MLM), Program Pendistribusian Bibit ternak pada Masyarakat, dan perlindungan terhadap pemotongan sapi betina Produktif, serta Asuransi ternak sapi betina produktif sudah mulai dijalankan tahun 2017 ini.
4.Pertanyaan	:	Apa program unggulan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menambah populasi ternak sapi
Jawab	:	Teknologi Tepat guna (Inseminasi Buatan), Pengadaan bibit sapi, Pengawasan sapi betina Produktif (pos cek point ternak harus difungsikan).
B.SUMBERDAYA		
1.Pertanyaan	:	Menurut Bapak/ibu, butuh waktu berapa lama untuk memenuhi target /swasembada ternak sapi di kab. Nunukan?
Jawab	:	Swasembada ternak sapi masih sangat jauh, namun kemampuan kab. Nunukan dalam pengembangan ternak sapi masih cukup baik bila dibandingkan dengan kab. Lain di Prov. Kaltara ini. Dengan jumlah Populasi kurang lebih 8000 ekor dan pemotongan pertahun 250-300 ekor sapi untuk acara Idul adha maka ternak sapi nunukanlah yang banyak dipotong. Demikian pula dengan penjualan dan pengeluaran ternak ke kab. lain di prov. Kaltara secara rutin terdeteksi banyak mengalir e kab. Malinau, Kota tarakan.
2.Pertanyaan	:	Berapa penambahan ternak ideal setiap tahun nya untuk mencapai target tersebut ?
Jawab	:	Dalam mencapai swasembada dibutuhkan 250.000 ekor maka posisi sekarang adalah 8000 ekor, maka kebutuhan ideal pertahunnya masih sangat besar dan membutuhkan anggaran yang cukup besar.
3.Pertanyaan	:	Seberapa luas cakupan program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Nunukan ?
Jawab	:	dari 19 kecamatan dan yang baru tersentuh IB saat ini sudah sampai 14 kecamatan. Namun yang rutin dilakukan IB baru 2 Pulau yaitu Pulau Nunukan (dua Kecamatan) dan Pulau Sebatik (lima Kecamatan)
C.DISPOSISI		
1.Pertanyaan	:	Jika pemerintah pusat telah menyediakan daging beku, tapi harganya masih mahal,

		solusi apa yang sebaiknya ditempuh oleh bapak/ibu ?
Jawab	:	Solusinya adalah keseimbangan antara permintaan dengan penawaran pangan asal hewan terhadap tingkat kesejahteraan penduduk. Tetapi masyarakat masih memiliki pemilihan bahan makanan yang sangat mengutamakan harga dibandingkan kualitasnya. Karena peran pemerintahan adalah penjaminan pangan asal hewan yang asuh. Salah satunya pangan asal hewan (daging ilegal dan legal) yang kurang sehat terhadap sanitasi terhadap rantai dingin (Good Distribution Produk).
2.Pertanyaan	:	Kira-kira dapatkah daging dari Malaysia tercegah masuk secara sendirinya, jika kita memiliki harga jual daging dibawah harga dari daging asal Malaysia
Jawab	:	Sangat bisa.
3.Pertanyaan	:	Apakah merk daging beku dari Indonesia, dengan daging dari Malaysia sama mutunya.
Jawab	:	Sama-sama memiliki produk dengan merk dagang Allana yaitu daging kerbau dari India.
4.Pertanyaan	:	Apakah persediaan daging akan tercukupi bila daging dari Malaysia di tutup, dan digantikan dengan daging beku dari Indonesia
Jawab	:	Ya. Bulog sanggup mencukupinya.
D.Karakteristik Pelaksana		
1.Pertanyaan	:	Menurut bapak perbedaan harga yang sedikit ini, sebaiknya ditempuh dengan cara apa guna mengimbangi harga daging beku dari Malaysia yang sangat murah
Jawab	:	Jika bisa disubsidi biaya transport daging dari Tarakan ke Nunukan.
2.Pertanyaan	:	Menurut bapak apakah keadaan seperti sekarang ini bila, dibiarkan berlarut-larut dimana daging legal dan ilegal bercampur dipasar kab. Nunukan, maka akan menyebabkan Daging Allana dari Indonesia akan berkurang dan daging Allana dari Malaysia yang banyak beredar saat ini. Kira-kira ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Sebaiknya keadaan seperti ini harus diselesaikan. Kira-kira kapan bisa teratasi.
Jawab	:	Pengawasan harus ditingkatkan sehingga daging harus masuk dengan cara yang resmi. Secepat mungkin, kita akan mengatasi hal ini.

		Hal ini harus ada kerjasama yang baik dengan dinas terkait.
3.Pertanyaan	:	Siapa yang paling bertanggungjawab dengan keadaan tersebut diatas. Dan siapa yang sebenarnya harus bertindak guna mengatasi hal tersebut?
Jawab	:	Karantina hewan, Bea Cukai dan Polisi Pamong Praja sebagai penindak, dan dinas pertanian bidang peternakan, dan dinas kesehatan.
4.Pertanyaan	:	Seandainya Pemda Kabupaten Nunukan tidak mampu mensubsidi terhadap transport daging beku sampai Nunukan, jalan apa lagi yang bisa ditempuh?
Jawab	:	harus dikenakan bea cukai terhadap daging ilegal, dan daging lokal harus disiapkan guna swasembada daging akan tercapai.

Kepala Seksi Kesehatan Hewan
Kabupaten Nunukan

Drh. Rendy Tri Dharmawan L
Nip. 19810916 201001 1 005

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

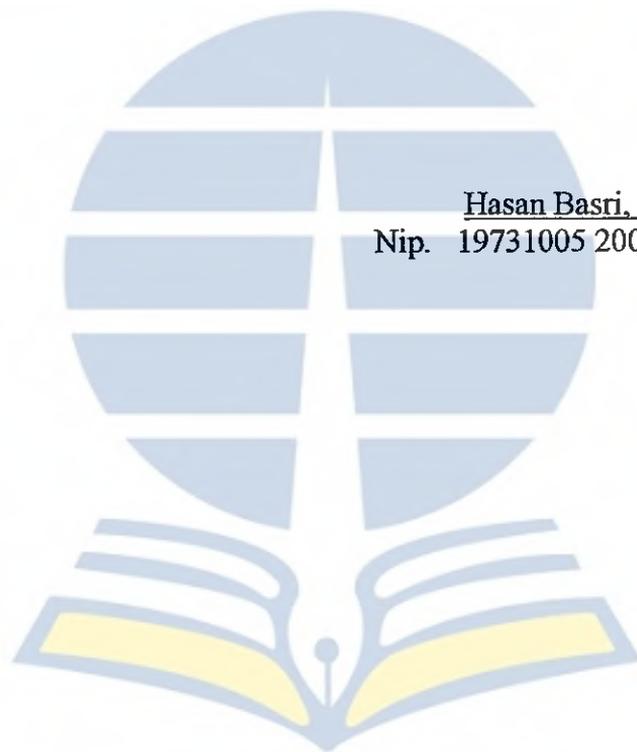
Nama Informan	:	Hasan Basri, SIP
NIP	:	19731005 200502 1 003
Jabatan	:	Kabid Perdagangan dalam Negeri
Alamat	:	Nunukan
Nomor HP	:	08134-6227-4057
Tempat Wawancara	:	Dinas Perdagangan kab. Nunukan
Tanggal Wawancara	:	18 Agustus 2017
Pewawancara	:	Riatnah
HASIL WAWANCARA	:	
1.Pertanyaan	:	Bagaimana Kondisi perdagangan daging di Nunukan ? Daging yang diperdagangkan di Nunukan sebagian besar berasal dari mana?
Jawaban	:	Untuk perdagangan daging ayam kita masih bisa swasembada daging ayam, namun masih ada sedikit-sedikit daging ayam beku asal Malaysia yang masuk, karena daging ayam malaysia memiliki kualitas yang sangat baik. Sementara daging sapi kita masih menggunakan daging sapi beku Allana asal India.
2.Pertanyaan	:	Mengapa pedagang lebih memilih daging beku asal Malaysia ?
Jawaban	:	Karena lebih murah, dan ketersediaan memang ada di pasar-pasar tradisional di Nunukan
3.Pertanyaan	:	Suplay daging yang efektif berasal dari mana ?
Jawab	:	Suplay daging yang efektif adalah daging beku Allana dari Indonesia, karena lebih terjamin keamanan, kualitas dan kesehatan dan aman untuk di konsumsi oleh masyarakat Nunukan
4.Pertanyaan	:	Apakah penyelundupan daging masih marak terjadi ?
Jawab	:	Ya. Karena jika dilihat antara masuknya daging beku legal dari Indonesia dengan ketersediaan di Nunukan, maka bisa jadi daging ilegal dari Tawau malaysia masih masuk dan beredar di Nunukan.
5.Pertanyaan	:	Faktor pendukung apa yang menyebabkan maraknya penyelundupan daging ilegal tersebut ?
Jawab	:	Karena harga lebih murah, banyak ketersediaan dan masyarakat masih terus mengkonsumsi dengan tanpa takut dengan resiko keracunan, dll.
6.Pertanyaan	:	Jika daging dari Indonesia lebih mahal, maka jalur apa yang ditempuh sebaiknya oleh Dinas perdagangan untuk mengatasi hal ini ?
Jawab	:	Memang kenyataan daging sapi segar harga perkilonya Rp130.000,- sementara daging beku

		hanya Rp 60.000-70.000,-. Sehingga sebaiknya kita mengusahakan daging beku yang ASUH, misalnya daging beku dari Indonesia yang masuk secara resmi atau legal.
7.Pertanyaan	:	Apakah ada larangan menjual daging beku dari Tawau Malaysia ?
Jawab	:	Sebenarnya daging merupakan barang larangan atau barang yang dianggap ilegal masuk dari Malaysia, karena Malaysia adalah menggunakan daging dari India. Dan Malaysia masih wilayah yang belum bebas penyakit Mulut dan Kuku pada hewan sapi atau kerbau.
8.Pertanyaan	:	Kebijakan dan upaya apa yang telah dilakukan agar suplay daging dipasar tidak kurang atau dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Nunukan ?
Jawab	:	Sebaiknya kita tetap melakukan pengawasan dan sering melakukan razia di pasar-pasar di Nunukan. Dan kita berusaha mengenalkan produk Allana dari Indonesia yang lebih higienis, aman dan terjamin kualitasnya.
9.Pertanyaan	:	Apakah Kebijakan yang diambil menguntungkan semua pihak ?
Jawab	:	Ya, karena pertimbangan kesehatan masyarakat yang kita dahulukan.
10.Pertanyaan	:	Jika saat ini ada daging Allana dari Indonesia, tapi lebih mahal sedikit bila dibandingkan dengan daging beku Allana dari Malaysia, kira-kira apa yang mesti bapak lakukan ?
Jawab	:	Perbedaan harga yang tidak terlalu tinggi ini, maka kita tetap mengusahakan daging yang lebih aman yaitu daging beku Allana dari Indonesia.
11.Pertanyaan	:	Bisakah kita membedakan bentuk fisik daging Allana antara daging beku Allana dari Malaysia dengan Daging Beku Allana dari Indonesia ?
Jawab	:	Sama-sama memiliki produk dengan merk dagang Allana yaitu daging kerbau dari India. Sehingga memang sangat sulit untuk membedakannya.
12.Pertanyaan	:	Apakah persediaan daging akan tercukupi bila daging dari Malaysia di tutup, dan digantikan dengan daging beku dari Indonesia
Jawab	:	Ya. Bulog sanggup mencukupinya.

13.Pertanyaan	:	Apakah solusi terbaik yang ditempuh untuk mengimbangi masuknya daging beku dari Malaysia ?
Jawab	:	Yang mesti dilakukan adalah pengawasan yang ketat, setelah daging legal telah tersedia dipasar.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Kabupaten Nunukan



Hasan Basri, SIP

Nip. 19731005 200502 1 003

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Matsari
Jenis Usaha	:	Pelaku Usaha Makanan (Rumah Makan) dan Usaha Penggilingan Bakso
Alamat	:	Jl. TVRI Nunukan
Nomor HP	:	082254527155
Tempat Wawancara	:	Rumah Makan Milik Matsari di Nunukan
Tanggal Wawancara	:	6 Agustus 2017
Pewawancara	:	Riatnah
HASIL WAWANCARA	:	
1.Pertanyaan	:	Darimana anda mendapatkan daging untuk keperluan Jualan ?
Jawaban	:	Dari pemotongan sendiri dan dari daging beku yang dijual dipasar dan dikios-kios daging di Nunukan.
2.Pertanyaan	:	Kalau pemasoknya berhalangan mengantar, biasanya mengambil dari mana ?
Jawaban	:	Dari daging beku asal Malaysia.
3.Pertanyaan	:	Pemasok biasanya mengambil dari mana ?
Jawab	:	Dari daging beku Allana dari Tawau Malaysia
4.Pertanyaan	:	Seberapa banyak anda membeli daging Malaysia dalam sebulan ?
Jawab	:	Dalam sehari menggiling 50 -100 kg sehingga sebulan mencapai 1,5 – 3,0 ton daging.
5.Pertanyaan	:	Apakah stok daging di pasar masih kurang ?
Jawab	:	Sangat kurang,jika mengandalkan daging sapi beku asal Indonesia, sehingga saat ini kami masih menggunakan daging beku dari Malaysia.
6.Pertanyaan	:	Jika ada pemotongan lokal, mau membeli daging lokal ?
Jawab	:	Saat ini jika tidak ada daging beku yang masuk maka kami berusaha memotong sapi sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah makan, tetapi nilai jual daging segar mencapai Rp 130.000,- /kilo gram sementara daging beku dari jakarta Rp 85.000,- /kilo gram dan daging beku ilegal dari Malaysia Rp 70.000,-/ kilo gram.
7.Pertanyaan	:	Apakah ada perbedaan rasa maupun kualitas makanan yang menggunakan daging Lokal atau daging beku Allana ?
Jawab	:	Jika untuk bakso, rasa bakso tidak terlalu berpengaruh antara daging Segar dan Daging beku Allana.
8.Pertanyaan	:	Pernahkan anda mendengar adanya razia daging

		ilegal dari Malaysia ?
Jawab	:	Pernah. Razia terakhir pada tahun 2015.
9.Pertanyaan	:	Jika ada daging beku legal harganya lebih murah dibandingkan daging lokal segar, bapak memilih yang mana ?
Jawab	:	Memilih yang harganya terjangkau yaitu daging beku legal asal Jakarta (Indonesia).
10.Pertanyaan	:	Setelah ada daging beku legal dari Indonesia , apakah daging beku ilegal dari Malaysia sebaiknya ditutup. Bagaimana menurut bapak ?
Jawab	:	Kami siap memakai daging beku Allana dari Jakarta. Karena harganya memang masih terjangkau, karena jika daging mahal maka kualitas bakso akan semakin rendah sehingga rasa juga kurang enak karena kami akan mengurangi dagingnya. Dan kemungkinan besar jika daging mahal harga bakso juga akan meningkat, jika bakso mahal kemungkinan masyarakat sebagai konsumen akan berpikir dua kali jika akan membeli bakso sebagai makanan sampingan. Karena selama ini seporsi bakso harganya masih lebih rendah dari sepiring nasi campur ayam panggang atau ayam penyet. Bakso harga perpersinya antara Rp 10.000 – 13.000,- sementara nasi ayam seporisinya Rp 25.000,-.

Pengusaha Penggilingan Bakso/Rumah Makan

Di Nunukan

Matsari

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	H. Tanga
Jenis Usaha	:	Pedagang Daging Ayam dan Daging Sapi dan Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia Cabang Nunukan
Alamat	:	Jl. Tawakal Nunukan Tengah Kab. Nunukan
Nomor HP	:	081253544111
Tempat Wawancara	:	Di Kios Daging Bpk H. Tanga
Tanggal Wawancara	:	20 Agustus 2017
Pewawancara	:	Riatnah
HASIL WAWANCARA	:	
1.Pertanyaan	:	Apakah kegiatan usaha dalam menjual dan mendatangkan daging berjalan lancar ?
Jawaban	:	Sangat lancar.
2.Pertanyaan	:	Dari mana sajakah asal daging yang didatangkan dan kemudian dijual ?
Jawaban	:	Daging beku Allana dari Jakarta, Daging ayam beku dari Malaysia, dan daging sapi beku dari Malaysia.
3.Pertanyaan	:	Upaya-upaya apa saja kah yang telah dilakukan untuk mendatangkan daging untuk dijual ?
Jawab	:	Kami membuka kios daging ini sudah sangat lama, dan kami juga pernah menjual daging sapi segar/daging lokal namun kurang ada peminatnya karena harga yang terlalu tinggi, sehingga saat ini kami memenuhi keinginan konsumen yaitu daging ayam beku dari Malaysia, daging sapi beku asal Indonesia dan Daging Sapi beku asal Tawau Malaysia.
4.Pertanyaan	:	Manakah yang lebih menguntungkan menjual daging lokal atau daging Malaysia ?
Jawab	:	Daging Malaysia lebih murah, banyak dipesan oleh konsumen sehingga lebih menguntungkan.
5.Pertanyaan	:	Mengapa pedagang lebih senang menjual daging asal Malaysia ?
Jawab	:	Untuk daging ayam potong dari Malaysia lebih digemari oleh masyarakat karena kualitas lebih baik bila dibandingkan dengan daging ayam potong Indonesia. Dan daging ayam beku Malaysia tahan jika dibawa ke pulau-pulau disekitar wilayah Kab. Nunukan karena faktor ketebalan daging dan proses pembekuan yang memang sangat bagus karena dikemas secara lebih baik. Dan permintaan konsumen terhadap daging ayam lebih banyak tersedia oleh daging beku Malaysia (seperti ketersediaan sayap ayam dalam

		jumlah yang sangat besar, paha ayam pedaging , dada ayam pedaging)
6.Pertanyaan	:	Sekarang ada daging legal dari Indonesia dan daging beku dari Malaysia, kira-kira mana yang bapak pilih ? mengapa ?
Jawab	:	Sebenarnya kami memilih yang lebih murah sehingga konsumen tidak merasa berat dan terjangkau oleh masyarakat. Dan jika memang daging legal telah ada mengapa kita mesti memakai yang ilegal, selama ini memang pemerintah yang bisa mengawasi terhadap peredaran daging ilegal. Kami pedagang dan masyarakat tinggal ikut saja. Yang kami khawatirkan adalah kelangkaan daging.
7.Pertanyaan	:	Lebih menguntungkan daging beku dari Indonesia atau daging beku ilegal dari Malaysia ?
Jawab	:	Dari segi harga lebih menguntungkan daging dari Malaysia, tapi dari segi keamanan lebih baik daging beku legal dari Indonesia.
8.Pertanyaan	:	Apakah perlu dilakukan razia guna menghindari penggunaan daging ilegal dari Malaysia ?
Jawab	:	Ya. Jika memang telah ada ketersediaan daging beku legal asal Jakarta (Indonesia) telah memenuhi kebutuhan masyarakat Nunukan.
9.Pertanyaan	:	Apakah anda tetap menjual daging dari Malaysia, jika seandainya di Nunukan telah ada ketersediaan daging beku dari Jakarta ?
Jawab	:	Kami stop pembelian daging beku asal Malaysia, jika seandainya telah ada ketersediaan daging beku asal Jakarta, karena selama ini ketersediaan daging dari jakarta terhambat oleh belum ada pemasok daging yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kab. Nunukan.
10.Pertanyaan	:	Menurut anda, apa pembeli sering mencari daging lokal atau daging beku dari Malaysia ?
Jawab	:	Pembeli atau konsumen di Nunukan selalu berpatokan dengan harga, mereka selalu mencari yang paling murah, bukan yang paling aman atau paling sehat. Harga yang paling utama. Karena tingkat perekonomian masyarakat Nunukan belum begitu tinggi.
11.Pertanyaan	:	Menurut anda, apakah yang sebenarnya diinginkan pedagang agar usahanya tetap berjalan dengan lancar ?

Jawab	:	Kami juga ingin menjual yang terjamin kualitasnya, mampu terbeli oleh masyarakat Nunukan, dan kami penjual menginginkan yang terbaik baik konsumen dan produsen.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia

Cabang Nunukan



H. Tanga

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan	:	Yogtan
	:	
Jenis Usaha	:	Peternak (Ketua kelompok tani Gelagat Lewo)
Alamat	:	Panah Mas, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan
Nomor HP	:	
Tempat Wawancara	:	Di Rumah Kediaman bapak Yogtan
Tanggal Wawancara	:	19 Agustus 2017
Pewawancara	:	Riatnah
HASIL WAWANCARA	:	
	:	
1. Pertanyaan	:	Menurut bapak, sanggupkah peternak di Nunukan menyiapkan sapi dalam rangka memenuhi ketersediaan daging masyarakat Nunukan saat ini?
Jawaban	:	Saat ini mungkin belum mampu. Karena kami beternak hanya sifatnya sebagai pengisi waktu, beternak hanya untuk sampingan, karena selama ini beternak sapi karena memang ada bantuan dari Pemda Kab. Nunukan tahun 2013 sebanyak 40 ekor sapi.
2. Pertanyaan	:	Sebagai peternak, apakah tujuan dan keinginan bapak sebagai peternak sudah tercapai ?
Jawaban	:	Belum, karena beternak sapi membutuhkan modal yang tinggi untuk membeli seekor sapi, harus memiliki lahan penggembalaan yang luas, dan selama ini beternak adalah pekerjaan sampingan selain bertani, usaha pokok kami adalah bertani, berkebun dan segala macam usaha pertanian kami telah lakukan.
3. Pertanyaan	:	Dengan sapi bantuan yang diterima, upaya apa yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan ?
Jawab	:	Saat ini target kami adalah berusaha mengembangkan sapi tersebut sampai batas waktu perguliran atau pengembalian dapat dilaksanakan.
4. Pertanyaan	:	Kira-kira kalau diperlukan sapi lokal untuk pemotongan, cukupkah sapi petani ?
Jawab	:	Tidak cukup tentunya untuk saat ini. Saat ini saja bibit sapi ini kami dapat bantuan dari Pemda Kab. Nunukan, sehingga kami harus menjaga dan mengembangkan sapi ini sebaik mungkin. Saat ini jumlah populasi sapi kami baru 70 ekor dengan ternak awal 40 ekor.
	:	
5. Pertanyaan	:	Selain sapi bantuan, apakah ada yang berasal dari sapi swadaya sendiri ?

Jawab	:	Saat ini belum ada. Dan jumlah sapi ini masih kami kembangkan secara intensif dengan jumlah masih sangat terbatas. Minimal dalam setahun kami akan mengembangkan sapi betina harus beranak dalam setiap tahunnya. Jumlahnya terbatas saat ini, karena memang dalam setahun sapi hanya menghasilkan satu anakan.
6.Pertanyaan	:	Apakah bantuan sapi sudah sampai kesemua kelompok tani ?
Jawab	:	Belum semua, sementara ini dalam proses perguliran ke kelompok tani lain, dan dilakukan secara bertahap.
7.Pertanyaan	:	Apakah upaya yang efektif dilakukan peternak agar produksi sapi dapat memenuhi permintaan daging di Nunukan ?
Jawab	:	Saat ini yang paling gencar dilakukan adalah mensukseskan program UPSUS SIWAB.
8.Pertanyaan	:	Jika usaha peternakan bapak lancar, apakah bapak akan menjual sapi bapak ke pedagang atau memotong sendiri untuk kebutuhan sehari-hari ?
Jawab	:	Beternak sapi ini untuk tabungan keluarga sebagai aset keluarga, maka jika memang kebutuhan mendesak baru kami jual, itupun untuk biaya pengobatan, pendidikan anak dan memang kebutuhan sangat penting sekali. Sebenarnya kami sangat ingin mengembangkan peternakan sapi ini dengan sebaik-baiknya. Toh keuntungan buat kelompok kita sendiri, bukan untuk orang lain.
9.Pertanyaan	:	Apa yang diinginkan peternak bila pemerintah menutup total daging dari Malaysia ?
Jawab	:	Harga jual ternak sapi lokal pastinya sangat meningkat namun mungkin perkembangan ternak tidak akan bagus, karena banyaknya ternak yang harus dijual karena untuk memenuhi kebutuhan daging di Nunukan sendiri. Dan Peternak akan membutuhkan bibit sapi betina unggul guna pengembangan peternakan sapi sehingga swasembada dapat segera terwujud atau tercapai.
10.Pertanyaan	:	Apakah sistem bantuan ternak sapi sudah tepat. Kira-kira yang paling tepat dalam mengembangkan populasi ternak sapi dengan sistem perkawinan alami atau Inseminasi Buatan
Jawab	:	Memang untuk membantu petani melalui Inseminasi buatan akansangat membantu petani, sehingga pejantan dapat segera dijual dan hasilnya dibelikan bibit sapi betina yang produktif.
11.Pertanyaan	:	Harga pasar sapi jantan siap potong sekitar berapa pak ?
Jawab	:	15 juta rupiah untuk sapi bali jantan bobot badan

		200 kg, tapi pada saat hari raya Qurban bisa mencapai 17-18 juta rupiah.
12.Pertanyaan	:	Biasanya sapi yang dijual sifatnya rutin usaha peternakan atau hanya untuk kepentingan tertentu ? biasanya yang dijual sapi betina atau jantan ?
Jawab	:	Biasanya kami menjual yang jantan, itupun harus dibelikan kembali dengan sapi betina yang masih sangat produktif. Menjual ternak hanya untuk kepentingan mendesak biasanya untuk kepentingan pendidikan anak dan biaya kesehatan keluarga.
13.Pertanyaan	:	Apakah yang menyebabkan harga sapi di Nunukan sangat tinggi ?
Jawab	:	Biaya pemeliharaan sapi sangat tinggi, pemberian pakan harus selektif, sapi butuh pakan yang banyak dan berkualitas, dan pakan ternak yang baik semakin langka karena areal untuk menanam rumput sudah mulai dikembangkan sebagai lahan sawit dan beberapa usaha perkebunan lainnya yang lebih menguntungkan untuk kebutuhan hidup petani dan keluarganya.
14.Pertanyaan	:	Apakah harga sapi lokal dapat dirasionalkan kembali ?
Jawab	:	Dapat dirasionalkan jika pemda dapat memberi subsidi harga bibit sapi betina produktif.
15.Pertanyaan	:	Upaya apa yang perlu dilakukan Pemda dalam mengembangkan populasi ternak sapi lokal ?
Jawab	:	Saat ini program Upsus siwab harus tetap dilaksanakan, dan jika perlu program IB selalu ada di setiap tahunnya, karena dapat membantu petani dalam pengembangan ternak sapi secara cepat dan menghasilkan bibit sapi yang berkualitas tinggi.

Ketua Kelompoktani

Gelagat Lewo

Yogtan

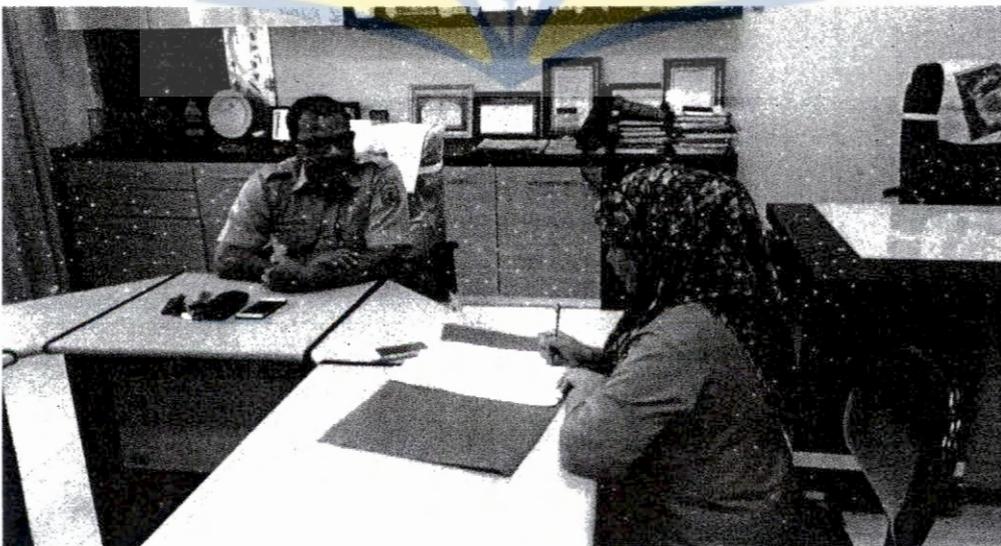
Dokumentasi Pemusnahan Produk pangan asal Hewan di Kab. Nunukan

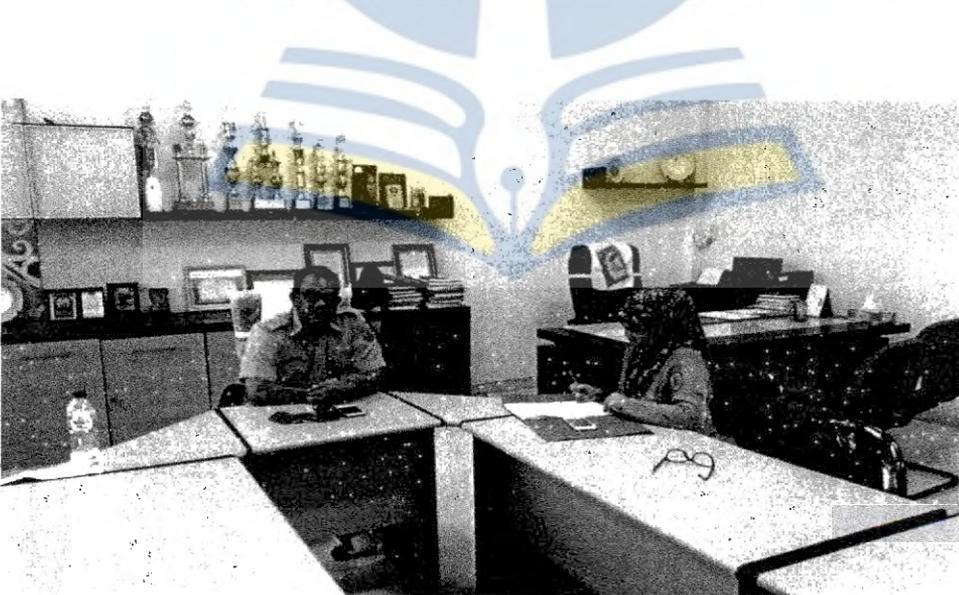


Sosialisasi NKV di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan

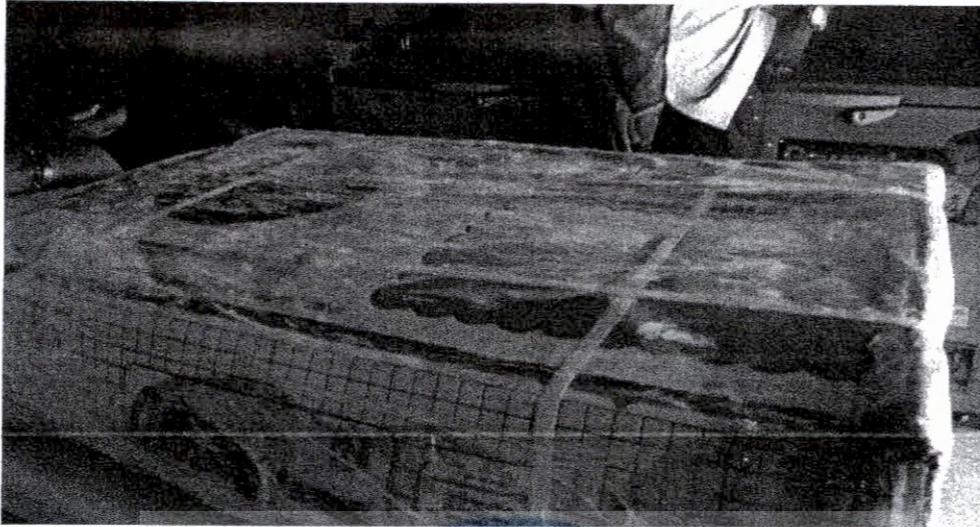


Wawancara dengan Petani Peternak, Dokter Hewan, dan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan





Daging Beku Allana yang masuk dari Malaysia dan Indonesia



MATRIK PERBAIKAN TAPM PASCA UJIAN SIDANG

NAMA : RIATNAH

NIM : 500895779

PEMBIMBING 1 : ANDY FEFTA WIJAYA, MDA., Ph. D

PEMBIMBING 2 : Dr. AGUS JOKO PURWANTO, M.Si.

No	Penguji/Pembimbing		Masukan/Saran	Keterangan hasil revisi
1.	Prof. Dr. Budiman Rusli , M.Si (Penguji Ahli)	1.	Penyebutan Tahun 2017 tidak perlu dalam Judul	Sudah terakomodir
		2.	Perumusan masalah no. 3 tambahkan kata "Bagaimana"	Sudah terakomodir pada hal 17
		3.	Gambar kerangka pemikiran pada hal (60) perbaiki	Sudah dilakukan perbaikan gambar hal 60.
		4.	Jadwal Penelitian lengkapi (72)	Jadwal penelitian hal 72
		5.	Pembahasan arahkan pada kajian teori	Sudah terakomodir pada hal 116 -166
2	Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si	1.	Perbaiki penulisan pada tanda baca koma (,)	Sudah dilakukan perbaikan pada hal 1 - 166
		2.	Perbaiki cara penulisan pada daftar pustaka.	Sudah terakomodir di hal 171-172
		3.	Perhatikan penggunaan spasi.	Sudah terakomodir di hal 1- 166
3.	Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D	1.	Mohon dipaparkan dari kebutuhan daging perhari berapa ? yang legal x yang ilegal (?) Berapa total harga per kilogram ?	Sudah terakomodir di hal 11 dan hal 91
		2.	Empat faktor tersebut mohon diurutkan sebagai hasil analisis sebagai ber-ikut : 1. Sumber daya 2. Komunikasi 3. Karakteristik Pelaksana 4. Disposisi	Sudah terakomodir di halaman 145 -154
		3.	Perbaiki tata cara Penulisan	Sudah terakomodir di hal 1 - 173
		4.	Metode Penelitian didetrilkan pada laporan dari lapangan	Sudah terakomodir di hal 71 -72
4.	Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si	1.	Perbaiki Operasionalisasi konsep (hal 61-62)	Sudah terakomodir di hal 61 - 63
		2.	Perbaiki Kesimpulan dan Saran (hal 170 -171)	Sudah terakomodir di hal 167 -169